



QANUN KABUPATEN PIDIE  
NOMOR 8 :TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
TAHUN 2023-2037

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan perekonomian daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengarahkan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pidie untuk mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang berkualitas, bertanggung jawab dan berdaya saing serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat diperlukan rencana pembangunan kepariwisataan daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Rencana induk pembangunan kepariwisataan Daerah diatur dengan Qanun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2023-2037;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);



3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman TeknisPengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 52);
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2022-2037;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN

KABUPATEN PIDIE

dan

BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUNKABUPATENPIDIE TENTANG RENCANA INDUK  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2023-2037.





## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Pidie.
2. Bupati adalah Bupati Pidie.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
9. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
10. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2023-2037 yang selanjutnya disebut dengan Ripparda adalah pedoman utama perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian Pembangunan Kepariwisata Daerah yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam Pembangunan Kepariwisata Daerah.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.



12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataaan.
13. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
14. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataaan dan seluruh pemangku kepentingannya.
15. Kelembagaan Kepariwisataaan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataaan.
16. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
17. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
18. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
19. Organisasi Kepariwisataaan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataaan.
20. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataaan.
21. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Kepariwisataaan atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah.
22. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam 1 (satu) atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.





23. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.

#### Pasal 2

Ripparda diselenggarakan berasaskan:

- a. keislaman;
- b. ketertiban dan kepastian hukum;
- c. kearifan lokal;
- d. kemanfaatan;
- e. keadilan;
- f. partisipatif;
- g. keseimbangan;
- h. keberlanjutan;
- i. keterpaduan; dan
- j. kemitraan.

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Ripparda meliputi:

- a. visi, misi, tujuan, sasaran dan jangka waktu;
- b. pembangunan industri kepariwisataan;
- c. pembangunan destinasi pariwisata;
- d. pembangunan pasar pariwisata; dan
- e. pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

### BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN JANGKA WAKTU

#### Bagian Kesatu Visi

#### Pasal 4

Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten mempunyai visi mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang berkualitas, bertanggung jawab dan berdaya saing.

#### Bagian Kedua Misi

#### Pasal 5

Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten mempunyai misi:



- a. pemanfaatan dan pengelolaan terhadap sumber daya kepariwisataan sehingga dapat berdaya saing dalam upaya meningkatkan kinerja ekonomi daerah serta peningkatan taraf hidup masyarakat;
- b. optimalisasi potensi sumber daya alam, budaya, dan SDM sebagai pendukung terciptanya pariwisata Pidie yang berwawasan lingkungan, bertanggung jawab dan Berkelanjutan;
- c. pengembangan daerah tujuan Wisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. pengembangan pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan Wisatawan baik regional maupun nasional;
- e. pengembangan industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya;
- f. pengembangan sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Kepariwisata yang berkelanjutan; dan
- g. penciptaan masyarakat yang mandiri, bertanggung jawab, dan berdaya saing untuk mendukung tercapainya pariwisata Pidie sebagai destinasi pariwisata unggulan di Provinsi Aceh.

### Bagian Ketiga Tujuan

#### Pasal 6

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten meliputi:

- a. menciptakan kepariwisataan di Kabupaten Pidie sebagai destinasi unggulan tingkat regional dan nasional dengan mengembangkan Daya Tarik Wisata Alam, Budaya, Kuliner, Buatan, Rekreasi dan serta Buatan secara terpadu dan berkelanjutan sebagai pariwisata unggulan di Provinsi Aceh;
- b. mengembangkan Daya Tarik Wisata Berbasis Potensi dan Karakteristik Kawasan dan Masyarakat lokal.
- c. meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dan pemeliharaan aset-aset dan potensi pariwisata di Kabupaten Pidie;
- d. mewujudkan media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra Kawasan Pariwisata Daerah dan apresiasi terhadapnya sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan lokal dan wisatawan nusantara;
- e. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antar usaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;



- f. mengembangkan lembaga pariwisata dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri pariwisata, kawasan pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien;
- g. meningkatkan peran dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pidie, khususnya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata dalam menghadapi persaingan yang lebih tinggi di dunia kepariwisataan regional dan nasional;
- h. mengoptimalkan manfaat yang diterima masyarakat Pidie dari pengembangan pariwisata daerahnya dengan membuka seluas-luasnya kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung maupun tidak langsung pada setiap tahap pengembangan pariwisata.

#### Bagian Keempat Sasaran

##### Pasal 7

- (1) Sasaran Pembangunan Kepariwisata Aceh mencakup peningkatan :
  - a. kontribusi produk domestik regional bruto bidang Pariwisata;
  - b. nilai devisa Pariwisata;
  - c. jumlah tenaga kerja Pariwisata yang berkualitas;
  - d. jumlah kunjungan Wisatawan mancanegara;
  - e. jumlah perjalanan Wisatawan nusantara;
  - f. lama tinggal Wisatawan;
  - g. pengeluaran Wisatawan; dan
  - h. jumlah lokasi yang menerapkan pengembangan Pariwisata berkelanjutan.
- (2) Indikator sasaran Pembangunan Kepariwisata Aceh, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

#### Bagian Kelima Jangka waktu

##### Pasal 8

Ripparda berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025.



BAB III  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI  
PEMBANGUNAN PARIWISATA

Bagian Kesatu  
Kebijakan Pembangunan Pariwisata

Pasal 9

Kebijakan Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pidie meliputi:

- a. menetapkan Destinasi Pariwisata Daerah, Kawasan Pariwisata Daerah dan mensinergikan pengembangan daya tarik wisata dengan rencana pengembangan aksesibilitas.
- b. membangun dan meningkatkan kondisi sarana dan prasarana wisata.
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas kunjungan wisata, dan upaya-upaya pemasaran pariwisata daerah.
- d. mengembangkan lingkungan destinasi pariwisata yang berkualitas (healthy, safety, environment & security).
- e. meningkatkan upaya-upaya konservasi dan pelestarian sumberdaya alam, budaya, dan binaan.
- f. meningkatkan pengawasan terhadap spontanitas pertumbuhan pariwisata.

Bagian Kedua  
Strategi Pembangunan Pariwisata

Pasal 10

Strategi Pembangunan Pariwisata Daerah terdiri atas:

- a. Strategi Pembangunan Daya Tarik Wisata
- b. Strategi Pengembangan Hotel dan Akomodasi
- c. Strategi Pengembangan Restoran/Rumah Makan
- d. Strategi Pengembangan Biro Perjalanan Wisata (BPW)
- e. Strategi Pengembangan Pasar Wisata
- f. Strategi Pengembangan Pemasaran dan Promosi Wisata
- g. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia
- h. Strategi Pengembangan Kelembagaan
- i. Strategi Pengembangan Aksesibilitas

Pasal 11

Strategi Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. peningkatan kualitas objek/daya tarik wisata yang telah ada dan diperkirakan laku dijual ke pasar wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara.
- b. identifikasi objek/daya tarik wisata dari potensi-potensi yang telah dimiliki oleh Kabupaten Pidie yang diperkirakan dapat dijual ke pasar wisatawan nusantara maupun mancanegara.



- c. penciptaan objek dan daya tarik wisata baru yang mampu memfasilitasi Kabupaten Pidie sebagai wisata MICE yang dapat menjadi penggerak kegiatan pariwisata, kegiatan wisata pada waktu malam dan meningkatkan lama tinggal (LOS).
- d. identifikasi dan pengembangan ODTW yang menjadi konservasi hutan.

#### Pasal 12

Strategi Pengembangan Hotel dan Akomodasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. peningkatan kualitas pelayanan hotel secara profesional kepariwisataan, termasuk peningkatan hotel kelas non bintang dan pondok wisata/home stay.
- b. penambahan jumlah kamar hotel.
- c. penataan ruang kawasan pengembangan Hotel, khususnya kawasan Hotel dan Pondok Wisata/home stay.

#### Pasal 13

Strategi Pengembangan Restoran/Rumah Makan Strategi Pengembangan Hotel dan Akomodasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c meliputi:

- a. pengembangan Rumah Makan/Restoran ditekankan pada pengembangan kualitas.
- b. lokasi Restoran perlu disebar/didistribusikan untuk mengurangi tingkat kepadatan kegiatan yang berakibat pada menurunnya kualitas kenyamanan wisata.
- c. standarisasi pelayanan rumah makan dan penentuan standar pelayanan minimum untuk wisatawan.

#### Pasal 14

Strategi Pengembangan Biro Perjalanan Wisata (BPW) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf d meliputi:

- a. meningkatkan target jumlah wisatawan yang diharapkan dapat dilayani oleh BPW.
- b. meningkatkan jumlah BPW.
- c. meningkatkan kinerja BPW kearah lebih professional, memperluas jaringan bisnis ke berbagai pasar wisata di luar negeri, serta meningkatkan kerjasama professional dengan pelaku industri pariwisata yang lain.
- d. menekan serendah-rendahnya prosentase komisi

#### Pasal 15

Strategis Pengembangan Pasar Wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf e meliputi :

- a. target pariwisata terhadap Pasar wisata budaya Mancanegara yang potensial.

6



- b. target pariwisata terhadap Pasar wisata budaya nusantara/nasional potensial
- c. pasar wisata nasional yang dapat diraih sebagai prioritas selanjutnya adalah wisatawan pelajar dan mahasiswa.
- d. pengembangan limpahan wisatawan asing yang sedang dan sudah mengunjungi Negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

#### Pasal 16

Strategis Pengembangan Pemasaran dan Promosi Wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf f meliputi :

- a. Penyusunan rencana pengembangan promosi dan pemasaran secara terpadu dan terkoordinasi.
- b. Pemasaran dan promosi pariwisata dilaksanakan berdasarkan atas perencanaan yang matang, dan mengacu pada rencana pengembangan yang telah ditetapkan;
- c. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pemasaran dan promosi dilakukan oleh Badan Promosi.

#### Pasal 17

Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf g meliputi:

- a. penyebaran secara sistematis pengertian pariwisata berikut komponen terkait, dan konsep pengembangan pariwisata Kabupaten Pidie kepada masyarakat Kabupaten Pidie secara umum dan masyarakat pariwisata Kabupaten Pidie secara khusus.
- b. menciptakan kesempatan dan menyelenggarakan pendidikan formal dan pendidikan non formal mengenai segala aspek dan komponen pariwisata dari tingkat teknis sampai dengan pemikir/peneliti secara piramida.
- c. menciptakan kesempatan pendidikan diberikan tidak saja kepada masyarakat yang telah melakukan kegiatan bidang pariwisata, tetapi juga masyarakat umum yang tertarik/ditarik dalam kegiatan pariwisata dengan prioritas terhadap mereka yang telah/sedang melakukan kegiatan di bidang pariwisata.
- d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang melakukan kegiatan di bidang pariwisata sesuai kompetensi bidang kerja lebih diutamakan daripada kuantitas, sedangkan jumlah orang yang bekerja secara formal dalam bidang pariwisata diupayakan mengikuti hirarki piramida menurut kemampuan, kualitas, jejaring pengetahuan dan keterampilan.
- e. menciptakan motivasi yang kuat terhadap sumberdaya manusia yang bekerja pada instansi pemerintah yang menangani pariwisata agar “pro-aktif” dalam membina, memimpin, mengkoordinasi, memberi contoh dan memberi kesempatan kepada kalangan industri pariwisata dan masyarakat umum dalam mengembangkan pariwisata.

✓



## Pasal 18

Strategi Pengembangan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf h meliputi:

- a. memperjelas dan mempertegas peran (tugas fungsi dan wewenang) khususnya lembaga pemerintah, beserta pelaksanaan/konsekuensi peran tersebut.
- b. melakukan reorganisasi, khususnya lembaga/instansi pemerintah yang menangani bidang pariwisata dan bidang terkait (seperti perindustrian, perdagangan, jasa, keamanan, lingkungan, kesenian dan budaya, pajak dan pendapatan daerah, transportasi dan telekomunikasi serta pendidikan kepariwisataan).
- c. menciptakan iklim yang kondusif untuk mengembangkan kinerja masing-masing lembaga yang terkait dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata termasuk sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat.
- d. menciptakan “link and match” antara pendidikan kepariwisataan dengan lapangan kerja kepariwisataan secara lebih merata. Tidak terfokus pada sektor tertentu yang diidentifikasi dapat mendatangkan keuntungan lebih besar.
- e. memberi peran yang luas dan memotivasi secara terus-menerus kepada lembaga swasta yang bergerak di bidang kepariwisataan untuk menciptakan dan mengembangkan peluang dalam pengembangan pariwisata seluas-luasnya.
- f. menciptakan peluang dan mendorong masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yang tertarik untuk bergerak di bidang pariwisata, baik yang telah bergerak di bidang pariwisata maupun yang belum, untuk mengembangkan diri berdasar atas tatanan yang telah dirumuskan.

## Pasal 19

Strategi Pengembangan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf (i) meliputi:

- a. angkutan bus wisata direncanakan untuk dapat didorong memanfaatkan lokasi parkir yang disediakan untuk mereka. Jenis bus wisata perlu didorong untuk melakukan segmentasi dalam ukuran kendaraan, sehingga keberadaan bus wisata, terutama yang berukuran besar tidak memberikan gangguan lalu lintas bagi pengguna jalan lain.
- b. fasilitas Pejalan Kaki Sebagai komponen wisata yang sangat penting dalam meningkatkan keberlanjutan objek daya tarik wisata (ODTW), fasilitas pejalan kaki pada OTDW maupun pada lokasi-lokasi lain dengan mendasarkan pada konsep bahwa fasilitas pejalan kaki adalah komponen atraksi, bukan komponen yang membebani pengguna fasilitas.



- c. lokasi dan fasilitas parkir untuk angkutan wisata harus direncanakan dengan melihat kompromi antara jarak pencapaian, serta aktivitas lokasi dan ODTW apabila lokasi parkir terlalu dekat, Oleh karenanya, fasilitas parkir harus terintegrasi dengan perencanaan fasilitas pejalan kaki.
- d. jaringan jalan perlu didesain untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi objek dan daya tarik wisata utama yang akan dikembangkan agar mampu melayani kebutuhan angkutan wisata yang melalui jalan tersebut
- e. sistem informasi transportasi merupakan rencana yang paling utama dalam penyediaan aksesibilitas bagi wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara. Penyediaan informasi dan system perolehan informasi harus direncanakan secara terintegrasi dan terbaharui untuk setiap moda angkutan dan setiap titik transfer utama.

#### BAB IV

### PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

#### Pasal 22

Tujuan dan target pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran Ripparda.

#### Pasal 23

- (1) Pengendalian pembangunan Kepariwisata dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan arahan kebijakan dan strategi pembangunan Kepariwisata.
- (2) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pencegahan tindakan yang tidak sesuai dengan Ripparda; dan
  - b. penanggulangan atas tindakan yang tidak sesuai dengan Ripparda.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. sosialisasi regulasi di bidang pembangunan Kepariwisata Daerah;
  - b. pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan Kepariwisata Daerah; dan
  - c. pemantauan kegiatan pembangunan Kepariwisata.
- (5) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:



- a. penertiban kegiatan yang tidak sesuai dengan Ripparda;
- b. pembinaan dan penerapan sanksi peraturan sesuai perundang-undangan; dan
- c. evaluasi program pembangunan Kepariwisata Daerah.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan pelaksanaan Ripparda bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di Sigli

Pada tanggal 30 Agustus 2023M  
13 Shafar 1445H

Pj. BUPATI PIDIE, 

  
WAHYUDI ADISISWANTO

Diundangkan di Sigli

Pada tanggal 30 Agustus 2023M  
13 Shafar 1445H

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN PIDIE,

  
SAMSUL AZHAR

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2023 NOMOR 08  
NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE, PROVINSI ACEH, (6/53/2023)



PENJELASAN  
ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARAWISATAAN DAERAH  
TAHUN 2023-2037

I. UMUM

Keparawisataan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan perekonomian daerah. Dalam rangka mengarahkan pembangunan keparawisataan di Kabupaten Pidie agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan alam dan budaya serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat diperlukan rencana pembangunan keparawisataan daerah.

dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Keparawisataan, Peraturan Pemerintah 50 tahun 2011 tentang Rencana induk Pembangunan Keparawisataan Nasional, mengamanatkan Pemerintah Kabupaten untuk menyusun Rencana Induk Pembangunan Parawisata Daerah. Untuk melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, perlu disusun Rencana Induk Pembangunan Keparawisataan Daerah atau RIPPARDA.

RIPPARDA secara konkrit akan memberikan visi, arah dan rencana yang jelas bagi pengembangan kawasan-kawasan wisata baik yang sudah berkembang maupun yang potensial untuk dikembangkan. RIPPARDA sekaligus akan memberikan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan terkait, swasta maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata secara terarah tepat sasaran dan berkelanjutan. RIPPARDA menjadi sangat penting karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi keparawisataan dari sisi produk, pasar, SDM, manajemen dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. mengatur peran setiap pemangku kepentingan terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “keislaman” adalah pelaksanaan Ripparda harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “ketertiban dan kepastian hukum” adalah Ripparda harus berdasarkan kepada hukum yang berlaku untuk memberi kepastian hukum bagi semua pihak

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah Ripparda harus memperhatikan karakteristik adat, budaya dan daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah Ripparda diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan

### Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Ripparda yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali

### Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Ripparda melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan

### Huruf g

Cukup jelas.

### Huruf h

Cukup jelas.

### Huruf i

Cukup jelas.

### Huruf j

Cukup jelas.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.



Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN PIDIE NOMOR 106



LAMPIRAN I  
QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
TAHUN 2021-2025.

INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PIDIE

| TAHUN | KONTRI-<br>BUSI THD<br>PDRB | JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN |        |        | LAMA TINGGAL<br>(HARI) |        | PENGELUARAN BERWISATA<br>PER ORANG PER HARI |            | PENYERAPAN<br>TENAGA KERJA |
|-------|-----------------------------|----------------------------|--------|--------|------------------------|--------|---------------------------------------------|------------|----------------------------|
|       |                             | WISNUS                     | WISMAN | JUMLAH | WISNUS                 | WISMAN | WISNUS                                      | WISMAN     |                            |
| 2023  | 1,66%                       | 51947                      | 4      | 51951  | 3                      | 3      | Rp. 400.000,-                               | US\$ 100,- | 865                        |
| 2024  | 1,72%                       | 57142                      | 8      | 57150  | 3                      | 3      | Rp. 500.000,-                               | US\$ 110,- | 986                        |
| 2025  | 1,79%                       | 62856                      | 12     | 62868  | 3                      | 3      | Rp. 600.000,-                               | US\$ 120,- | 1129                       |

Pj. BUPATI PIDIE, 



WAHYUDI ADISISWANTO

LAMPIRAN II  
QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
DAERAH TAHUN 2021-2025.

RINCIAN INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PIDIE

TABEL. A  
ARAH KEBIJAKAN KAWASAN STRATEGIS PEMBANGUNAN PARIWISATA DAN PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA  
DENGAN RENCANA PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS

| NO | KEBIJAKAN STRATEGI                                                                                                          | INDIKASI PROGRAM                                                           | 5 TAHUN PERTAMA<br>(2020-2024) |    |     |    |   | 5 TAHUN KEDUA<br>(2025-2029) |    |     |    |   | PENANGGUNG JAWAB                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|-----|----|---|------------------------------|----|-----|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                             |                                                                            | I                              | II | III | IV | V | I                            | II | III | IV | V |                                                                                                                              |
| 1  | Menyusun Rencana Destinasi Pariwisata Daerah, Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah | 1. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA)       |                                |    |     |    |   |                              |    |     |    |   | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan atau Perencanaan Pembangunan Daerah |
|    |                                                                                                                             | 2. Penyusunan Masterplan Destinasi Pariwisata Daerah                       |                                |    |     |    |   |                              |    |     |    |   |                                                                                                                              |
|    |                                                                                                                             | 3. Penyusunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah                          |                                |    |     |    |   |                              |    |     |    |   |                                                                                                                              |
|    |                                                                                                                             | 4. Penyusunan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah                        |                                |    |     |    |   |                              |    |     |    |   |                                                                                                                              |
| 2  | Menyusun Regulasi Tata Bangunan dan Tata Lingkungan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD dan KPPD                              | 1. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Tata Lingkungan DPD, KSPD dan KPPD |                                |    |     |    |   |                              |    |     |    |   | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan atau Perencanaan Pembangunan Daerah |



TABEL. B

[illegible]

TABEL. C  
Arah Kebijakan Pengendalian Implementasi Pembangunan DPD, KSPD dan KPPD

| NO | KEBIJAKAN STRATEGI                                                            | INDIKASI PROGRAM                                                                                           | 5 TAHUN PERTAMA (2020-2024) |    |     |    |   | 5 TAHUN KEDUA (2025-2029) |    |     |    |   | PENANGGUNG JAWAB                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|-----|----|---|---------------------------|----|-----|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                               |                                                                                                            | I                           | II | III | IV | V | I                         | II | III | IV | V |                                                                                                                              |
| 1  | Meningkatkan Koordinasi antara Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Masyarakat | 1. Sosialisasi dan publikasi peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pidie |                             |    |     |    |   |                           |    |     |    |   | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan atau Perencanaan Pembangunan Daerah |
|    |                                                                               | 2. Pembentukan Forum Koordinasi Teknis Kepariwisata                                                        |                             |    |     |    |   |                           |    |     |    |   | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan atau Perencanaan Pembangunan Daerah |



TABEL. D

[illegible]

TABEL. E

Arah Kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada

| NO | KEBIJAKAN STRATEGI                                                                                                                | INDIKASI PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 TAHUN PERTAMA<br>(2020-2024) |    |     |    |   | 5 TAHUN KEDUA<br>(2025-2029) |    |     |    |   | PENANGGUNG JAWAB                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|-----|----|---|------------------------------|----|-----|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I                              | II | III | IV | V | I                            | II | III | IV | V |                                                                                      |
| 1  | Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya Tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPD, KSPD dan KPPD | <div>1. Penguatan Interpretasi dan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya, keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing daya Tarik wisata alam, budaya dan khusus/buatan yang sedang berkembang</div> <div>2. Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya Tarik wisata terkait di sekitar lokasi dalam konteks regional, maupun nasional dan internasional.</div> <div>3. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya Tarik wisata.</div> |                                |    |     |    |   |                              |    |     |    |   | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan |



TABEL. F

Arah Kebijakan Pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas

| NO | KEBIJAKAN STRATEGI                                           | INDIKASI PROGRAM                                                                                                                                                                                                                  | 5 TAHUN PERTAMA (2020-2024) |    |     |    |   | 5 TAHUN KEDUA (2025-2029) |    |     |    |   | PENANGGUNG JAWAB                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|-----|----|---|---------------------------|----|-----|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   | I                           | II | III | IV | V | I                         | II | III | IV | V |                                                                                      |
| 1  | Mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya Tarik wisata | 1. Pengembangan rentang aktivitas wisata dalam berbagai skala (hard-soft attraction) pada manajemen atraksi daya Tarik wisata alam, budaya dan buatan untuk menarik segmen wisatawan massal (mass market) dan segmen ceruk pasar. |                             |    |     |    |   |                           |    |     |    |   | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan |
|    |                                                              | 2. Pengembangan jenis-jenis atraksi lain dengan berbagai tema di sekitar lokasi daya Tarik wisata utamanya serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan terpadu yang saling melengkapi.                                            |                             |    |     |    |   |                           |    |     |    |   |                                                                                      |

Pj. BUPATI PIDIE, 

  
WAHYUDI ADISISWANTO

# 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 (Pasal 8-9) tentang Kepariwisata mengamanatkan setiap provinsi/kabupaten/kota harus memiliki Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah. Rippar merupakan perencanaan pembangunan sektor pariwisata wilayah provinsi/kabupaten/kota yang di dalamnya mencakup destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan. Ripparda dalam skala provinsi/kabupaten/kota merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Panjang Nasional yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi setiap daerah (kondisi eksisting).

Sektor pariwisata mempunyai arti penting bagi perekonomian daerah, pembangunan wilayah, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Sama dengan daerah lain, Kabupaten Nagan Raya juga sedang berupaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pariwisata untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah (PAD), meningkatkan kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat melalui sektor kepariwisataan.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang secara terus menerus diupayakan pengembangannya agar dapat didayagunakan sebagai salah satu sektor andalan dalam kegiatan perekonomian daerah. Berkembangnya kegiatan pariwisata disuatu daerah akan memberikan pengaruh dan dorongan pembangunan sektor-sektor lainnya, khususnya dalam hal memperluas lapangan kerja dan peluang usaha. Menyadari bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor potensial yang mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah maka kegiatan pembangunan kepariwisataan merupakan salah satu prioritas yang mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pidie.

Sektor pariwisata bagi Kabupaten Pidie memiliki peran penting dimasa depan dalam pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Pidie baik kontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun manfaat berganda dari kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Pidie, khususnya penciptaan lapangan pekerjaan utama dan



lapangan pekerjaan ikutan. Pemikiran terhadap pentingnya sektor pariwisata dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah didasari oleh peran penting sektor pariwisata yang bersifat strategis dalam perekonomian, karena bersifat lintas sektoral yang berimplikasi secara luas terhadap berbagai aspek terkait dengan sektor politik-pemerintahan, ketahanan-keamanan, ekonomi-pembangunan, dan sosial-kebudayaan. Secara empirik-institusional, sektor unggulan dengan produk andalan ini memiliki keterkaitan kebelakang dan keterkaitan ke depan baik dalam tataran lokal, nasional dan berskala global.

Berbagai perkembangan dan peristiwa dewasa ini membawa pengaruh besar pada perkembangan kepariwisataan, khususnya kepariwisataan dalam lingkup Kabupaten Pidie. Banyak potensi dan sekaligus permasalahan serta isu baru yang muncul ke permukaan yang membutuhkan cara penanganan dengan pendekatan yang spesifik. Dinamika tersebut perlu diakomodasi ke dalam produk-produk rencana yang ada di kabupaten agar potensi, permasalahan serta isu-isu baru yang muncul dapat ditampung dan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan serta program tindak. Oleh sebab itu, arah pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pidie sebaiknya adalah pembangunan yang berkelanjutan dengan melibatkan setiap unsur dan sektor yang ada dalam tatanan kabupaten. Setiap unsur dan sektor bahu membahu secara sinergis untuk dapat mengupayakan model pembangunan kepariwisataan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kultur dan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Pidie.

Dalam perkembangannya, pariwisata Kabupaten Pidie juga dihadapkan pada permintaan terhadap produk wisata yang bermutu sebagai akibat dari meningkatnya pengetahuan dan pengalaman wisatawan, serta persaingan dengan destinasi pariwisata lain. Kemampuan untuk memanfaatkan peluang yang ada menjadi tantangan bagi semua pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Pidie sudah seharusnya menjadikan pariwisata sebagai salah satu paradigma baru pembangunan dengan sasaran salah satunya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam wujud pengembangan yang berkelanjutan. Kabupaten Pidie memiliki keragaman potensi wisata serta lokasi wilayah yang strategis yang dapat menjadi basis pengembangan kepariwisataan, sehingga diharapkan 23 Kecamatan yang ada menjadi daerah tujuan wisata unggulan di Kabupaten Pidie.

Gambar 1.1

Prinsip-prinsip Pembangunan Pariwisata



Untuk dapat mengoptimalkan potensi wisata di Kabupaten Pidie, diperlukan perencanaan dan pengembangan pariwisata lebih lanjut secara holistik. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) merupakan langkah dalam menyelaraskan perkembangan kondisi lingkungan terkait keberlanjutan pembangunan pariwisata di Kabupaten Pidie. RIPPARDA merupakan dokumen perencanaan yang posisinya sangat strategis dalam pembangunan pariwisata. Sebagai rencana induk, maka RIPPARDA Pidie ini harus berisikan kebijakan-kebijakan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi dengan Rencana Induk secara horizontal (Rencana Strategis Dinas Teknis lain di Kabupaten Pidie), dan secara vertikal dengan RIPPARDA Provinsi Aceh dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS).

RIPPARDA Pidie merupakan rencana pembangunan kepariwisataan dalam skala kabupaten yang perlu mengacu pada dokumen rencana pariwisata yang berada pada hirarki yang lebih tinggi, yaitu RIPPARDA Provinsi Aceh. Selain itu RIPPARDA juga perlu mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten, maupun rencana pembangunan sektor-sektor lainnya yang terkait.



Dengan memperhatikan hirarki tersebut, pembangunan pariwisata yang dilakukan suatu kabupaten merupakan suatu pembangunan yang terintegrasi baik vertikal maupun horizontal.

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Pidie merupakan suatu rencana yang tidak berdiri sendiri dan lepas dari sistem perencanaan sektor lain tetapi merupakan bagian dari perencanaan pembangunan wilayah secara keseluruhan. RIPPARDA harus dapat berfungsi untuk memadukan perencanaan pariwisata ke dalam kebijakan dan rencana pembangunan kabupaten secara utuh, agar dapat mengakomodasi tuntutan pengembangan kepariwisataan ke arah yang lebih profesional dan disesuaikan dengan kondisi perkembangan lingkungan yang terjadi. Untuk dapat mengoperasionalkan dan merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan kesiapan seluruh unsur pokok pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pidie.

Perencanaan pengembangan pariwisata yang dilakukan merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan sektor pariwisata maupun pembangunan kabupaten. Secara operasional RIPPARDA berfungsi sebagai pedoman dasar pembangunan kepariwisataan bagi pemerintah, sektor bisnis pariwisata, dan masyarakat di masa yang akan datang. Dengan demikian, RIPPARDA Pidie ini tentunya harus mampu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan strategis, kepentingan, dan trend yang sangat dinamis serta mampu mengikuti kemajuan teknologi yang dapat mengakomodir rencana pengembangan pariwisata di masa yang akan datang dalam jangka menengah.

Dalam era otonomi, Kabupaten Pidie diharapkan dapat dikelola secara lebih produktif untuk meningkatkan perekonomian wilayah yang lebih besar. Dengan demikian dibutuhkan pengelolaan yang lebih profesional untuk mendapatkan nilai lebih dari pembangunan pariwisata yang dilakukan, serta memiliki keunggulan kompetitif. Dalam perkembangannya, pariwisata Provinsi Sumatera Selatan juga dihadapkan pada permintaan terhadap produk wisata yang bermutu sebagai akibat dari meningkatnya pengetahuan dan pengalaman wisatawan, serta persaingan dengan destinasi pariwisata lain. Kemampuan untuk memanfaatkan peluang yang ada menjadi tantangan bagi semua pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Adapun beberapa faktor yang mendasari perlunya penyusunan RIPPARDA Kabupaten Pidie ini adalah:

1. Diperlukan suatu rencana yang dapat membantu menangani masalah-masalah kepariwisataan yang timbul serta peluang- peluang pembangunan kepariwisataan pada saat ini dan masa akan datang. Maka diperlukan identifikasi dan pembangunan baru terhadap Daya Tarik Wisata di Kabupaten Pidie.
2. Dituntut adanya suatu kebijakan yang bermuatan lokal dan mudah diterjemahkan ke dalam program-program tindak dan aktivitas usaha oleh masyarakat serta memberikan kepastian arah investasisektor usaha.

Melihat pada kondisi tersebut, maka penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pidie diharapkan dapat menjadi jawaban atas berbagai potensi, permasalahan serta isu-isu strategis terkait pembangunan kepariwisataan dan sekaligus juga sebagai alat dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Pidie sehingga mampu memberikan panduan komprehensif mengenai pembangunan dan pengembangan pariwisata Kabupaten Pidie di masa depan dengan mempertimbangkan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan yang terkait pada pembangunan sektor pariwisata serta keterpaduan lintas sektoral dalam usaha pengembangan kepariwisataan. Pada akhirnya, melalui penyusunan RIPPARDA diharapkan pembangunan dan pengelolaan kepariwisataan Kabupaten Pidie akan dapat lebih terarah yang sesuai dengan prinsip pengembangan yang berorientasi pada perolehan ekonomi yang tinggi, pengembangan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat lokal, serta pengembangan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

## **1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran Penyusunan Ripparda Kabupaten Pidie**

### **1.2.1 Maksud**

Maksud penyusunan Ripparda Kabupaten Pidie untuk mewujudkan rencana pembangunan kepariwisataan yang berkualitas, serasi dan optimal, sesuai dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Pidie dan Provinsi Aceh terkait dengan Pembangunan Kepariwisata. Maksud pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pidie telah sesuai dengan arahan substansi dan kepentingan pembangunan pariwisata di Kabupaten Pidie dengan landasan untuk menjadi pedoman dalam setiap aspeknya terkait sektor kepariwisataan di Kabupaten Pidie.



### 1.2.2 Tujuan

Tujuan dari Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Pidie adalah mewujudkan ruang wilayah kepariwisataan Kabupaten Pidie dengan memenuhi kebutuhan pembangunan di bidang pariwisata dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya sinkronisasi perencanaan di semua sektor pendukung pembangunan pariwisata serta pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pidie.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk menghasilkan suatu dokumen perencanaan kepariwisataan yang menjadi pedoman utama bagi *stakeholders* kepariwisataan Kabupaten Pidie, yang mengakomodasi isu-isu strategis dan perkembangan kepariwisataan terbaru secara terintegrasi dan sinergis.

### 1.2.3 Sasaran

Sasaran yang perlu di capai dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pidie diantaranya sebagai berikut:

- a. Terkendalinya pembangunan pariwisata di wilayah Kabupaten Pidie baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta dan masyarakat.
- b. Terciptanya keserasian antara kawasan-kawasan/zonasi pemanfaatan/budidaya, sesuai dengan peruntukannya.
- c. Tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program pembangunan di wilayah dalam upaya pengoptimalan sumber daya pariwisata.
- d. Terinventarisnya dayatarik wisata actual dan potensial yang berada di Kabupaten Pidie.
- e. Tersusunnya konsep pembangunan Pariwisata Kabupaten Pidie (Visi dan Misi), yang dilandasi pendekatan perencanaan dan isu- isu strategis yang terkait dengan pembangunan pariwisata Kabupaten Pidie, serta falsafah pembangunan pariwisata nasional yang berwawasan lingkungan dan budaya.
- f. Teridentifikasinya kawasan wisata prioritas unggulan Kabupaten Pidie yang sesuai dengan criteria yang ditetapkan.
- g. Tersusunnya kebijakan dan program pembangunan pariwisata Kabupaten Pidie.

### **1.3 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);



8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);

## 1.4 Ruang Lingkup

RIPPARDA Kabupaten Pidie disusun berdasarkan perkiraan kecenderungan dan arahan perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pariwisata di masa depan sesuai dengan jangka waktu perencanaannya.

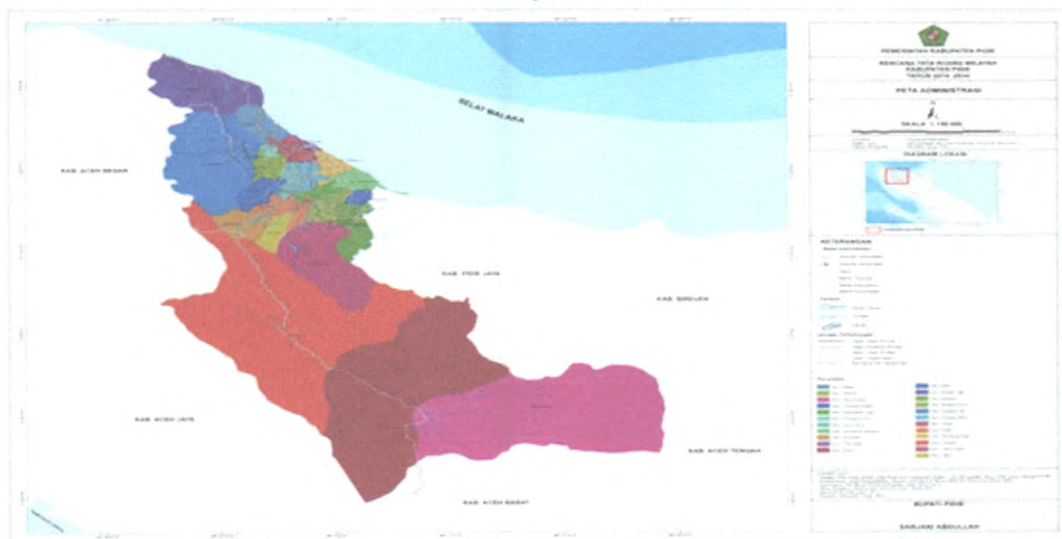
Penyusunan RIPPARDPA Kabupaten Pidie dilakukan dengan berazaskan kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian dan kesinambungan dalam lingkup Kabupaten dan kaitannya dengan Provinsi dan Kabupaten sekitarnya.

### 1.4.1 Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam kegiatan penyusunan RIPPARDA Pidie meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pidie (23 Kecamatan), dengan semua objek wisata aktual yang terdapat di Kabupaten Pidie baik yang sudah dikelola, berkembang dan belum berkembang maupun daya tarik wisata potensial yang belum dikelola sampai saat ini.

Gambar 1.2

Peta Kabupaten Pidie



#### 1.4.2 Lingkup Materi

Secara garis besar materi penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pidie ini adalah sebagai berikut:

1. Destinasi pariwisata daerah.
2. Daya tarik dan sumber daya wisata.
3. Fasilitas pariwisata.
4. Fasilitas umum pendukung pariwisata.
5. Aksesibilitas pendukung pariwisata.
6. Prasarana umum pendukung wisata.
7. Sumber daya manusia pariwisata.
8. Pemasaran pariwisata daerah.
9. Jumlah dan perkembangan pasar pariwisata.
10. Karakteristik pasar wisatawan.
11. Upaya pemasaran yang dilakukan pemerintah kabupaten.

Adapun penyusunan RIPPARDA Kabupaten Pidie perlu didukung oleh keterpaduan antara dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi, yang juga merupakan pilar dari pariwisata berkelanjutan. Dengan demikian, keterpaduan diantaranya menjadi landasan bagi kebijakan-kebijakan pengembangan kepariwisataan, dalam hal ini RIPPARDA Kabupaten Pidie. Hal ini dilakukan untuk:

- a. Terjaminnya keberlanjutan sumber daya wisata dan sumber daya pendukung pembangunan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pidie,
- b. Terintegrasinya pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pidie dengan lingkungan alam, sosial dan budaya, serta menjamin perubahan yang terjadi akibat pembangunan pariwisata sehingga dapat diterima/ditoleransi oleh lingkungan.
- c. Memadukan perencanaan dan pengembangan Kabupaten Pidie yang didukung oleh pemerintah dan *stakeholders* pariwisata Kabupaten Pidie.



Karena sifatnya yang ‘menerus’, maka pariwisata yang berkelanjutan mencakup pelestarian keanekaragaman hayati; minimalisasi dampak negative terhadap ekologi, budaya dan sosial; pemanfaatan konservasi dan komunitas lokal bagi pengembangan pariwisata; maupun peningkatan perekonomian masyarakat lokal.

#### **1.4.3 Lingkup Kegiatan**

Dalam menyusun Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Pidie maka kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengumpulan data dan informasi yang terkait dengan aspek-aspek pengembangan kepariwisataan Kabupaten Pidie.
- b. Melakukan kajian atas acuan pembangunan pariwisata nasional (UU Kepariwisata, RIPPARNAS, RIPPARDA Provinsi Aceh, RTRW Kabupaten dan lain-lain), untuk kemudian dikaji kemungkinan implementasinya di Kabupaten Pidie.
- c. Melakukan kajian atas kondisi, potensi, dan permasalahan pengembangan kepariwisataan Kabupaten Pidie yang menyangkut aspek industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan kepariwisataan serta pemberdayaan masyarakat. Kajian menyangkut pola dan kecenderungan yang terkait dengan pola pergerakan/perjalanan wisatawan, pemasaran wisata, kecenderungan perkembangan daya tarik wisata, kompetisi dalam pemasaran produk wisata, ketersediaan sarana/fasilitas, hambatan dan tanggapan, serta kebijakan yang terkait dengan kunjungan wisata, regulasi dan lain-lain yang terkait dengan promosi serta perjalanan wisata.
- d. Merumuskan isu-isu strategis pengembangan kepariwisataan Kabupaten Pidie;
- e. Merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pengembangan kepariwisataan Kabupaten Pidie;

#### **1.5 Program kerja**

Program kerja penyusunan Ripparda Kabupaten Pidie sebagai berikut.

- a) Tahap persiapan, yaitu kegiatan pencarian/penelusuran literatur melalui media online (internet) yang terkait dengan kepariwisataan Kabupaten Pidie, penyusunan instrumen, rapat-rapat tim ahli, dan asisten dengan agenda persiapan pengumpulan data, dan substansi laporan;
- b) Melakukan koordinasi kegiatan dengan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pidie terkait dengan administrasi dan substansi pekerjaan;

- c) Pengumpulan data primer melalui survei lapangan di Kabupaten Pidie; serta pengumpulan data sekunder melalui publikasi statistik dari BPS, laporan-laporan, qanun, jurnal, buku, dan lainnya;
- d) Menyusun Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir Ripparda, Laporan Eksekutif, Laporan Naskah Akademik, dan Rancangan Qanun;
- e) Presentasi Laporan Pendahuluan dan Draft Laporan Akhir (Konsultasi Publik).

## **1.6 Keluaran**

Substansi Ripparkab Kabupaten Nagan Raya mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu:

- f) Tinjauan Kebijakan Pariwisata (Nasional, Provinsi, dan Kabupaten);
- g) Kondisi Wilayah Kabupaten Nagan Raya Dalam Mendukung Pariwisata;
- h) Kabupaten Nagan Raya Sebagai Destinasi Pariwisata (mencakup profil destinasi pariwisata, industri pariwisata/UMKM, pemasaran pariwisata (pasar wisatawan, pola kunjungan dan jumlah wisatawan) secara umum), dan kelembagaan-sumberdaya manusia pariwisata (pemerintah, swasta dan kelompok/masyarakat/pengelola);
- i) Industri Pariwisata;
- j) Kelembagaan Kepariwisata dan Sumber Daya Manusia;
- k) Pasar dan Upaya Pemasaran Pariwisata;
- l) Prinsip-Prinsip dan Konsep Pembangunan Kepariwisata (Tantangan & Isu Strategis), Prinsip, Konsep, dan Visi-Misi Pembangunan Pariwisata;
- m) Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kepariwisata;
- n) Rencana Pengembangan Perwilayahan Pariwisata;
- o) Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Nagan Raya.

## **1.7 Metodologi dan Pendekatan**

Metodologi adalah model yang mengandung prinsip-prinsip teoritis dan kerangka yang memberikan petunjuk bagaimana penelitian dilakukan dalam suatu konteks paradigma tertentu, dalam hal ini, penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata



Kabupaten Pidie tetap mengacu kepada prinsip-prinsip pelaksanaan kajian. Metodologi ditentukan bukan oleh model penelitian, tetapi oleh prinsip-prinsip yang berkaitan dengan paradigma yang diambil. Mengacu pada pemahaman tersebut, uraian mengenai metodologi yang digunakan dalam penilaian kelayakan terdiri dari dua hal pokok, yaitu Tahap an penyusunan dan metoda yang digunakan pada Tahap -Tahap pekerjaan tersebut.

#### **1.7.1 Kerangka Pendekatan**

Metode penelitian yang digunakan pada kegiatan Penyusunan RIPPARDA Kabupaten Pidie adalah Kajian pustaka yang memiliki pengertian yaitu kajian terhadap jabaran teori, konsep, atau hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yang dipermasalahkan. Kajian pustaka mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan utama dan tujuan lain. Tujuan utamanya yaitu membantu peneliti dalam memecahkan masalah penelitiannya, sedangkan tujuan lainnya adalah memperoleh gambaran tentang kedudukan penelitiannya terhadap penelitian-penelitian lain (Sumaryanto, 2008).

Sementara itu, fungsi kajian pustaka adalah:

- a. Mengetahui sejarah masalah penelitian. Sejarah penelitian meliputi aspek-aspek masalah, cara memecahkan masalah, hasil penelitian, dan hambatan dalam penelitian;
- b. Membantu pemilihan prosedur. Memilih prosedur berdasarkan pengalaman penelilitain, dengan penyesuaian terhadap masalah penelitiannya;
- c. Memahami latar belakang teoretis masalah penelitian. Memperoleh gambaran tentang kedudukan penelitian yang dilakukannya terhadap *scope* pengetahuan yang lebih luas; Mengetahui manfaat penelitian sebelumnya. Melihat manfaat penelitian sebelumnya dan mengingat teori yang relevan, memperluas wawasan tentang manfaat penelitian yang dilakukan;
- d. Menghindari duplikasi. Membantu penentuan mana yang duplikasi, dan mana yang sebaiknya tidak duplikasi; dan
- e. Memberikan pembenaran pemilihan masalah penelitian. Kajian tentang manfaat, keterbatasan, k emungkinan hasil, memberikan pembenaran pemilihan masalah yang diteliti.

Data yang diperoleh sebagian besar adalah data yang sifatnya kualitatif disajikan secara deskriptif, tabulasi, maupun bentuk-bentuk pemodelan untuk lebih

menjelaskan informasi yang ada. Deskripsi data yang memberikan informasi data tersebut dan tidak untuk menguji hipotesis dan kemudian menarik informasi yang digeneralisasikan untuk populasi. Penyajian tabulasi yaitu penyajian data dalam bentuk tabel, sedangkan bentuk-bentuk permodelan menyajikan data berbentuk gambar atau grafik.

### 1.7.2 Tahap an Pelaksanaan Kegiatan

Secara garis besar, pekerjaan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pidie, yaitu:

- 1) Tahap persiapan,
- 2) Tahap pengumpulandankompilasi data,
- 3) Tahap identifikasi dan analisis data,
- 4) Tahap pengembangan konsep dan strategi, serta
- 5) Tahap pengembangan program tindak.

#### 1) Tahap Persiapan

Tahap an ini merupakan Tahap an awal dari studi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada Tahap ini pada dasarnya dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran berikut:

- a. Tersepakatinya tujuan dan sasaran, keluaran, lingkup pekerjaan, metodologi, dan rencana kerja.
- b. Berkembangnya substansi pekerjaan dan gagasan/ide-ide yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pekerjaan, mencakup teori yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan, termasuk komponen-komponen di dalamnya, serta metoda dan analisis yang mendukung pelaksanaan kajian.
- c. Teridentifikasinya kebutuhan data dan alat analisisnya.
- d. Terumuskannya rancangan survey dan format kompilasi data.

Untuk mencapai sasaran tersebut, kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah:

- a. Melakukan koordinasi dengan tim pelaksana kajian untuk berbagi tugas dan tanggungjawab serta menyepakati jadwal penugasan personil, sekaligus melakukan diskusi untuk menyamakan persepsi tentang tujuan dan sasaran, keluaran dan lingkup pekerjaan, metodologi, serta rencana



kerja pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pidie.

- b. Melakukan kajian terhadap teori-teori terkait kepariwisataan, perencanaan dan pengembangannya, pembangunan destinasi wisata, penataan kawasan, serta metoda dan alat analisis terkait lingkup studi, untuk memperkaya gagasan/ide-ide selama proses pengkajian. Pengayaan substansi pekerjaan juga dilakukan dengan mengkaji hasil-hasil penelitian yang terkait dengan potensi sector pariwisata dalam pembangunan daerah.
- c. Melakukan inventarisasi terhadap data-data yang dibutuhkan dalam melakukan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pidie, juga terhadap alat analisis yang akan digunakan.
- d. Merancang rencana survei, termasuk di dalamnya metoda survei, teknik sampling yang akan digunakan, dan juga pengurusan perijinan. Pada kegiatan ini juga akan dibuat format kompilasi data yang akan dikembangkan untuk mendukung kegiatan analisis data.

Metode yang digunakan pada Tahap ini adalah kajian pustaka untuk memperkaya ide dan gagasan, *stakeholder mapping* untuk memetakan pihak-pihak yang terkait dengan substansi pekerjaan, dan *need assessment* dalam menentukan kebutuhan data dan kompilasi/ pengolahannya untuk mencapai tujuan dan sasaran kajian.

## 2) Tahap Pengumpulan dan Kompilasi Data

Pada Tahap ini dilakukan pengumpulan data yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang terkait dengan komponen-komponen kepariwisataan. Sasaran yang hendak dicapai adalah:

- a. Tersedianya data dan informasi yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kajian.
- b. Tersedianya hasil kompilasi data untuk mendukung proses analisis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran kajian.

Sesuai dengan sasarannya, dua kegiatan pokok yang dilakukan pada

Tahap ini pengumpulan data dan kompilasinya. Data yang dikumpulkan pada Tahap ini terdiri dari data sekunder maupun data primer. Data sekunder diperoleh melalui survei ke beberapa instansi sumber data, seperti BAPPEDA Kabupaten, Badan Pusat Statistik Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan lain-lain. Data primer diperoleh melalui survei primer dengan melakukan observasi terhadap daya tarik wisata, fasilitas penunjang wisata, sarana dan prasarana transportasi, dan infrastruktur di lokasi-lokasi tertentu.

### 3) Tahap anIdentifikasi dan Analisis Data

Tahap berikutnya adalah Tahap identifikasi dan analisis data. Pada Tahap ini sasaran yang hendak dicapai adalah:

- a. Teridentifikasinya potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Pidie;
- b. Teridentifikasinya posisi kepariwisataan Kabupaten Pidie, kawasan pariwisata yang potensial untuk dikembangkan, kelengkapan dan kelayakan data yang mendukung pembangunan kepariwisataan.
- c. Terumuskan kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, terdapat tiga kegiatan pokok yang dilakukan, yaitu:

Kegiatan identifikasi, dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. Potensi produk pariwisata;
- b. Potensi pasar pariwisata;
- c. Kebijakan-kebijakan yang mendukung pembangunan pariwisata Kabupaten Pidie;
- d. Dukungan Masyarakat
- e. Jenis dan sifat data yang tersedia.

Kegiatan analisis, dilakukan untuk menganalisis:

- a. Potensi Produk Pariwisata Kabupaten Pidie;
- b. *Positioning* pariwisata Kabupaten Pidie berdasarkan potensi kontribusinya terhadap Pembangunan Daerah pada masa yang akan datang (produk dan pasar pariwisata);dan
- c. Kebijakan-kebijakan yang ada untuk mendorong peningkatan Pembangunan Kepariwisata.



Kegiatan perumusan kesimpulan, dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang:

- a. Potensi produk pariwisata yang diunggulkan di Kabupaten Pidie;
- b. Segmen pasar pariwisata yang potensial dikembangkan di masa yang akan datang;
- c. Kawasan pariwisata prioritas yang akan dikembangkan;
- d. Kelembagaan Pariwisata di Kabupaten Pidie;
- e. Industri Pariwisata di Kabupaten Pidie; dan
- f. Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pidie; dari Aspek Destinasi Pariwisata, Kelembagaan Pariwisata, Pasar dan Pemasaran Pariwisata dan Industri Pariwisata.

Pada Tahap ini metoda yang digunakan adalah analisis kluster, analisis korelasi, analisis deskriptif, *content analysis*, penilaian untuk mengidentifikasi kawasan- kawasan pariwisata yang potensial untuk dikembangkan.

#### 4) Tahap Pengembangan Konsep dan Strategi

Tahap berikutnya adalah Tahap pengembangan konsep dan strategi. Pada Tahap ini terdapat dua sasaran yang akan dicapai, yaitu:

- a. Terumuskannya konsep dan strategi pembangunan pariwisata Kabupaten Pidie dengan penjabaran; dan
- b. Terumuskannya dan Tergambarkannya Kawasan Strategis Pembangunan Pariwisata Daerah (KSPD) Kabupaten Pidie.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai kedua sasaran pada Tahap ini adalah:

Sasaran 1: Terumuskannya konsep dan strategi pembangunan pariwisata Kabupaten Pidie.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah:

- a. Visi Pembangunan Pariwisata Kabupaten dalam kurun waktu 10 Tahun;
- b. Misi Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pidie;

- c. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pidie;
- d. Strategi Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pidie;
- e. Merumuskan strategi investasi pariwisata; dan
- f. Merumuskan strategi pelibatan masyarakat dalam kepariwisataan.

Sasaran 2: Terumuskannya dan Tergambarkannya Kawasan Strategis Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pidie.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah:

- a. Merumuskan prinsip-prinsip perancangan;
- b. Merumuskan tema perancangan kawasan; dan
- c. Merumuskan standar-standar perancangan kawasan.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran Penyusunan Ripparda Kabupaten Pidie
  - 1.2.1 Maksud
  - 1.2.2 Tujuan
  - 1.2.3 Sasaran
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Ruang Lingkup
  - 1.4.1 Lingkup Wilayah
  - 1.4.2 Lingkup Materi
  - 1.4.3 Lingkup Kegiatan
- 1.5 Program Kerja
- 1.6 Keluaran
- 1.7 Metodologi dan Pendekatan
  - 1.7.1 Kerangka Pendekatan
  - 1.7.2 Tahap an Pelaksanaan Kegiatan
- 1.8 Sistematika Penulisan

### **BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN**

- 2.1 Tinjauan Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Nasional
- 2.2 Tinjauan Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Pidie

### **BAB 3 KONDISI WILAYAH PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN**

- 3.1 Kondisi Fisik



- 3.2 Sejarah
- 3.3 Kekayaan Ekologis

#### **BAB 4 DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN PIDIE**

- 4.1 Daya Tarik Wisata Kabupaten Pidie
- 4.2 Penduduk Sebagai Potensi Sumber Daya Manusia Pariwisata

#### **BAB 5 INDUSTRI PARIWISATA**

- 5.1 Pencermatan Industri Kepariwisata
- 5.2 Analisis TOWS

#### **BAB 6 PASAR PARIWISATA DAN UPAYA PEMASARAN**

- 6.1 Pasar Pariwisata
- 6.2 Pemasaran Wisata

#### **BAB 7 KELEMBAGAAN PARIWISATA**

- 7.1 Pencermatan Kelembagaan

#### **BAB 8 PRINSIP DAN KONSEP PEMBANGUNAN PARIWISATA**

- 8.1 Isu Strategis Pembangunan Pariwisata
- 8.2 Prinsip Pembangunan Pariwisata
- 8.3 Konsep Pembangunan Pariwisata
- 8.4 Visi Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pidie
- 8.5 Misi Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pidie
- 8.6 Tujuan Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pidie

#### **BAB 9 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA**

- 9.1 Kebijakan Pembangunan Pariwisata
- 9.2 Strategi Pembangunan Pariwisata

#### **BAB 10 RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA**

- 10.1 Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata
- 10.2 Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata

#### **BAB 11 PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN**

# 2 TINJAUAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

## 2.1 Tinjauan Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Nasional

RIPARNAS memuat beberapa hal strategis seperti penetapan perwilayahan pengembangan pariwisata yang tercermin dalam pembentukan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN).

### 2.1.1 Garis Besar RIPPARNAS

Kebijakan Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional secara garis besar adalah:

1. Pembangunan kepariwisataan didasarkan kepada suatu sistem perencanaan yang terpadu.

Yang dimaksud dengan sistem perencanaan terpadu di sini adalah perencanaan yang terintegrasi antara berbagai sektor pembangunan, misalnya, pembangunan pariwisata harus terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur, pembangunan sektor UKM dan ekonomi mikro, pembangunan pendidikan, dan seterusnya.

2. Penyelarasan produk dengan pasar.

Pembangunan pariwisata juga harus menyesuaikan antara produk yang dimiliki dengan kebutuhan pasar. Mengingat biaya yang dibutuhkan sangat besar apabila kita menciptakan produk pariwisata yang benar-benar baru, maka menggali keunggulan lokal, mengembangkan keunggulan lokal tersebut dan mencapai standard internasional serta sesuai dengan selera pasar adalah jauh lebih efektif dan efisien. Dalam kasus pengembangan Pariwisata Aceh, RIPARNAS mengamanatkan 5 (lima) Kawasan Pembangunan Pariwisata Nasional (KPPN) yang menjadi lokomotif destinasi wisata unggulan di Aceh, masing-masing Banda Aceh, Pulau Weh, Pulau Simelue, termasuk P. Banyak, Leuser dan Takengon.



3. Pembangunan kepariwisataan diarahkan kepada pengembangan wilayah. Pembangunan kepariwisataan harus bisa menjadi stimulant pengembangan wilayah, Sehingga terjadi pemerataan pembangunan di berbagai wilayah di Provinsi Aceh. 5 (lima) KPPN yang disebutkan pada poin 2 diatas adalah lokomotif pembangunan ekonomi, yang diharapkan akan menarik gerbong-gerbong yang ada disekitar wilayahnya, sehingga terjadi pembangunan ekonomi yang lebih merata.
4. Pemerintah daerah sebagai pengarah harus jelas dan konsisten tetapi fleksibel. Motor dari pembangunan pariwisata daerah adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah berperan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, pemerintah daerah juga yang memberlakukan kebijakan daerah serta mengawasi jalannya kebijakan tersebut. Oleh karenanya, penyusunan kebijakan daerah harus berjalan secara konsisten namun tetap adaptif dan dan fleksibel terhadap perubahan yang sangat cepat yang terjadi, baik perubahan politik dan ekonomi dunia, perubahan teknologi, perubahan perilaku konsumen, serta perubahan yang terus terjadi di dunia usaha.
5. Pengembangan tujuan-tujuan wisata di luar sentra-sentra yang ada. Pembangunan pariwisata harus bisa menggali dan mengembangkan potensi yang ada di luar dari potensi yang sudah dikenal selama ini. Tujuannya adalah agar terjadi pemerataan pembangunan di daerah-daerah di luar sentra wisata yang ada. Dari sisi pengembangan produk, pengembangan daerah baru di luar sentra pariwisata yang ada dapat memperkaya variasi dan keunikan produk wisata yang dijual, sehingga dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang selalu berusaha mencari dan mengeksplere tujuan wisata adan produk-produk wisata baru. Prioritas pertama diarahkan pada pengembangan 5 (lima) KPPN yang telah ada, setelah itu baru merencanakan pembangunan pariwisata diluar 5 (lima) KPPN tersebut.

6. Penyiapan dan partisipasi lokal sedini mungkin.

Pembangunan pariwisata harus melibatkan masyarakat lokal sejak awal. Partisipasi masyarakat sejak dini sangat penting untuk membangun rasa memiliki dalam diri masyarakat, sehingga mereka akan secara aktif turut berperan dalam menjaga dan mengembangkan destinasi wisata di wilayahnya.

7. Penyelenggaraan kepariwisataan tanpa mengganggu norma-norma masyarakat. Kegiatan kepariwisataan tidak sepatutnya mengenyampingkan budaya lokal, termasuk norma-norma yang dianut oleh masyarakat setempat. Kegiatan kepariwisataan yang sama sekali meninggalkan budaya setempat dapat menimbulkan resistensi terhadap wisatawan oleh masyarakat setempat. Lebih jauh malah dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan sehingga tujuan pembangunan kepariwisataan itu sendiri tidak dapat dicapai. Justru norma dan adat setempat harus menjadi salah satu *point of selling* dari destinasi wisata yang dipromosikan.

8. Peningkatan status dan pelembagaan pendidikan kepariwisataan. Pembangunan pariwisata daerah juga harus disertai dengan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata dan sektor jasa lainnya. Dengan demikian maka pembangunan pariwisata akan dapat memberi lapangan kerja bagi tenaga kerja produktif yang berasal dari masyarakat lokal.

9. Pariwisata nusantara sebagai tulang punggung pariwisata Indonesia.

Kegiatan wisata nusantara harus lebih digalakkan di kalangan wisatawan dalam negeri. Wisatawan nusantara merupakan potensi yang sangat besar yang harus digarap dengan sungguh-sungguh baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta pelaku usaha pariwisata.

Perlu kita ingat bahwa potensi wisatawan dalam negeri kita sangatlah besar. Lihatlah berapa besar pendapatan negara tetangga Malaysia yang dikontribusikan oleh wisatawan yang berasal dari Indonesia. Demikian juga negara lain seperti Singapura dan Thailand. Jika negara-negara tetangga kita saja sedemikian seriusnya dalam menggarap pasar wisatawan Indonesia, tentu



artinya kontribusi wisatawan Indonesia tersebut terhadap jumlah kunjungan wisata total maupun dalam hal penerimaan negara tetangga dari wisatawan Indonesia, maka jelaslah bahwa wisatawan nusantara harus menjadi tulang punggung bagi pengembangan pariwisata Indonesia pada umumnya, dan pariwisata Aceh pada khususnya.

Contoh konkrit adalah pasar *Diving*. Destinasi *Diving* yang ada di Bali dan Manado mulai didatangi oleh penyelam-penyelam nasional yang datang dari Jakarta dan Bandung. Mereka adalah eksekutif muda, yang mulai mapan. Punya waktu luang lebih, karena belum berkeluarga, dan suka pada tantangan baru. Pengelola *diving place* di kedua daerah tersebut mulai menciptakan paket-paket *diving* dan *diving course* dengan harga lebih murah yang ditawarkan kepada turis asing. Responnya luar biasa.

10. Peningkatan aksesibilitas, menunjang mobilitas domestik.

Untuk menunjang pergerakan orang dan barang di dalam negeri khususnya wisatawan nusantara, maka pemerintah perlu mendorong agar masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia agar mau melakukan perjalanan ke luar daerahnya, melakukan perjalanan yang menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia. Dengan adanya *cross visit* tersebut maka sektor pariwisata di setiap daerah diharapkan akan menggeliat, dana masyarakat tidak keluar dari wilayah Indonesia, serta terjadi proses pembelajaran dan saling pertukaran antar budaya yang kelak akan dapat mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia.

11. Pembangunan pariwisata diarahkan pada pengembangan tujuan wisata (destinasi).

Strategi pembangunan pariwisata Indonesia selanjutnya akan dititik beratkan pada pembangunan destinasi sehingga variasi produk wisata kelak dapat dikembangkan berdasarkan master plan pengembangan destinasi. Dalam hal 5 (lima) KPPN di Aceh, harus dibuat *positioning* yang jelas, serta tema yang jelas, sehingga memudahkan bagi siapa saja yang nantinya merancang program komunikasi pemasarannya.

12. Penerapan otonomi daerah secara nyata.

Pembangunan pariwisata daerah harus menerapkan pola otonomi daerah di mana pemerintah daerah adalah penentu kebijakan sekaligus pelaksana dan pengawas dari kebijakan daerah yang dilaksanakannya. Lebih lanjut, maka seluruh pendapatan yang diterima dari sektor pariwisata akan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) daerah tersebut.

13. Alokasi negara bagi sektor pariwisata yang sesuai dengan tugas dan peranan.

Negara melalui APBN dapat berperan penting terutama dalam menentukan perimbangan anggaran pusat dan daerah yang ditujukan untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur daerah yang akan berdampak langsung terhadap sektor transportasi, akomodasi dan konsumsi di suatu daerah.

### **2.1.2 Perwilayahan Pembangunan Pariwisata Nasional**

RIPARNAS membagi wilayah pariwisata Indonesia menjadi 50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN).

a. Destinasi Pariwisata Nasional (DPN)

Daftar 50 DPN dapat dilihat pada bagian berikut:

1. DPN Bali – Nusa Lembongan dan sekitarnya
2. DPN Komodo – Ruteng dan sekitarnya
3. DPN Borobudur – Yogya dan sekitarnya
4. DPN Lombok – Gili Tremana dan sekitarnya
5. DPN Batam – Bintan dan sekitarnya
6. DPN Medan – Toba dan sekitarnya
7. DPN Padang – Bukit Tinggi dan sekitarnya
8. DPN Bromo – Malang dan sekitarnya
9. DPN Manado – Bunaken dan sekitarnya
10. DPN Sorong – Raja Ampat dan sekitarnya
11. DPN Pangandaran – Nusa Kambangan dan sekitarnya



12. DPN Toraja – Lorelindu dan sekitarnya
13. DPN Kelimutu – Maumere dan sekitarnya
14. DPN Jakarta – Kepulauan Seribu dan sekitarnya
15. DPN Palembang – Babel dan sekitarnya
16. DPN Palangkaraya – Tanjung Putting dan sekitarnya
17. DPN Makassar – Takabonerate dan sekitarnya
18. DPN Mentawai – Siberut dan sekitarnya
19. DPN Nias – Simeulue dan sekitarnya
20. DPN Kendari – Wakatobi dan sekitarnya
21. DPN Dawan – Kayan Mentarang dan sekitarnya
22. DPN Sentarum – Betung Kerihun dan sekitarnya
23. DPN Ambon – Bandaneira dan sekitarnya
24. DPN Banda Aceh – Weh dan sekitarnya
25. DPN Krakatau – Ujung Kulon dan sekitarnya
26. DPN Togean – Gorontalo dan sekitarnya
27. DPN Alor – Lembata dan sekitarnya
28. DPN Semarang – Karimunjawa dan sekitarnya
29. DPN Kupang – Rotendao dan sekitarnya
30. DPN Sumba – Waikabubak dan sekitarnya
31. DPN Moyo – Tambora dan sekitarnya
32. DPN Bandung – Ciwidey dan sekitarnya
33. DPN Solo – Sangiran dan sekitarnya
34. DPN Halmahera – Morotai dan sekitarnya
35. DPN Sentani – Wamena dan sekitarnya
36. DPN Jambi – Kerinci Seblat dan sekitarnya
37. DPN Bogor – Halimun dan sekitarnya
38. DPN Surabaya – Madura dan sekitarnya
39. DPN Pekanbaru – Rupat dan sekitarnya
40. DPN Timika – Lorentz dan sekitarnya
41. DPN Bengkulu – Enggano dan sekitarnya
42. DPN Natuna – Anambas dan sekitarnya
43. DPN Banjarmasin – Martapura dan sekitarnya

44. DPN Tenggarong – Balikpapan dan sekitarnya
45. DPN Biak – Numfor dan sekitarnya
46. DPN Ijen – Alaspurwo dan sekitarnya
47. DPN Pontianak – Singkawang dan sekitarnya
48. DPN Long Bagun – Melak dan sekitarnya
49. DPN Manokwari – Fak-Fak dan sekitarnya
50. DPN Merauke – Wazur dan sekitarnya

b. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)

Daftar 88 KSPN seperti yang tercantum dalam RIPARNAS adalah sebagai berikut:

|                                                |                                                 |                                                  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. KSPN. Kintamani– Danau Batur dan sekitarnya | 12. KSPN. Toraja dan sekitarnya                 | 23. KSPN. Singkarak dan sekitarnya               |
| 2. KSPN. Komodo dan sekitarnya                 | 13. KSPN. Ende–Kelimutu dan sekitarnya          | 24. KSPN. Sentarum dan sekitarnya                |
| 3. KSPN. Borobudur dan sekitarnya              | 14. KSPN. Kota Tua– Sunda Kelapa dan sekitarnya | 25. KSPN. Bandaneira dan sekitarnya              |
| 4. KSPN. Rinjani dan sekitarnya                | 15. KSPN. Tanjung Puting dan sekitarnya         | 26. KSPN. Weh dan sekitarnya                     |
| 5. KSPN. Nongsa - Pulau Abang dan sekitarnya   | 16. KSPN. Teluk Dalam- Nias dan sekitarnya      | 27. KSPN. Kep Seribu dan sekitarnya              |
| 6. KSPN. Toba dan sekitarnya                   | 17. KSPN. Dieng dan sekitarnya                  | 28. KSPN. Ujung Kulon- Tj. Lesung dan sekitarnya |
| 7. KSPN. Bukittinggi dan sekitarnya            | 18. KSPN. Wakatobi dan sekitarnya               | 29. KSPN. Togean–Tomini dan sekitarnya           |
| 8. KSPN. Bromo– Tengger– Semeru dan sekitarnya | 19. KSPN. Pantai Selatan Lombok dan sekitar     | 30. KSPN. Merapi– Merbabu dan sekitarnya         |
| 9. KSPN. Bunaken dan sekitarnya                | 20. KSPN. Siberut dan sekitarnya                | 31. KSPN. Karimunjawa dan sekitarnya             |
| 10. KSPN. Raja Ampat dan sekitarnya            | 21. KSPN. Derawan– Sangalaki dan sekitarnya     | 32. KSPN. Tambora dan sekitarnya                 |
| 11. KSPN. Pangandaran dan sekitarnya           | 22. KSPN. Bitung–Lembeh dan sekitarnya          | 33. KSPN. Tangkahan dan sekitarnya               |



|                                                       |                                                   |                                                        |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 34. KSPN. Kerinci Seblat dan sekitarnya               | 52. KSPN. Yogyakarta Kota dan sekitarnya          | 69. KSPN. Halimun dan sekitarnya                       |
| 35. KSPN. Muaro Jambi dan sekitarnya                  | 53. KSPN. Lhoksado dan sekitarnya                 | 70. KSPN. Ijen–Baluran dan sekitarnya                  |
| 36. KSPN. Tanjung Kelayang dan sekitarnya             | 54. KSPN. Karst Pacitan dan sekitarnya            | 71. KSPN. Waikabubak–Manupeh Tanah Daru dan sekitarnya |
| 37. KSPN. Palembang Kota dan sekitarnya (Sungai Musi) | 55. KSPN. Bali Utara / Singaraja dan sekitarnya   | 72. KSPN. Karangasem–Amuk dan sekitarnya               |
| 38. KSPN. Trowulan dan sekitarnya                     | 56. KSPN. Gili Tramena dan sekitarnya             | 73. KSPN. Lagoi–Bintan dan sekitarnya                  |
| 39. KSPN. Way Kambas dan sekitarnya                   | 57. KSPN. Moyo dan sekitarnya                     | 74. KSPN. Enggano dan sekitarnya                       |
| 40. KSPN. Prambanan–Kalasan dan sekitar.              | 58. KSPN. Kota Bangun–Tanjung Isuy dan sekitarnya | 75. KSPN. Bandung Kota dan sekitarnya                  |
| 41. KSPN. Kuta–Sanur–Nusa Dua dan sekitarnya          | 59. KSPN. Kayan Mentarang dan sekitarnya          | 76. KSPN. Puncak–Gede Pangrango dan sekitarnya         |
| 42. KSPN. Morotai dan sekitarnya                      | 60. KSPN. Ciwidey dan sekitarnya                  | 77. KSPN. Teluk Cenderawasih dan sekitarnya            |
| 43. KSPN. Sentani dan sekitarnya                      | 61. KSPN. Tomohon–Tondano dan sekitarnya          | 78. KSPN. Menjangan–Pemuteran dan sekitar              |
| 44. KSPN. Sangiran dan sekitarnya                     | 62. KSPN. Danau Ranau dan sekitarnya              | 79. KSPN. Taman Nasional Bali Barat dan sekitarnya     |
| 45. KSPN. Takabonerate dan sekitarnya                 | 63. KSPN. Biak dan sekitarnya                     | 80. KSPN. Tulamben–Amed dan sekitarnya                 |
| 46. KSPN. Rupaat dan sekitarnya                       | 64. KSPN. Tangkuban Perahu dan sekitarnya         | 81. KSPN. Bedugul dan sekitarnya                       |
| 47. KSPN. Agats–Asmat dan sekitarnya                  | 65. KSPN. Maninjau dan sekitarnya                 | 82. KSPN. Nusa Penida dan sekitarnya                   |
| 48. KSPN. Pagaralam dan sekitarnya                    | 66. KSPN. Nemberala–Rotendao dan sekitarnya       | 83. KSPN. Ubud dan sekitarnya                          |
| 49. KSPN. Krakatau dan sekitarnya                     | 67. KSPN. Pantai Selatan Yogya dan sekitarnya     | 84. KSPN. Besakih–Gunung Agung dan sekitarnya          |
| 50. KSPN. Natuna dan sekitarnya                       | 68. KSPN. Karst Gunung Kidul dan sekitarnya       | 85. KSPN. Long Bagun                                   |
| 51. KSPN. Alor–Kalabahi dan sekitarnya                |                                                   |                                                        |

|                                 |                                                  |                                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 86. KSPN. Sambas dan sekitarnya | 87. KSPN. Gorontalo Kota– Limboto dan sekitarnya | 88. KSPN. Wazur– Merauke dan sekitarnya |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|

C. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN)

Dari 222 KPPN yang ada, Aceh memiliki 5 (lima) KPPN yaitu:

|                                        |
|----------------------------------------|
| 1. KPPN Banda Aceh Kota dan sekitarnya |
| 2. KPPN Weh dan sekitarnya             |
| 3. KPPN Takengon dan sekitarnya        |
| 4. KPPN Simeulue dan sekitarnya        |
| 5. KPPN Leuser dan Sekitarnya          |

Dengan memperhatikan rencana pembangunan pariwisata nasional terutama dari sisi rencana pembangunan destinasi wisata nasional, maka dalam konteks pariwisata Aceh terlihat bahwa fokus pembangunan pariwisata Aceh terfokus pada 5 KPPN, 1 KSPN dan 2 DPN. Adapun destinasi yang menjadi prioritas adalah wilayah Banda Aceh, Sabang dan sekitarnya, Simeulue dan Pulau Banyak, Takengon dan sekitarnya serta wilayah Leuser, terutama di wilayah Ketambe, dan berbagi dengan Sumatera Utara untuk Bukit Lawang dan Tangkahan.



## 2.2 Tinjauan Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Pidie

Dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pidie, dilaksanakan dengan mengacu kepada Pendekatan Studi yang mampu menjadi landasan dalam menyusun dan menganalisis data dan informasi yang diperoleh sehingga menghasilkan kesimpulan yang mampu menjadi pertimbangan utama dalam melakukan penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Pariwisata Kabupaten Pidie.

Pendekatan studi dalam penyusunan RIPPARDA Pidie akan menggunakan pendekatan kebijakan strategis sebagai pendekatan utama untuk mengarahkan pengambilan keputusan organisasi pada tingkat pengelolaan, perencanaan, dan pengendalian pembangunan pariwisata Kabupaten Pidie. Pada pembuatannya ini RIPPARDA Pidie akan mengacu kepada empat pilar yang tiap pilarnya memiliki pendekatan yang berbeda. Empat pilar tersebut adalah **Destinasi Pariwisata, Usaha Kepariwisataaan, Pasar & Pemasaran** dan **Kelembagaan**. Mengacu kepada hal tersebut, Maka penyusunan RIPPARDA Kabupaten Pidie ini akan mencoba menjabarkan kesetiap aspek tersebut dengan memanfaatkan pendekatan yang ada.

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata memiliki peran yang sangat fundamental bagi pemerintah daerah khususnya dan *stakeholders* pariwisata lainnya, sehingga aspek-aspek dan dimensi RIPPARDA Pidie berdasarkan kepada Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata perlu diakomodir dan menjadi aspek utama yang ada dalam RIPPARDA Pidie. Aspek dan Dimensi RIPPARDA Pidie sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Industri Kepariwisataaan, terdiri dari berbagai macam pelayanan yang dimaksudkan untuk memenuhi dan menunjang kebutuhan wisatawan.
- 2) Pembangunan Destinasi Pariwisata, merupakan kumpulan daya tarik, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat (tuan rumah).
- 3) Pembangunan Pasar Pariwisata, mencakup pasar wisnus dan wisman, pemasaran dan promosi, maupun citra destinasi.
- 4) Pembangunan Kelembagaan Pariwisata, mencakup organisasi, sumberdaya manusia, dan peraturan perundangan yang sesuai.

Adapun penyusunan RIPPARDA disokong oleh keterpaduan antara dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi, yang juga merupakan pilar dari pariwisata berkelanjutan. Dengan demikian, keterpaduan diantaranya menjadi landasan bagi

kebijakan-kebijakan pengembangan kepariwisataan, dalam hal ini RIPPARDA Pidie. Hal ini dilakukan untuk:

- 1) Terjaminnya keberlanjutan sumber daya wisata dan sumber daya pendukung pembangunan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pidie;
- 2) Terintegrasinya pembangunan pariwisata Kabupaten Pidie dengan lingkungan alam, sosial dan budaya, serta menjamin perubahan yang terjadi akibat pembangunan pariwisata sehingga dapat diterima/ditoleransi oleh lingkungan;
- 3) Memadukan perencanaan dan pengembangan pariwisata Kabupaten Pidie yang didukung oleh pemerintah dan *stakeholders* pariwisata Kabupaten Pidie.

Karena sifatnya yang ‘menerus’, maka pariwisata yang berkelanjutan mencakup pelestarian keanekaragaman hayati; minimalisasi dampak negatif terhadap ekologi, budaya dan sosial; pemanfaatan konservasi dan komunitas lokal bagi pengembangan pariwisata; maupun peningkatan perekonomian masyarakat lokal.

Pendekatan yang akan digunakan dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Pidie mengacu kepada kebijakan-kebijakan di atasnya yaitu RIPPARDA Provinsi Aceh dan RIPPARNAS, dan kebijakan kepariwisataan atau lainnya yang mendukung dan berkaitan dengan pembangunan pariwisata baik tingkat nasional dan daerah, selain itu juga pendekatan yang digunakan adalah modifikasi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dan destinasi pariwisata berdaya saing.

Sasaran Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pidie Sesuai dengan tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pidie, dalam pembangunan produk wisata ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut:

- 1) Terbentuknya Destinasi Pariwisata Daerah Kabupaten Pidie
- 2) Terbentuknya Kawasan Pariwisata Daerah dan Daya Tarik wisata Daerah
- 3) Tersedianya daya tarik wisata bagi segmen pasar sasaran.
- 4) Meningkatnya kualitas sumberdaya alam, budaya, dan binaan melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.
- 5) Terimplementasinya panduan dan standar pengembangan pada setiap kawasan pembangunan.



Tren pariwisata saat ini menunjukkan pergeseran, dari wisatawan konvensional menjadi wisatawan minat khusus hal ini dipengaruhi oleh minat atau motivasi wisatawan terhadap obyek atau aktivitas wisata tertentu. Wisata konvensional sering diidentikkan dengan wisata bersifat rekreasi umum dan berorientasi pada obyek 4 S (*Sea, Sand, Sun* dan *Snow*) ataupun obyek-obyek wisata konvensional yang populer, sedangkan wisatawan minat khusus berorientasi pada obyek-obyek yang tidak biasa/populer serta mengandung unsur-unsur pengembangan diri melalui bentuk perjalanan yang lebih aktif, dimana wisatawan terlibat secara fisik dan emosional yang lebih mendalam dengan alam dan masyarakat setempat pada suatu kegiatan tertentu sehingga mereka dapat memperoleh pengalaman berwisata yang berkualitas.



Gambar 2.1 Dimensi RIPPARDA Pidie

Sumber : Modifikasi, Inskeep 1991, Berke & Conroy 2000

Prinsip-prinsip pengembangan wisata minat khusus lebih dikenal dengan istilah *REAL TRAVEL*, yaitu perjalanan wisata yang mengandung unsur-unsur:

- 1) Penghargaan (*Rewarding*), yaitu penghargaan atas sesuatu daya tarik wisata yang dikunjungi, yang diwujudkan pada keinginan wisatawan untuk dapat belajar memahami atau berpartisipasi dalam aktivitas wisata yang terkait dengan obyek tersebut.

- 2) Pengkayaan (*Enriching*), yaitu pengkayaan atau penambahan pengetahuan dan kemampuan terhadap bentuk kegiatan wisata yang diikuti.
- 3) Petualangan (*Adventuresome*), yaitu keterlibatan wisatawan dalam kegiatan wisata yang memiliki resiko secara fisik dalam bentuk kegiatan wisatapetualangan.
- 4) Pembelajaran (*Learning*), yaitu mengandung aspek pendidikan melalui proses belajar yang diikuti wisatawan terhadap kegiatan edukatif yang terdapat di suatu kawasan wisata.

Dari gambaran diatas pendekatan studi dilakukan dengan lebih mendalam melalui beberapa metode yang sesuai dengan pariwisata Kabupaten Pidie diantaranya:

1. Pendekatan Manajemen Strategik

Manajemen Strategik dalam manajemen sebuah organisasi, dapat diartikan sebagai kiat, cara dan teknik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yang terarah pada tujuan strategik organisasi. Merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara pelaksanaannya, yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuannya" (Nawawi, 2000: 148).

Dalam kaitannya dengan penyusunan RIPPARDA Pidie, pendekatan manajemen strategik diadopsi untuk menjabarkan rencana yang berorientasi pada jangkaun masa depan yang jauh (VISI) dan ditetapkan sebagai keputusan manajemen puncak (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil), agar memungkinkan setiap *stakeholders* terkait pariwisata dapat berinteraksi secara efektif (MISI) dalam usaha mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang lebih produktif dan berkualitas dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan (Tujuan Strategik) dan berbagai sasaran (Tujuan Operasional).

Secara garis besar, karakteristik pendekatan manajemen strategik yang akan dioperasionalisasikan dalam penyusunan RIPPARDA ini adalah sebagai berikut:

- a. Manajemen Strategik diwujudkan dalam bentuk perencanaan berskala besar dalam arti mencakup seluruh komponen di lingkungan Kabupaten Pidie yang dituangkan dalam bentuk Rencana Strategik



(RIPPARDA) yang dapat dijabarkan menjadi rencana aksi ataupun rencana kerja tahunan.

- b. Rencana Strategik ini berorientasi pada jangkaun masa depan, dalam hal RIPPARDA Pidie ini dilakukan dalam kurun waktu 10 (Sepuluh) tahun, yang akan dilakukan review minimal selama 5 Tahun ataupun terdapat perubahan dalam kebijakan/peraturan perwilayahan yang berada pada tingkatan strategis seperti RTRW, baik dalam tingkat Nasional, maupun Provinsi.
- c. VISI, MISI, pemilihan strategi yang menghasilkan Strategi Induk (utama) dan Tujuan Strategik untuk Jangka Panjang merupakan acuan dalam merumuskan Rencana Strategis.
- d. Pengimplementasian Strategi dalam Indikasi Program untuk mencapai sasaran masing-masing dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen pariwisata yang mampu memenuhi kepentingan berbagai pihak terkait pembangunan pariwisata kabupaten Pidie.

## 2. Dampak Berganda Pariwisata

Dalam kepariwisataan pembelanjaan wisatawan (*tourist expenditure*) hanyalah menunjukan Tahap awal dari dampak ekonomi pariwisata terhadap suatu daerah/kawasan pariwisata. Selanjutnya jumlah pembelanjaan tersebut akan memberikan dampak berganda (*multiplier effects*) terhadap berbagai komponen dalam usaha pariwisata, yang memiliki kemampuan untuk menyerap dampak tersebut, baik dalam bentuk pemenuhan pasokan barang maupun jasa layanan wisata.

Besarnya angka pengganda ini menjadi sangat penting serta menggambarkan besarnya tingkat pemerataan keuntungan ekonomis, yang dapat diterima oleh komunitas atau masyarakat lokal dari adanya kegiatan pariwisata di suatu daerah/kawasan wisata. Besarnya angka pengganda ini tergantung kepada kompleksitas kegiatan ekonomi di daerah yang bersangkutan, intensitas kegiatan pariwisata, tingkat kebutuhan impor untuk kebutuhan pariwisata, serta kemampuan usaha-usaha formal dan informal setempat dalam memenuhi

permintaan kebutuhan para pelaku usaha pariwisata, untuk dijual kepada wisatawan yang berkunjung ke daerah/kawasan yang bersangkutan.

Kemampuan daya serap usaha lokal terhadap dampak pembelanjaan wisatawan tersebut akan berpengaruh terhadap besar kecilnya tingkat kebocoran (*leackages*), dan perkembangan serta pertumbuhan usaha-usaha lokal itu sendiri. Kebocoran yang terjadi sebenarnya dapat diminimalisasi dengan pemberdayaan usaha-usaha lokal untuk mendukung pemenuhan kebutuhan wisatawan.

Dari konsep di atas, secara teoritis masyarakat lokal yang berada di sekitar suatu kawasan pariwisata seharusnya menjadi pihak pertama yang memperoleh dampak tersebut. Namun dalam kenyataan mayoritas masyarakat lokal di sekitar kawasan pariwisata masih berperan sebagai “penonton” semata, bahkan yang lebih parah kadang justru menjadi obyek wisata tanpa menerima kompensasi apapun dari wisatawan yang datang. Sementara individu atau para pelaku usaha yang berasal dari luar kawasan tersebut justru menerima hasil yang melimpah, baik melalui hotel, restoran, agen perjalanan atau sebagai pemandu wisata.

Kondisi di atas diperburuk lagi dengan kegiatan pengadaan bahan baku dan layanan yang didatangkan dari luar daerah yang bersangkutan (impor), dan bukan merupakan hasil produksi dari masyarakat setempat. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan kebocoran pendapatan yang seharusnya dapat diterima oleh masyarakat lokal.

Hal di atas sebenarnya terjadi karena belum adanya titik temu dalam hal pemenuhan kebutuhan (baik kualitas, kuantitas dan kontinuitas) yang dituntut oleh para pelaku sektor formal. Sementara di satu sisi, para pelaku sektor informal masih berhadapan dengan berbagai permasalahan mendasar, meliputi modal kerja, manajemen usaha dan produktivitas kerja.

Dua sisi inilah yang seharusnya dipertemukan melalui suatu bentuk kemitraan, yang dalam hal ini diawali dengan komitmen kedua belah pihak untuk saling mendukung, mengembangkan serta memelihara kegiatan kemitraan yang akan dijalankan.



# 3 KONDISI WILAYAH DALAM MENDUKUNG PARIWISATA

## 3.1 Kondisi Fisik

Kabupaten Pidie terletak antara 04, 30°–04, 60° Lintang Utara ; 95, 75°-96, 20° Bujur Timur, dengan ibukota adalah Kota Sigli. Secara administrasi pemerintahan Kabupaten Pidie berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya, Bireuen, Aceh tengah, Aceh Barat, Selat Malaka di sebelah timur dan utara. Sedangkan sebelah barat dan selatan berbatasan langsung dengan Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Tengah, Aceh Jaya serta Aceh Besar.

Semenjak diberlakukannya otonomi daerah tahun 2001 telah terjadi pemekaran wilayah administrasi Provinsi Aceh, baik itu pemekaran tingkat kabupaten hingga pemekaran di tingkat kecamatan. Pada 2 Januari 2007 terjadi pemekaran Kabupaten Pidie Jaya dari wilayah Kabupaten Pidie. Kemudian pada tahun 2008 terjadi pemekaran kecamatan di Kabupaten Pidie yang sebelumnya berjumlah 22 kecamatan menjadi 23 kecamatan, 97 mukim dan 730 gampong.

Sebelumnya Kabupaten Pidie hanya memiliki 727 gampong definitif, akan tetapi setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-9756 tahun 2016 tentang Nama, Kode dan Jumlah Desa, maka bertambah 3 (gampong) yang telah definitif yakni Gampong Blang Pandak Kecamatan Tangse, Gampong Simpang Beutong Kecamatan Muara Tiga dan Gampong Pasi Beurandeh Kecamatan Batee

Kabupaten Pidie terletak pada bagian utara Provinsi Aceh. Luas wilayah daratan yaitu 318.444, 77 Ha (Qanun RTRWK Pidie Nomor 5 Tahun 2014) dan wilayah laut kewenangan sejauh 4 mil sejauh garis pangkal seluas 39.845, 37 Ha.





Tabel 3.1  
 Ibukota Kecamatan, Luas Wilayah, Jumlah Mukim dan Gampong (Sumber: Pidie Dalam Angka, BPS Kabupaten Pidie 2019)

| No.    | Kecamatan       | Ibukota Kecamatan | Luas Wilayah (Ha) | Jumlah |         |
|--------|-----------------|-------------------|-------------------|--------|---------|
|        |                 |                   |                   | Mukim  | Gampong |
| 1      | Geumpang        | Geumpang          | 65.707, 16        | 1      | 6       |
| 2      | Mane            | Mane              | 67.503, 58        | 1      | 4       |
| 3      | Muara Tiga      | Laweueng          | 16.002, 68        | 3      | 18      |
| 4      | Padang Tiji     | Padang Tiji       | 25.758, 61        | 6      | 64      |
| 5      | Tangse          | Tangse            | 78.658, 02        | 4      | 28      |
| 6      | Tiro/Truseb     | Tiro              | 17.468, 66        | 4      | 19      |
| 7      | Titeue          | Titeue            | 2.741, 83         | 2      | 13      |
| 8      | Grong-grong     | Grong-grong       | 777, 34           | 2      | 15      |
| 9      | Batee           | Batee             | 4.610, 83         | 4      | 28      |
| 10     | Pidie           | Lhok Keutapang    | 2.609, 45         | 8      | 64      |
| 11     | Indrajaya       | Caleue            | 2.540, 90         | 5      | 49      |
| 12     | Mila            | Mila              | 3.531, 96         | 3      | 20      |
| 13     | Keumala         | Keumala           | 4.929, 57         | 2      | 18      |
| 14     | Delima          | Reubee            | 2.499, 11         | 4      | 44      |
| 15     | Sakti           | Kota Bhakti       | 3.852, 20         | 7      | 49      |
| 16     | Mutiara Timur   | Bandar Mutiara    | 3.124, 39         | 7      | 48      |
| 17     | Mutiara         | Beureunuen        | 1.674, 90         | 4      | 29      |
| 18     | Simpang Tiga    | Simpang Tiga      | 2.486, 44         | 7      | 52      |
| 19     | Kota Sigli      | Kota Sigli        | 655, 64           | 3      | 15      |
| 20     | Peukan Baro     | Lampoih Saka      | 1.729, 06         | 6      | 48      |
| 21     | Glumpang Tiga   | Glumpang Minyeuk  | 5.483, 92         | 4      | 34      |
| 22     | Glumpang Baro   | Cot Glumpang      | 1.211, 89         | 4      | 21      |
| 23     | Kembang Tanjong | Kembang Tanjong   | 2.886, 63         | 6      | 45      |
| Jumlah |                 |                   | 318.444, 77       | 97     | 731     |

### 3.2 Sejarah

Kerajaan Pedir atau negeri Pidie pada zaman purba memiliki perbatasan dari Kuala Batee sampai Kuala Ulim meliputi Meureudu. Nama Pidie sendiri tidak diketahui dari mana asalnya. Bangsa Portugis menyebut dengan Pidir (Pedir) kemudian bangsa Cina menyebut negeri ini dengan Poli.

Pada masa dinasti [Liang](#) berkuasa di kerajaan Lamuri pada abad ke-5 tepatnya tahun 413 Masehi, seorang musafir bernama Fa Hin (Fa Hian) melawat ke Jeep Po Ti singgah di Sumatera bagian Utara, diantaranya dia singgah di Poli (Pidie). Disebutkan negeri Poli luasnya 100×200 mil, dengan 50 hari perjalanan dari Timur ke Barat dan dari Utara ke Selatan 20 hari perjalanan, terdiri dari 136 desa (gampong) yang makmur dan orang pribumi menanam padi dua kali setahun.

Fa Hin menulis dalam laporannya bahwa cara pertanian negeri Poli sama dengan Persia (Iran) dan India di sekitar lembah sungai Indus dan sungai Gangga. Negeri Poli juga memelihara ulat sutera dan kain buatannya ditenun sendiri seperti negeri Syam (Damsyik) atau Suria (orang Aceh menyebutnya dengan Surien). Raja memakai kain sutera, orang-orang peukan (pesisir) telah memakai kain, sedangkan orang udik masih memakai kulit kayu (cawat), pelita atau ketaja pada damar. Mereka telah tahu cara berternak kambing dan dilihatnya nelayan. Raja Poli ketika itu beragama Budha. Raja Poli pada tahun 518 Masehi mengirimkan utusan ke Tiongkok untuk perkenalan dan hubungan diplomatik dengan Kaisar Cina.

Seorang pelawat Portugal, Ludovico di Varthema, yang pernah singgah di Pidie pada akhir abad 15. Ia mencatat pada abad tersebut Pedir, yang masih disebut sebagai negeri Pedir merupakan sebuah negeri maju yang setiap tahunnya disinggahi sekurang-kurangnya 18 sampai 20 kapal asing, untuk memuat lada yang selanjutnya diangkut ke Tiongkok, Cina.

Dari pelabuhan Pedir juga diekspor kemenyan dan sutra produksi masyarakat Pidie dalam jumlah besar. Karena itu pula, banyak pendatang dari bangsa asing yang berdagang ke pelabuhan Pedir. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi warga pelabuhan waktu itu meningkat. Bahkan varthema menggambarkan, disebuah jalan dekat pelabuhan Pedir, terdapat sekitar 500 orang penukar mata uang asing.



Selanjutnya kerajaan Pidie menjadi sebagai kerajaan otonom di bawah Kerajaan Aceh Darussalam, meskipun begitu peranan raja negeri Pidie tetap diperhitungkan. Bahkan, setiap keputusan Majelis Mahkamah Rakyat Kerajaan Aceh Darussalam, sultan tidak memberi *cap geulanteu* (stempel halilintar) sebelum mendapat persetujuan dari Laksamana Raja Maharaja Pidie. Maha Raja Pidie beserta *uleebalang syik* dalam Kerajaan Aceh Darussalam berhak mengatur daerah kekuasaannya menurut putusan balai rakyat negeri masing-masing. Dalam beberapa keadaan raja Pidie atau keturunannya menjadi Sultan Aceh Darussalam.

### 3.3 Kekayaan Ekologis

Hector Ceballos Lascurian (1987) ekowisata adalah perjalanan ke tempat-tempat alami yang relatif masih belum terganggu atau terkontaminasi (tercamari) dengan tujuan untuk mempelajari, mengagumi dan menikmati pemandangan, tumbuh-tumbuhan dan satwa liar, serta bentuk-bentuk manifestasi budaya masyarakat yang ada, baik dari masa lampau maupun masa kini.

Rumusan ini kemudian disempurnakan oleh *The International Ecotourism Society (TIES)* pada awal tahun 1990, bahwa ekowisata adalah perjalanan yang bertanggung jawab ke tempat-tempat yang alami dengan menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.

Definisi ini sebenarnya hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Hector Ceballos Lascurian yaitu sama-sama menggambarkan kegiatan wisata di alam terbuka, hanya saja menurut TIES dalam kegiatan ekowisata terkandung unsur-unsur kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan serta kesejahteraan penduduk setempat.

Ekowisata Pidie merupakan upaya untuk memaksimalkan dan sekaligus melestarikan potensi-potensi sumber daya alam dan budaya untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan yang berkesinambungan.

Ada beberapa kata kunci dari definisi ini. Kata “bertanggung jawab” pada Ekowisata Pidie memiliki arti bahwa di dalam penyelenggarannya, baik wisatawan maupun pelaku wisata, masyarakat dan pengelola kawasan pariwisata harus memiliki kepedulian, komitmen dan bertanggung jawab untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun budaya masyarakat.

Selain itu kegiatan ekowisata Pidie juga diharapkan melibatkan masyarakat serta memberikan kontribusi pada pembukaan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat. Ekowisata merupakan upaya untuk memaksimalkan manfaat dari sumber daya alam dan budaya, serta sekaligus melestarikannya untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan yang berkesinambungan.

Pada pelaksanaan ekowisata Pidie memuat beberapa prinsip. Sasaran dari prinsip ini adalah terpeliharanya ekosistem melalui pengendalian secara optimal terhadap jumlah atau besaran pengunjung pada suatu kawasan. Adapun prinsip-prinsip ekowisata adalah sebagai berikut:

a) Prinsip ramah lingkungan

Pada prinsipnya, pelaksanaan ekowisata Pidie memasukkan rancangan yang peka terhadap lingkungan, sistem pengendalian polusi atau limbah dan elemen-elemen pendukungnya (daur ulang sampah, pemakaian bahan non kimia), pengendalian sistem drainase, konservasi aspek biotis (flora dan fauna) serta habitatnya, hingga mendorong cinderamata yang mendukung pelestarian sumber daya alam dan lain sebagainya.

b) Prinsip ramah masyarakat

Prinsip ramah masyarakat adalah bagaimana masyarakat dapat terlibat dan menerima manfaat langsung dari kegiatan pariwisata. Prinsip ini menitikberatkan pada aspek sosiologis, berorientasi pada hal-hal yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, baik pada peningkatan kekerabatan sosial (*social fabric*) maupun secara fisik, yakni adanya peningkatan lingkungan fisik yang dapat memacu peningkatan ekonomi setempat. Orientasi aspek sosial yang lain adalah mendorong peningkatan peran masyarakat dalam mewujudkan *sense of belonging* terhadap keberadaan usaha wisata yang ada di sekitarnya yang sekaligus mendorong keinginan-keinginan untuk ikut memelihara, merawat serta menjaga kawasan tersebut.

c) Prinsip ramah wisatawan

Prinsip ramah wisatawan, dimana pelayanan prima dibutuhkan untuk meningkatkan kepuasan wisatawan, sehingga mereka akan melakukan kunjungan ulang. Prinsip ini menitikberatkan pada aspek pelayanan yang akan berdampak pada aspek ekonomi. Ukuran-ukuran kesuksesan pada aspek ekonomi tidak saja diukur pada hal yang



bersifat kuantitatif semata, tetapi juga pada hal pengelolaan yang berkelanjutan. Sehingga titik tekan bukan hanya pada meningkatnya pendapatan, tetapi juga pada peningkatan pelayanan yang akan berdampak pada keberlanjutan pengelolaan ke depannya.

# 4 DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN PIDIE

## 4.1 Daya Tarik Wisata Kabupaten Pidie

Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Kabupaten Pidie terbagi dalam 6 model wisata, antara lain sebagai berikut :

### 1. Wisata Alam

Kabupaten Pidie, memiliki areal hutan seluas 216.172 H dan menjadi hulu beberapa sungai utama di Provinsi Aceh. Berdasarkan evaluasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di kabupaten Pidie 70% kurang lebih berada diatas ketinggian 400 – 1.001 m keatas. Kondisi strategis ini sangat sesuai untuk menerapkan konsep agrowisata atau ekowisata. Jenis wisata ini selain tidak membutuhkan modal yang besar juga dapat berpengaruh langsung bagi masyarakat sekitar.

Dengan keindahan alam sebagai komponen utamanya, destinasi pariwisata yang berbasis ekowisata mestinya banyak dijumpai di Pidie, termasuk objek wisata yang berada di area hutan lindung Ulu Masen, yang dapat memanfaatkannya menjadi *point of selling* nya. Hal ini bukan hanya akan sangat membantu pengembangan pariwisata untuk tujuan ekonomi, dengan menjadikan alam sebagai atraksi utama, tetapi yang juga penting adalah dapat melindungi sumber daya alam itu sendiri.

Ekowisata (*Ecotourism*) merupakan bentuk pariwisata yang bukan hanya menjual kekayaan alam (*natural heritage*), tetapi juga partisipasi masyarakat setempat yang terkait dengan budaya mereka.

Beberapa Daerah Tujuan Wisata (DTW) alam yang masuk dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pidie antara lain sebagai berikut:



### 1) Air Terjun Alue Lhok Tangse

Kabupaten Pidie memang penuh dengan keindahan alam yang tersaji rapi menurut tipe para penikmat alam, salah satunya air terjun alue lhok, yang terdapat di Gampong Alue Lhok, Kacamatan Tangse, Pidie. berada tepat di pinggiran jalan Nasional, Keumala – Geumpang, air terjun ini sangat banyak dikunjungi para penikmat alam, baik dari kalangan pemuda –pemudi hingga keluarga.



Gambar 4.1  
Air Terjun Alue Lhok

Apalagi, jarak tempuh kelokasi, menggunakan kendaraan bermotor tak memakan waktu lebih dari 120 menit dari pusat Kota Sigli, namun juga semua tergantung bagaimana cara kita menikmati suasana sepanjang jalan menuju Tangse.

Untuk transportasi, tak perlu khawatir, bagi yang suka backpacker, bisa dengan mudah mendapatkan transportasi umum jenis minibus di Kota Beureunuen atau Mutiara, atau ingin lebih santai, wisatawan bisa merental minibus yang tersedia banyak di Kota Sigli atau Beureunuen.

Selain lokasinya yang berada di pinggiran jalan, para wisatawan juga dapat langsung menikmati indahnya alam dan sungai tangse (Krueng Meuriam) yang berada tepat didepannya. Kita juga dapat menikmati air terjun tersebut sembari menikmati secangkir kopi dan makanan ringan lainnya yang disajikan oleh para pramusaji dilokasi wisata.

Para pengunjung juga dibolehkan untuk mandi dilokasi air terjun, tak perlu takut dengan bajunya yang basah, para pemilik warung juga telah menyediakan ruang ganti dan kamar mandi disekitar lokasi. Hal utama dalam ekowisata adalah segala jenis norma adat istiadat juga tetap harus dijaga bersama.

## 2) Krueng (Sungai) Baro Geunie

Geunie, sebuah dusun dalam Gampong Lhok Keutapang, Tangse, Pidie. Daerah tersebut juga merupakan kawasan yang dikelilingi oleh hutan dan sungai, sementara masyarakat setempat memiliki mata pencaharian, yakni bertani dan berkebun yang diatur oleh hukum adat Gampong (Desa). Daerah tersebut merupakan bagian dari hulu sungai Baro atau Krueng Baro yang langsung mengalir menuju pusat Kota Sigli, tentu tak perlu ditanyakan lagi, bagaimana bersih dan asri hulu sungai yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan Ulu Masen, Aceh tersebut.

Beberapa tahun ini, warga Geunie, mengembangkan tempat mereka yang memiliki potensi alam, menjadi daerah tujuan wisata lokal dan interlokal, memanfaatkan letak geografis, terutama pemanfaatan sungai, masyarakat membangun sejumlah lokasi wisata alam yang dibuka untuk umum, dengan mengandalkan sungai nan indah, lokasi tersebut kini kerap menjadi tempat para pemuda, organisasi, komunitas dan lembaga negeri serta swasta, untuk melaksanakan giat kepariwisataan, Gathering Family serta acara kebersamaan lainnya.



Gambar 4.2  
Krueng Baro Geunie

Sementara, ditinjau dari kearifan lokal, warga setempat memiliki aturan sendiri di setiap lokasi yang ada. Bicara kenyamanan dan keamanan, Wisata Krueng Geunie,



sudah dijamin dapat menghilangkan penat pekerjaan dan liburan para wisatawan. Mengapa tidak, mushalla, fasilitas camping ground, kamar ganti dan kamar mandi hingga warung disediakan oleh penduduk setempat, dengan harga yang bervariasi, jaraknya juga tak jauh dari pusat Kabupaten, hanya memakan waktu sekitar 40 menit. Mengenai sarana transportasi, jalur nasional ini kalian tak perlu takut, karena baik kendaraan umum dan rental banyak tersedia di Kota Bereunuen dan Kota Sigli.

Krueng Geunie, juga menyediakan jasa Wisata arus deras yang siap bagi semua kalangan pengunjung, yakni wisata Tubing. Wahana wisata baru dan satu-satunya yang ada di Pidie, hanya dengan membayar Rp.30.000 setiap trip, pengunjung dapat menikmati indahny aliran sungai Geunie serta pemandangannya. Tentunya, wahana yang satu ini memiliki SOP tingkat Nasional, yang dipandu oleh para pramuwisata atau guide berpengalaman dengan tingkat safety yang maksimal.

Nah, bagi wisatawan yang tidak bisa berenang atau membawa anak-anak, tidak perlu takut juga mandi di sungai itu, karena sungai Geunie merupakan karakter sungai yang dangkal, meski memiliki arus yang deras. Selain itu, lokasi wisata di Geunie, dapat dipilih juga sesuai selera wisatawan.

### 3) Air Panas Beungga

Bicara Tangse memang tidak ada habisnya. Selain air terjun, sungai geunie, daerah yang memiliki potensi pertanian dan perkebunan ini, juga memiliki sumber air



panas, terutama di kemukiman Beungga. 15 menit melewati kawasan wisata Geunie, masih di jalan Nasional Keumala – Geumpang, kita akan langsung bertemu dengan kawasan air panas, tepatnya di Blang Bubu. Jaraknya hanya 50 meter dari rumah penduduk sekitar, lokasi ini

memiliki luas sekitar satu hektar, meliputi lahan parkir, casebo peristirahatan warga dan tempat ibadah, serta kamar mandi dan kamar ganti pengunjung.



Gambar 4.3  
Air Panas Beungga



#### 4) Krueng (Sungai) Geumpang

Bergerak dari Tangse kita terus menanjak kedaerah pengunungan, tepatnya di Kecamatan Mane dan Geumpang, juga memiliki sungai yang lebih besar dari sungai Tangse, namanya Sungai Geumpang. Sungai yang mengalir menuju Krueng teunom, Kabupaten Aceh jaya tersebut, memiliki ciri khas dan karakter sungai yang jauh berbeda daripada sungai di kawasan Tangse.



Gambar 4.4  
Krueng Geumpang

Jika dihitung dari jarak, Geumpang berjarak sekitar 108 km dari Kota Sigli, atau sekitar 2, 5 jam perjalanan menggunakan kendaraan bermotor atau mobil. Kawasan ini langsung berbatasan dengan Aceh Jaya, Aceh Barat dan Aceh Tengah.

Karakter kawasan tersebut sedikit berbeda dengan kawasan hutan Tangse, jumlah penduduk juga berpengaruh pada luasnya pembukaan lahan, sehingga di Mane dan Geumpang, masih banyak kita jumpai hutan yang sangat padat, seperti rimba, meski masih dalam kawasan pemukiman.

Sumber air dan sungai kecil yang berkumpul menuju sungai Geumpang, membuat sungai tersebut lebih besar dan dalam, begitu juga arusnya yang sangat

deras. Yang membuat sungai tersebut sangat cocok untuk dikunjungi yakni, aneka ragam flora dan fauna masih dapat kita saksikan di kawasan tersebut secara langsung, seperti burung rangkong, kumpulan kelelawar yang jumlahnya capai ribuan sampai binatang dilindungi lainnya.

Apalagi wisatawan yang hobinya mancing, sungai yang satu ini memiliki ikan khas yakni ikan Jurung atau orang lokal menyebutnya ikan Keurelieng dimana ikan air tersebut jika disajikan dengan menu lokal, memiliki rasa yang sangat luar biasa. Ukurannya juga tak kalah mengejutkan, bisa mencapai 15 kg setiap ekornya.



Untuk para pengunjung yang suka camping, pinggiran Sungai Geumpang, tepatnya di Mane, Gampong Pante Luah, penggiat wisata juga menyediakan tempat khusus buat wisatawan yang ingin bermalam di pinggiran sungai, cukup bayar Rp. 30.000, setiap malamnya, sebagai jasa simaksi kepada warga Desa.

Jika ingin bermalam di penginapan, di Kota Bangkeh, Geumpang, juga memiliki penginapan dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, bagi wisatawan yang bermalam di kawasan Geumpang dan Mane, selain menikmati keanekaragaman hayati di sungai, wisatawan juga dapat mencoba mengelilingi kawasan tersebut, karena aneka ragam kearifan lokal juga masih sangat kental di kehidupan masyarakat sekitar. Apalagi, jika datang dimusim durian, pengunjung akan mendapatkan sensasi yang berbeda dari durian Geumpang yang sangat terkenal.



## 5) Danau Tang-Tang



Gambar 4.5  
Danau Tang-tang

Pesona Geumpang memang memiliki perbedaan sendiri dengan kawasan wisata lain di Pidie, jika Tangse, memiliki sumber air panas yang banyak. Geumpang memiliki Danau yang wajib dikunjungi oleh wisatawan penyuka alam liar, namanya Danau Tange-Tang, orang lokal menyebutnya Kulam Tang Tang, ada juga Kulam Sitang-Tang, memiliki luas diperkirakan mencapai 160 hektar, berada ditinggikan 1800 Meter diatas permukaan laut (Mdpl). Danau tersebut terletak dalam kawasan Gampong Pucok, Geumpang, sementara jalur transportasinya, dari kota bangkeh, kita dapat menggunakan sepeda motor khusus atau mobil khusus pendakian yang disewakan oleh warga setempat. Dari Pucok, menuju titik akhir transportasi, memakan waktu sekitar 15-20 menit, kemudian kita dapat melakukan perjalanan setapak menuju danau selama 15 menit, tentu bukan hal yang merepotkan bagi yang terbiasa tracking atau pecinta alam.

Alhasil, kalian dapat melihat langsung, danau yang dikelilingi hutan tropis kabupaten Pidie. air yang bersih dan jernih, serta dibalut hutan dan burung-burung

liar, jelas akan memanjakan suasana outdoor para wisatawan. Mengapa tidak, saban pagi dan sore, kita dapat langsung melihat burung Rangkong paruh kuning yang menjadi salah satu burung penghuni Kawasan tersebut, ditambah lagi danau tersebut memiliki banyak ikan air tawar seperti ikan nila dan emas. Sebab, Pemerintah Aceh, pernah menaburkan benih ikan emas dan nila di danau tersebut tahun 2009 silam.

Adapun, keindahan malam di Danau tersebut jika kondisi cerah, sangatlah indah. Bagi penyuka fotografi jenis Milkyway atau gugusan bintang, danau Tang-Tang, rekomendasi spot foto terbaik.





## 6) Konservasi Gajah

Selain wisata sungai, danau dan air terjun yang ada di Kabupaten Pidie. Daerah yang memiliki jumlah penduduk mencapai 465 ribu jiwa itu, juga menyediakan wisata alam dibidang konservasi, yaitu wisata konservasi gajah. Terletak di pos Konservasi Respon Unit (CRU) Mila, Gampong Tuha lala, Kecamatan Mila.



Gambar 4.6  
Konservasi Gajah

Menuju lokasi ini, kita hanya menempuh waktu sekitar 30-40 menit dari pusat Kota Sigli, meskipun memasuki kawasan perkebunan dan hutan produksi Pidie di Mila, jalan menuju lokasi tersebut masih sangat bagus dan dapat dijangkau oleh semua jenis kendaraan, baik roda 2 dan 4.

Di CRU Mila, kita dapat melihat langsung gajah jinak milik BKSDA Aceh, yang memiliki tugas utama menjaga kestabilan konflik satwa di Pidie. Namun, pada hari-hari tanpa tugas utama, wisatawan bisa melihat langsung proses keseharian gajah jinak dengan para Mahout (Pawang). Jika waktu kunjungan kalian tepat waktu, kesempatan berpatroli dengan gajah jinak bisa menjadi kesempatan emas travelling kalian. Kalau ingin bermalam di CRU Mila, pengunjung juga tak perlu harus bersusah

payah, selain adanya tempat untuk beristirahat, tempat tersebut juga memiliki kamar mandi dan air yang sangat bersih dari mata air pengunungan.



Tidak hanya itu, lokasi untuk *Camping Ground* juga tersedia bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana alam lebih terasa. Indahya lagi, di CRU Mila, wisatawan dapat langsung menikmati kearifan lokal masyarakat setempat. Tak jauh dari pos, kita dapat menikmati buah rambutan dari kebun warga, jeruk dan durian Lala.

Bagi penggiat hobi tracking, Mountain bike dan motor trail, kawasan ini sangat tepat untuk wisatawan jelajahi.



#### 7) Air Terjun Teuraceu Laot Geumpang

Teuraceu Laot (Air Terjun Laut) merupakan bukti eksotisnya alam Pidie, terletak di pedalaman Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, Aceh. Air terjun ini terjadi karena proses penyempitan sungai, yakni sungai Mas, yang hilirnya menuju Aceh Barat.

Meskipun jauh dari Pusat Kota Sigli dan berada di pedalaman Geumpang diantara perbatasan Pidie dan Aceh Barat atau memakan waktu 2, 5 jam ke Kota Bangkeh. Namun, jika wisatawan yang ingin menikmati sungai ditengah rimba hutan tropis Pidie, Teuraceu laot adalah rekomendasi utama buat wisatawan.



Gambar 4.7  
Air Terjun Teuraceu Laot

Berada di KM23 Geumpang-tutut atau hanya 20 menit dari Bangkeh, mengendari mobil atau motor, tentu saja masih di jalan Nasional, kita langsung berada di pintu rimba menuju Teuraceu Laot. Mulai masuk rimba, kita hanya perlu berjalan kaki atau Tracking selama 50 menit hingga sampai di Teuraceu Laot.

Serta merta, wisatawan akan menikmati rimba sebenarnya, sepanjang perjalanan. Jangan heran jika wisatawan mendapati sejumlah jejak hewan liar, seperti beruang madu serta binatang liar lain yang dilindungi oleh Negara. Kawasan wisata

ini sangat cocok buat wisatawan yang suka berpetualangan. Apalagi kalian yang menyukai flora dan fauna di Aceh.

Teuraceu Laot, dikatakan demikian karena air terjun tersebut membentuk sebuah kolam besar dengan air yang sangat jernih, karena kondisi airnya dalam, sehingga airnya bewarna biru, kedalamannya diperkirakan mencapai 10 meter. Tak hanya sampai disitu, dekat dengannya juga terdapat aliran sungai yang membentuk air terjun, dinamai dengan Teuraceu Mantap Kloe alias keren sekali.

Bagi wisatawan yang hobinya memancing, lokasi ini Sangat cocok buat hobi tersebut, pasalnya ikan Keureulieng atau ikan Jurung sangat banyak ditempat tersebut.

Namun, lokasi tersebut tidak dianjurkan bagi wisatawan yang pemula atau tanpa pemandu yang berpengalaman, dikarenakan tidak ada akses yang dekat dengan perkampungan warga. Sehingga, pengunjung wajib mempersiapkan segala alat camping dengan sempurna.





#### 8) Savana Gunong Taleuk Tiro

Savana Gunong Taleuk yang terdapat di Gampong Panteun Beunot, Tiro, Pidie, tidak asing lagi bagi kalian yang instagramable. Gunung yang memiliki pemandangan yang luar biasa tersebut, kini menjadi lokasi wajib didatangi oleh para wisatawan jika ke Pidie.

Jaraknya yang tak terlalu jauh, berkisar 40 km dari pusat kota Sigli, hanya memerlukan waktu 50-60 menit tracking, wisatawan dapat melihat langsung padang Savana bak gunung diluar negeri.



Gambar 4.8  
Savana Gunong Taleuk

Taleuk, dihapit langsung oleh gunung Mersèu dan Halimoen Tangse, walau secara geografis dia berada di Kawasan Tiro. Sebelahnya, juga terdapat padang savanna yang lebih luas dari taleuk, yakni Glee Sala, pemandangan Sala, jika dilihat dari Taleuk sangatlah luar biasa, tapi gunung tersebut lebih jauh dari Taleuk.

Jalur menuju Taleuk juga tidak berbahaya, namun kita harus menelusuri sepanjang Krueng Agam, hingga ke Pinto Rimba, jalur pendakian Taleuk. Tentu saja dari Kota menuju Pintu masuk pendakian, kalian dapat menggunakan sepeda motor roda dua.

Bicara Savana Taleuk, tak ada yang meragukannya lagi, dari segala jenis sudut kita berswafoto, lokasi ini menjadi lokasi idaman para traveler dan penggiat alam jika ingin berakhir pekan. Untuk Sunrise dan Sunset di Taleuk juga tak kalah hebatnya dengan tempat lain, apalagi jika kita beruntung mendapatkan suasana paska hujan dengan kabut-kabut pengunungan, jika beruntung lagi, kita dapat langsung melihat rusa di padang savana itu, sungguh moment yang luar biasa.



Sementara masyarakat Tiro, meski dikenal dengan kawasan konflik Aceh dulunya. Sudah sangat familiar dengan para pendatang atau pengunjung yang ingin mengunjungi Taleuk.

Tak hanya Taleuk, dalam perjalanan menuju desa terakhir, wisatawan dapat mengunjungi langsung, Masjid dan Pesantren yang dibangun oleh Pahlawan Nasional, Tgk Chik Di Tiro sehingga perjalanan wisatawan lebih berarti dan menyenangkan.



#### 9) Lingkok Kuwieng

Mungkin bagi Masyarakat Aceh, khususnya Pidie, khususnya yang suka travelling dan perjalanan outdoor, tidak ada yang tak pernah mendengar lokasi Wisata Lingkok Kuwieng. Gugusan bebatuan yang terbentuk akibat aliran sungai di Padang Tiji, Kabupaten Pidie itu, masuk dalam kawasan kars yang wajib dilindungi untuk kelangsungan ekosistem.



Gambar 4.9  
Lingkok Kuwieng

Karena sungai tersebut membentuk sebuah benteng pertahanan dan prasasti mirip bangunan yang dibangun pada prasejarah serta air yang sangat jernih, Lingkoek Kwuing sangat diminati oleh penggiat alam dan para pecinta Camping.

Dilokasi yang dapat ditempuh dengan jarak 2-3 jam menggunakan sepeda motor dan mobil tersebut, kini sudah tersedia casebo atau bilik dan tempat ibadah serta kamar mandi yang diperuntukkan kepada para pengunjung oleh Pemkab Pidie.

Jika ingin menuju Lingkoek, wisatawan dapat melewati pasar Padang Tiji, menuju Desa terakhir yakni Pulo Hagu. Disana wisatawan dapat langsung mengikuti jalur pengunungan dan perkebunan warga menuju lokasi wisata.

Tentu untuk perbekalan di jalan, pengunjung harus membawanya sendiri, karena lokasi sungai lingkok, tidak ada warga yang menjajakan makanan dan minuman, sehingga tempat tersebut memang dikhususkan kepada wisatawan yang hobinya berpetualangan.

Kini jalur menuju Lingkok, telah banyak dikunjungi oleh pencinta hobi motor Trail dan sepeda gunung, hal itu dikarenakan Lingkok Kuwieng sungai yang sungguh menarik dan track perjalanan yang memang cocok untuk mereka yang suka Adventure.



#### 10) Guha Tujoeh Laweung

Guha Tujoeh (Goa Tujuh), adalah gugusan goa yang ada di Laweung, Kabupaten Pidie, goa ini juga berbatasan langsung dengan Kecamatan Bate. Goa yang memiliki daya tarik cagar alam dan budaya ini, telah lama menjadi lokasi wisata.



Gambar 4.10  
Guha Tujoeh Laweung

Selain memiliki kawasan kars goa yang sangat menarik, tempat tersebut juga memiliki banyak cerita rakyat yang mengikat dengan struktur didalam Goa. Tak perlu takut untuk masuk kedalam Goa Horizontal tersebut, karena sesampai disana, kita akan menemukan banyak Guide lokal yang siap mengantarkan kita keseluruh isi pelosok Goa.

Untuk menuju lokasi Goa, pengunjung dapat menggunakan sepeda motor dan mobil jenis apapun sampai kelokasi. Jika kalian dari arah Banda Aceh, kalian dapat langsung masuk melalui Kecamatan Muara Tiga, sedangkan dari Sigli, boleh melewati jalur Batee. Sementara akses kelokasi sudah sangat mudah dengan kondisi jalan level Nasional.

Cukup memakan waktu sekitar 30 menit dari Sigli dan 15 menit dari Muara Tiga, pengunjung dapat langsung memarkirkan kendaraannya dilokasi yang telah

disediakan oleh warga setempat. Untuk fasilitas kamar mandi dan makanan, para pengunjung juga tak perlu khawatir, karena warga lokal telah menyediakan kamar mandi dan tempat istirahat bagi para pengunjung.

Untuk keamanan dan kenyamanan, disarankan pengunjung menggunakan guide lokal menuju kedalam Goa. Pastinya kalian akan melihat beragam keindahan bawah tanah Pidie dalam Guha Tujuh, dengan sejuta cerita rakyat yang tak akan habisnya.





## 2. Wisata Budaya dan Sejarah

*Heritage tourism* (wisata budaya) terkait dengan travel, dalam hal menikmati pengalaman (*experience*) yang ditawarkan oleh situs warisan budaya ini. Ini berkaitan dengan identifikasi, pengelolaan, perlindungan dan pelestarian nilai-nilai budaya yang diwariskan pada sebuah situs.

Jenis Pariwisata seperti ini menarik wisatawan yang punya minat khusus pada bidang *heritage*, seni, kerajinan. Pengunjung berusaha untuk berinteraksi dengan budaya, sejarah, situs *arkeologi* dan juga interaksi dengan masyarakat setempat. Sering kali, imigran kembali kekampung halamannya memulai perjalanan nostalgia untuk bersatu kembali dengan akar budaya yang ada dikeluarga mereka, yang telah lama mereka tinggalkan.

Pariwisata Warisan Budaya (*culture heritage*) adalah salah satu jenis wisata yang paling cepat berkembang karena adanya kecenderungan peningkatan spesialisasi dikalangan wisatawan. Kecenderungan ini terlihat dalam kenaikan jumlah wisatawan yang mencari petualangan, budaya, sejarah, *arkeologi*, religi dan juga interaksi dengan masyarakat setempat.

Bentuk perjalanan seperti ini menciptakan dampak ekonomi dan sosial positif, membentuk dan memperkuat identitas, dan membantu melestarikan warisan budaya. Selain itu, memfasilitasi harmoni dan pengertian antara orang-orang, mendukung budaya dan membantu menyegarkan pariwisata.

Budaya dan sejarah telah lama berkontribusi pada daya tarik destinasi wisata. Namun dalam beberapa tahun terakhir, *culture* digunakan kembali sebagai alat pemasaran penting untuk menarik wisatawan dengan minat khusus dalam bidang *heritage* dan seni.

Wisata peninggalan biasanya mengunjungi situs sejarah atau budaya yang mungkin termasuk *battlegrounds*, tempat-tempat penting sejarah, dan tempat-tempat agama atau sosial-budaya yang penting. Secara umum tujuannya adalah untuk mendapatkan apresiasi terhadap apa yang terjadi pada masa lalu. Sebuah budaya yang unik dan kaya, *heritage* dan seni berkontribusi besar terhadap daya tarik suatu destinasi wisata.

Pariwisata Budaya dan *Heritage* tidak hanya peduli dengan identifikasi, pengelolaan dan perlindungan dari nilai-nilai budaya tetapi juga harus membuat pemahaman tentang dampak pariwisata di masyarakat bahwa sejalan dengan tercapainya tujuan ekonomi dan terjadinya dampak sosial yang positif karena majunya industri pariwisata di wilayah itu, jangan lupa untuk terus melindungi situs budaya dengan menyediakan sumber daya keuangan yang cukup.

#### 1) Masjid Po Teumeureuhom Labui

Masjid ini berada di Gampong Labui, Kecamatan Pidie, hanya berjarak 2 km dari Kota Sigli, meskipun berada sedikit kedalam, Masjid ini menjadi favorit para jamaah Masjid.



Gambar 4.11  
Masjid Po teumeureuhom Labui

Bukan saja karena lokasinya yang sangat asri, masjid ini memiliki nilai sejarah yang tinggi. Selain Masjid Modern yang dibangun dimasa kini, juga terdapat Masjid Tuha (Masjid lama) yang memang asal muasal Masjid pada masa lampu.

Yang membuat masjid ini sangat terkenal yakni mimbaranya yang langsung didatangkan dari Cina, pada tahun 1416 Masehi. Selain itu, ditempat tersebut juga terdapat tongkat yang dilapisi emas, tembaga dan kuningan yang merupakan hadiah



langsung dari Sulthan Iskandar Muda. Dikatakan, tongkat tersebut dulunya digunakan sebagai tongkat 'komando' untuk menghimpun kekuatan masyarakat saat hendak berperang.

Kini tongkat tersebut, masih sering digunakan saat khatib hendak khutbah jumat. Tongkat itu, dilindungi dan dijaga oleh pengurus Masjid Labui, secara turun temurun. Sementara fasilitas lainnya, di Masjid itu sudah sangat modern mengikuti perkembangan jaman. Namun, kita masih dapat melihat Masjid yang pertama yang dibangun secara utuh di kompleks Masjid.



## 2) Masjid Po Teumeuruhom Busu

Kabupaten Pidie, salah satu daerah di Aceh yang memiliki Masjid paling bersejarah, salah satunya Masjid Po Teumeureuhom, yang berada di Busu, Kecamatan Mutiara. Masjid ini diklaim sebagai masjid paling bersejarah di Pidie, pasalnya langsung dibangun oleh Sulthan Iskandar Muda. Bahkan, Iskandar Muda langsung menerjunkan Arsitektur kerajaan yakni Ratna Wangsa, untuk membangun Masjid tersebut.



Gambar 4.12  
Masjid Po teumeureuhom Busu

Kini, meskipun sudah berubah bentuk menjadi Masjid modern, karena telah dilakukan dua kali perubahan pada masa Gubernur Ibrahim Hasan dan Bupati Pidie Nurdin Abdurrahman, masih banyak sisa peninggalan bersejarah di tempat tersebut. Antara lain, masyarakat setempat menyebutnya Tapak Sulthan, menurut cerita rakyat itu merupakan salah satu letak kaki sulthan Iskandar Muda pada masa itu, sedangkan sejumlah literasi mengatakan itu merupakan tempat peletakan batu pertama pembangunan Masjid oleh sang Raja.

Selain itu, juga terdapat mimbar lama yang masih dipakai, dikatakan mimbar tersebut berasal dari Kerajaan Mughal, sebuah kerajaan islam yang ada di India.



Dilihat dari bentuk dan ukurannya, mimbar khutbah masjid sangat identic dengan warna dan bentuk karakter India. Ada juga, Kulam gajah, dikatakan demikian karena saat peresmian Masjid, Sulthan yang pergi menggunakan gajah, memarkirkan 'kendaraan' khas kerajaan saat tepat disamping lokasi Masjid ini. Yang masih tersisa lagi, yakni sumur tua yang dibangun bersamaan dengan Masjid Po Temereuhom.

Menuju masjid ini, kita dapat melawati pasar Caleu, pasar Bereunuen, Kota Bakti dan Jabal Ghafur, masing-masing jalur hanya memakan waktu berkisar 15-20 menit menggunakan kendaraan bermesin.

Untuk fasilitas, Masjid di Kabupaten Pidie kini semuanya telah lengkap dengan kamar mandi dan Toilet, sehingga para jamaah dan pengunjung akan sangat nyaman jika mengunjungi Masjid di Pidie. tidak jauh dari lokasi Masjid, kita juga dapat menikmati nikmatnya makanan, seperti rujak khas Pidie, yakni Lincak busu, Kopi Telor atau Boh manoek Weng dan Leumang. Tentu itu akan menambah cerita perjalanan para wisatawan jika ke Masjid Po Teupeumereuhom.

### 3) Masjid Abu Beureueh

Masjid Abu Beureuh, juga merupakan Masjid bersejarah di Pidie, selain orang yang menjadi bagian dari Kemerdekaan Indonesia, pejuang sekaligus Ulama Aceh tersebut juga pernah menjadi Gubernur Militer Aceh dan sangat kharismatik dimata masyarakat.



Gambar 4.13  
Masjid Abu Beureueh

Masjid tersebut berada dipinggiran Jalan Banda Aceh –Medan, tepat di Kota Beureunuen, Mutiara. Masjid ini tidak banyak berubah dari awal pertama dibangun oleh sang pahlawan, ciri khas masa lampau masih sangat Kental dilihat dari luar masjid, dengan ciri khas Masjid masa lampau, hanya sedikit yang berubah yakni kubahnya saja.

Didepan masjid, pengunjung dapat langsung berziarah makam sang ulama. Sementara fasilitas masjid sekarang ini semuanya serba modern, sehingga membuat nyaman para pengunjung dan jamaah. Apalagi, kini telah dibangun Menara besar mirip menara di masjid timur tengah yang sangat indah.

Untuk pengunjung, Masjid tersebut tak diragukan lagi jumlahnya, selain menjadi tempat ‘wajib’ singgah para *traveler* atau pemudik kearah timur dan barat. Kini, Masjid tersebut telah menjadi Masjid agung dan primadona para jamaah untuk beribadah.



#### 4) Masjid Teungku Chik Di Pasi

Kabupaten Pidie memiliki cukup banyak sejarah Islam, hal itu dilihat dari banyaknya Masjid atau tempat ibadah yang dibangun oleh tokoh-tokoh agama Aceh pada masa Sulthan Iskandar Muda. Selain Masjid Po Teupeumerehom Busu, di Kecamatan Mutiara, ada juga Masjid Labui di Kecamatan Pidie, juga ada masjid tua lainnya yang dibangun pada masa Kerajaan Sultan Iskandar Muda antara abad 14 dan 15 Masehi dan masih berdiri kokoh di Gampong Mesjid, Kemukiman Guci Rumpong, Kecamatan Peukan Baro, Pidie.



Gambar 4.14  
Masjid Teungku Chik Di Pasi

Masjid ini akrab disebut dengan Masjid Guci Rumpong Tgk Chik Di Pasie. Menurut sejarahnya, masjid itu dibangun oleh Tgk Syeh Abdussalam bin Syech Burhanuddin, ulama Aceh masa Sultan Iskandar Muda dan lebih dikenal lagi dengan panggilan Tgk Chik Di Pasie, makamnya terletak di Pasi Lhok, Kecamatan Kembang Tanjung.

Masjid hanya berjarak 15 Menit dari Kota Sigli, tentunya masih sangat terjangkau untuk dikunjungi. Dari jejak sejarah yang ditinggalkan di Masjid tersebut dan masih dilestarikan hingga kini, yakni Tongkat Masjid, yang digunakan khatib saat berada diatas mimbar. Ada juga bambu pada masa lampau, yang konon katanya,

bambu tersebut dulu digunakan sebagai “tangga” bagi Muadzin naik ke menara untuk mengumandangkan adzan.

Selain itu, catatan khutbah selama setahun sesuai kondisi bulan juga masih tersimpan didalamnya, salah satu catatannya yaitu, “Jika bulan maulid maka khutbah disampaikan tentang maulid begitu seterusnya.”.

Yang menarik lagi, di sisi masjid terdapat dua guci dan Alquran ditulis dengan tangan (serumbeek), ada juga tempat khalud (suluk) di rumah Tgk Chik di Pasi yang masih terawat sampai sekarang. Dua guci yang terdapat di Masjid Guci Rumpung, hingga kini masih terawat, tentunya guci tersebut memiliki cerita. Dari cerita rakyat kedua guci itu mengalami pecah (rumpung). Hal itu terjadi karena kedua guci pernah saling berbenturan, sehingga pecah mulutnya. Sebab itulah dinamakan guci rumpung. Guci itu tempat menyimpan air dari sumur sejak ratusan tahun lalu. Airnya sampai kini, dipercayakan dapat memberi sesuatu aura positif bagi siapa saja yang membasuhnya.



Begitu banyak sejarah yang dimiliki oleh Masjid tersebut, tentu kondisi masjid tersebut hingga kini masih sangat terawat oleh pengurus masjid. Tentunya sejarah ini akan lebih lengkap jika kita mengunjungi langsung lokasi Masjid sembari melaksanakan ibadah.



## 5) Makam Raja Pedir

Kerajaan Pedir merupakan asal muasal daerah sejak abad ke 14, yang kemudian menjadi Kabupaten Pidie. Bukti adanya kerajaan tersebut yakni, dengan adanya makam Raja Pedir, yaitu Sulthan Ma'aruf Syah, yang berada di Gampong Dayah Klibeut, Kecamatan Pidie, warga disana menyebutnya Cot Kandang, hal itu karena posisi letak makam itu berada diatas ketinggian.



Gambar 4.15  
Makam Raja Pedir

Menuju lokasi tersebut, kita hanya membutuhkan waktu 10 menit dari Kota Sigli, menggunakan kendaraan bermotor. Tidak ada perubahan yang signifikan di kompleks pemakaman tersebut, hanya kompleks makam yang dibatasi oleh pagar semi permanen yang pernah dibangun oleh Pemerintah. Selain itu, tidak ada pembangunan lain disediakan oleh Pemerintah ataupun warga dan penjaga makam.

Namun, jika ketempat tersebut, tak perlu khawatir, komunitas Blangong Tanoh, satu-satunya komunitas pecinta sejarah di Pidie siap mengantarkan para pengunjung jika ingin melihat dan mencari informasi lebih dalam tentang Kerajaan dan Raja Pedir, ada juga warga yang juga menjaga makam tersebut siap menerima pengunjung dengan sejuta kearifan masyarakat Pidie.

Satu-satunya hal yang pantas untuk dikunjungi, bahwa makam tersebut adalah seorang Sulthan yang memiliki nilai sejarah, baik bidang agama dan kedaulatan

rakyat. Sulthan Ma'aruf Syah, wafat pada malam ahad, 22 jumadil akhir 917 H atau 14 september 1511 M, sebulan setelah Portugis menyerang Malaka pada 10 agustus 1511 M dan Malaka jatuh ke tangan bangsa Kristiani 24 agustus 1511, sebuah kerugian besar yang di derita bangsa-bangsa Islam di Timur pada permulaan abad ke-16.

Beliau merupakan salah satu Sulthan yang sangat gigih dalam berperang dan mendakwahkan islam pada masa lampau. Menarik lainnya, makam tersebut terbuat dari nisan yang berasal dari Samudra Pasai, adapaun gelar Ma'aruf Syah merupakan gelar untuk raja atau pemimpin Kebaikan oleh orang Aceh.

Dilokasi makam setidaknya terdapat empat nisan yang artinya ada empat keturunan raja yang dikuburkan ditempat tersebut, seluruhnya dari kerajaan Pedir, yang kini menjadi cikal bakal Kabupaten Pidie. Kekuatan sejarahnya yang mengharuskan kita mengunjungi makam para wisatawan, apalagi bagi wisatawan yang haus akan sejarah dan arkelogi, lokasi Makam Raja Pedir merupakan hal yang wajib dikunjungi.





#### 6) Kupiah Riman

Kupiah Riman, penutup Kepala khas masyarakat Pidie. Penutup Kepala (Peci) yang sering digunakan oleh bangsawan Aceh tersebut hanya di produksi di Kemukiman Adan, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie. jaraknya berkisar 15 Km dari Kota Sigli.



Gambar 4.16  
Kupiah Riman

Pada awalnya Kupiah ini terbuat dari Pohon Riman, sehingga disebut dengan Kupiah Riman, seiring dengan langkanya pohon tersebut, bahan dasar peci itu kini terbuat dari pelepah pohon aren yang kemudian terbentuk seperti benang-benang kasar.

Kupiah ini tak dapat dibuat menggunakan Mesin dan hanya dapat disulam menggunakan tangan para pengrajin. Setiap kupiah, bisa selesai disulam 10 hingga 30 hari, tergantung tingkat kerumitan, sebab itulah peci tersebut mahal dan sangat elegan jika dipakai oleh masyarakat.

Yang membuat Kupiah Riman, sangat special adalah peci tersebut hanya diciptakan di Kabupaten Pidie dan hanya di Mukim Adan, tidak semua masyarakat di

daerah Pidie dapat membuat Kupiah Riman, selain sebagai kupiah para bangsawan dan Ulama pada masa lampau.



Jadi, jika kita menggunakan kupiah yang satu ini, jelas elegan dan eksklusifnya penutup kepala kita, selain memiliki nilai yang tinggi, juga memiliki ciri khas yang jelas dan identik asal muasalnya. Sehingga, jika ingin berkunjung ke Pidie, tidak elok jika tidak memiliki Kupiah yang satu ini sebagai cinderamata khas daerah.



## 7) Kupiah Meukeutop

Kupiah Meukeutop berasal nama dari Kupiah Tungkop. Mengapa demikian, karena penutup dengan corak warna khas Aceh tersebut, yakni, merah, kuning, hijau dan hitam tersebut, diproduksi pertama oleh warga dari Gampong (Desa) Rawa Tungkop, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie.

Kupiah yang satu ini, berbeda dengan Kupiah Riman, meskipun sama-sama berasal dari Pidie. Kupiah Tungkop atau Meukeutop, merupakan penutup kepala khas yang dipakai oleh Raja dan bangsawan serta masyarakat Aceh yang berperang melawan musuh pada masa kerajaan dan peperangan dengan Belanda.

Kupiah ini kemudian sangat terkenal saat dipakai oleh Pahlawan Kemerdekaan Indonesia, yakni Teuku Umar dan pahlawan peperangan Aceh lainnya seperti Panglima Polem.



Gambar 4.17  
Kupiah Meukeutop

Kini, kupiah tersebut sering dipakai pada acara adat pesta perkawinan masyarakat Aceh. Sebagai para pecinta sejarah dan aktifis Aceh, juga sudah mulai menjadikan kupiah Meukeutop sebagai lambang kebanggaan Aceh dan dipakai saat bepergian ketempat dan acara resmi dan non resmi.

Jika ingin melihat pengrajin Kupiah Meukeutop, kita bisa langsung menuju Desa Rawa Tungkop, disana kita dapat juga ikut menjadi pengrajin bersama warga setempat. Kupiah yang satu ini juga disulam menggunakan tangan, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit Kupiah juga dapat mencapai 10 hari.

Motif yang unik, ditambah sulaman tangan dan ciri khas warna keacehan dari kupiah yang satu ini, tentu sangat rugi bagi kita jika tidak memilikinya, apalagi jika sudah pernah ikut serta langsung dengan para pengrajin.

Dikarenakan perkembangan global dan industry yang terus berkembang pesat, sehingga diperlukan inovasi dan kreatifitas, para pengrajin kupiah Tungkop, juga sudah mengembangkan motif khas menjadi barang lainnya, seperti scrافت, tas dan dompet sampai gelang, tetap dengan mengedepankan motif khas Tungkop yang sangat keacehan tersebut.

Jika para pengunjung tak sempat mengunjungi Pidie melihat langsung para pengrajin, Kupiah Tungkop kini juga sudah dipasarkan hingga keluar Aceh dan luar Negeri dan mudah didapatkan dipusat souvenir daerah di masing-masing kota. Tentu, Kupiah Tungkop atau Meukeutop, juga masuk dalam souvenir yang wajib dibawa pulang jika ke Aceh.



### 3. Wisata Kuliner

Wisata kuliner adalah suatu aktivitas wisatawan untuk mencari makanan dan minuman yang unik dan mengesankan. Dengan kata lain bahwa wisata kuliner bukan semata-mata keinginan untuk mencicipi nikmatnya makanan, tetapi lebih penting adalah keunikan dan kenangan yang ditimbulkan setelah menikmati makanan tersebut. Berbicara tentang keunikan, Kabupaten Pidie terkenal akan beragam makanan enak dan juga unik, dan kemampuan memasak orang Pidie telah diakui seluruh Provinsi Aceh, lihat saja di setiap pasar yang menjual makanan di seluruh wilayah Aceh pasti terdapat orang yang berasal dari Pidie yang membuka tempat makan.

#### 1) Mie Caluek Grong-Grong

Jika kita ke suatu tempat yang tak biasa kita kunjungi, tentu tak asik jika tidak mencicipi kuliner yang menarik ditempat itu. Begitu juga di Aceh, khususnya jika kalian ke Pidie. Seakan tak habisnya gejolak rasa setiap lidah yang mencicipi panganan Aceh, khususnya Kabupaten Pidie, salah satunya yang paling terkenal, Mie Caluek Grong-Grong. Caluek dapat diartikanocol.



Gambar 4.18  
Mie Caluek Grong-grong

Sebenarnya panganan ini tampak biasa, bedanya dengan Mie Aceh lainnya, sangat kontras terletak pada bahan pelengkap. Dalam setiap bungkus mungil Mie

Caluek Grong-Grong adanya kacang merah, tempe, tahu dan bahkan jengkol yang telah dimasak gulai yang menghasilkan aroma kelezatan cita rasa nan gurih, ditambah lagi dengan sayur-sayuran khas makanan melayu dan urap.

Untuk dapat menikmati penganan unik dan mungil tersebut, kita cukup mengendari kendaraan selama 10 menit dari Kota Sigli, menuju Arah Banda Aceh – Medan, tepatnya di Pasar Grong-Grong, letaknya juga sangat strategis di pinggiran jalan Nasional.



Hal yang membuat Mie Caluek Grong-Grong semakin unik yakni tidak melayani makan di tempat. Jadi, jangan heran dan tetap sabar, jika antriannya panjang. Wisatawan harus bawa pulang atau mencari lapak sendiri. Tak perlu khawatir juga, karena di pasar Kecamatan Grong-Grong, juga memiliki banyak tempat yang dapat dijadikan lokasi beristirahat, baik pengunjung dari arah barat Kabupaten Pidie ataupun sebaliknya.



## 2) Kupa Boh Manoek Weng (Kopi Telor)

Pelesiran ke Pidie akan terasa tidak sempurna jika tak pernah mencicipi kopi telur penuh kenikmatan yang khas.



Gambar 4.19  
Kupa Boh Manoek Weng

Langsung saja kita menuju ke Gampong Meunasah Raya Lameu, Kecamatan Sakti. Menggunakan motor, dapat kita tempuh perjalanan dari Kota Sigli menuju Lameu hanya memakan waktu sekitar 20 menit. Akses kesana pun sudah terbilang lancar. Selain itu, suasana perkampungan disana masih sangat asri dan suguhan panorama hamparan sawah dengan *background* pegunungan Tangse dan Geumpang yang tampak membiru nan gagah menantang angkasa.

Pondok-pondok beratap daun rumbia yang berukuran 1, 5 meter persegi sudah menunggu dengan sangat rimbun nan syahdu, ditambah lagi dengan suguhan kopi telur kocok yang telah menyita segenap rasa. Kopi telur yang satu ini juga langsung diracik oleh Bartender yang sudah memiliki pengalaman selama 20 tahun.

Ditemani makanan pendamping yakni, Leumang Pidie, dibawah pondok bak terasa pinggiran sawah, tentunya menambah cita rasa kearifan lokal dan tentunya tidak akan ada di Kota-Kota besar.

### 3) Lincih (Rujak) Busu

Lincih atau Rujak Busu, salah satu kuliner andalan yang wajib dirasa saat sudah menginjak tanah Pidie. Lincih merupakan bahasa Aceh, artinya rujak. Namun, rujak yang satu ini memiliki rasa yang khas, sehingga tak mudah untuk dilupakan. Meskipun bahan dasarnya hampir sama dengan rujak lainnya, yakni buah-buahan segar yang telah dicincang dan ditaburi bumbu kacang yang telah dicampuri manisan aren.

Lincih Busu, begitu masyarakat Kabupaten Pidie menyebutnya, terletak di Busu (salah satu nama gampong di Pidie), Kecamatan Mutiara. Lokasi juga tak jauh dari Sigli, hanya butuh waktu 15 – 25 menit, menuju Kota Beureunuen dan memilih jalur kanan saat melewati Mesjid Rambayan, Kecamatan Peukan Baro. Tempatnya juga



sangat sederhana dan tetap mempertahankan kearifan lokal, tapi yang membuat lokasi ini sangat menarik, dikarenakan berada diantara sawah dan sungai kecil, hingga menambah rasa khas Gampong di lidah.

Gambar 4.20  
Lincih Busu

Tempat yang bersih serta pelayanan yang maksimal, menjadikan lokasi lincih busu, meski berada di pedesaan, tetap menjadi lokasi favorit wisatawan lokal yang menyukai kuliner. Selain itu, selain sangat viral disemua kalangan masyarakat, Lincih Busu juga memiliki nilai jual yang merakyat.





#### 4) Ikan Keureulieng Tangse

Langkah kaki seakan tak bisa diam, ada saja tempat yang harus dikunjungi setiap wisatawan yang berwisata di kabupaten penuh adrenalin sejarah, Pidie. Kulinernya pun luar biasa enak, kali ini saya akan mengajak anda untuk menelusuri daerah dataran tinggi di kabupaten Pidie yaitu Tangse, Manee dan Geumpang.



Gambar 4.21  
Ikan Keureulieng

Jika ke daerah tersebut, tak akan lengkap jika belum mencicipi Kuah Asam Keeueng (Asam Pedas) dengan ikan Keureuling atau ikan Jurung yang ada disepanjang DAS (Daerah Aliran Sungai) Tangse dan Geumpang. Ikan yang menjadi Ikon kuliner Tangse tersebut, akan sangat enak dinikmati setelah kita melaksanakan aktifitas *outdoor*, apalagi di kawasan tersebut memiliki sejuta lokasi wisata alam yang memiliki potensi luar biasa.

Hal yang menjadikan ikan Keureulieng Tangse, sangat fenomenal yakni akan tidak sempurna rasanya jika dimasak menggunakan air dari DAS lain selain Tangse dan Geumpang. Hal tersebut juga dibenarkan oleh sejumlah pendatang yang pernah merasakan kelezatan Asam Keueung Keureulieng.

Jika ingin, merasakan ikan tersebut, tak perlu susah payah. Hampir semua rumah makan di Tangse dan Geumpang, menyediakan menu ikan tersebut. Selain itu, jika beruntung, saat melewati Jalan Nasional Beureunuen – Meulaboh (Aceh barat), kita dapat membeli langsung pada penangkap ikan lokal.

## 5) Mie Sure Laweung

Bagi yang pernah ke Laweung atau Kecamatan Muara tiga, Kabupaten Pidie, tentu pernah merasakan nikmatnya makanan khas dan Wajib bagi pendatang di Dermaga Ujoeng Pie, yaitu Mie Sure atau Mie ikan Tuna. Tentu ikan tuna ditempat tersebut langsung dari dermaga dan nelayan, yang kualitas ikannya masih sangat segar.

Mie Sure di Ujong Pie, jauh sekali berbeda dari mie ikan ditempat lain di Aceh, selain lebih pedas, rasa bumbu yang sangat kental dan tanpa bau atau rasa pesing dari ikan Tuna itu sendiri. Hal tersebutlah, yang membuat Mie ditempat tersebut selalu membuat antri para pelanggan yang datang.



Gambar 4.22  
Mie Sure

Uniknya, Mie Sure Ujoeng Pie tidak menggunakan Mie Aceh, melainkan mie instan, tapi tetap memakai bumbu khas Aceh yang kaya akan rempah-rempah. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati indahnya pantai Ujong Pie yang masih kaya akan kearifan lokal pelaut Aceh dari masa ke masa.

Area di kawasan tersebut juga sangat luas, baik tempat bersantai dan parkir kendaraan. Warga disekitar tempat sangat menghormati setiap tamu yang berkunjung kedaerah mereka. Ciri khas, masyarakat Pidie pada umumnya, ramah dan murah senyum.

Sebuah dermaga Ujong Pie dan jejeran kapal nelayan tradisional juga menjadi daya tarik tersendiri jika ingin mengunjungi daerah itu. Sembari menunggu antrian mie sure, menikmati laut dan angin sore di Ujoeng Pie adalah bonus yang sangat luar biasa. Hingga, meskipun memiliki jarak 40 menit dari Kota Sigli, Mie Sure tetap akan memanggil kita untuk kembali lagi mencicipinya.



#### 6) Apam (Serabi) Pidie

Apam merupakan makanan jenis serabi, makanan yang satu ini juga mudah ditemui tempat lain di Indonesia. Namun, Pidie memiliki Apam dengan khasnya sendiri. Selain lebih tebal dan gurih dari varian serabi lainnya di Aceh, Apam Pidie sangat viral ketika berlangsungnya khanduri atau syukuran pada bulan Rajab.



Gambar 4.23  
Apam Pidie

Bicara Apam Pidie, tak hanya bicara tentang kuliner saja. Karena di Pidie, bicara Apam juga bicara tradisi dan budaya yang telah ada sejak lama. Bagi para Wisatawan yang ingin berkunjung ke Pidie, bulan Rajab dapat menjadi pilihan menarik. Karena, pada bulan tersebut, di Pidie terdapat atraksi budaya Khanduri Apam yang diselenggarakan hampir seluruh Kecamatan yang ada di Pidie.

Uniknya dalam, tradisi tersebut, kita dapat langsung menikmati rasa gotong royong dan kearifan lokal masyarakat Pidie, dalam memuliakan tamu serta pihak asing yang melihat tradisi tersebut, tentu juga dapat mencicipinya langsung.

Bagi yang tak sempat datang pada bulan Rajab, tak perlu khawatir. Warong kuliner Pidie yang terdapat di pasar Peukan Baro (Lampoh Saka), sekitar 7 menit dari Kota Sigli, tetap menyediakan kuliner khas Apam Pidie, setiap hari.

Bicara rasa, tentu Apam Pidie memiliki kekhasan tersendiri, selain bercampur dengan Kuah Tuhe, rasa gurih dan Bangoe pada serabi tersebut, menjadikan Apam Pidie lebih terkenal dari kuliner serabi lainnya di Aceh.





## 7) Emping Melinjo

Emping Melinjoe atau di Aceh sebutannya Keurupuk Mulieng. Jika ke Aceh, paling banyak ditemukan di Pidie, sangking banyaknya Kabupaten Pidie dijuluki dengan sebutan Negeri emping Melinjo.



Kerupuk Mulieng kini dipasarkan hingga keluar Negeri, jika ke Pidie, pusat pemasarannya ada di Kota Beureunuen, Mutiara. Disana kita dapat menjumpai deretan toko yang menjual secara eceran Emping melinjo yang siap edar.

Jika mau lebih menarik lagi, kita dapat meninjau langsung tempat pembuatan Kerupuk Emping

Melinjo di kawasan Paloh, Teubeng, Adan, dan masih banyak daerah lainnya. Lokasinya juga dapat dipilih, jadi tak akan sulit jika ingin menemukan pembuat atau membeli langsung emping Melinjo. Cukup 10 menit dari kota Sigli, banyak *home industry* yang memproduksi kerupuk Mulieng.

Kerupuk Emping Melinjo, baik dimakan menemani makan besar kita, tapi tak jarang juga warung Mie Aceh, wajib menggunakan emping tersebut untuk memperkaya rasa mie yang disuguhkan kepada pelanggan. Untuk kesehatan, Emping juga bagus untuk penyakit jantung.



Gambar 4.24  
Emping Melinjo

#### 8) Adee Kembang Tanjong

Makanan khas lainnya dari Pidie yaitu Adee, kue basah ini berasal dari Kecamatan Kembang Tanjong. Kue ini sangat digemari oleh masyarakat, selain bentuknya yang unik, rasanya juga manis dan sangat berasa di lidah.

Menikmati kuliner ini lebih enak jika ditemani dengan segelas kopi Aceh. Kue tersebut juga ada dua jenis, yakni Adee Ie Leubeu dan Adee Kembang Tanjong. Bedanya, Adee Ie Leubeu, kecil dan dilipat-lipat mirip kerang, sementara Adee Kembang Tanjong lebih besar dan tebal tanpa lipatan.



Gambar 4.25  
Adee Kembang Tanjong

Mengenai rasa, keduanya memiliki rasa khas makanan Aceh yaitu manis, walau lengit tapi rasanya selangit. Dengan rasa khas dibalut aroma asap kayu bakar, hingga menciptakan kesan makanan pedesaan.

Kue ini banyak dijumpai di pasar tradisional Kota Sigli dan pasar Kecamatan Kembang Tanjong. Kini, kue itu juga telah dijual oleh pedagang keliling dan biasa dijumpai di perkantoran dan warung kopi.



#### 4. Wisata Bahari

Poros maritim dunia yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) mestinya diartikan sebagai meningkatnya daya tarik global terhadap sumber daya kelautan Indonesia serta bertambahnya peran kelautan dalam ekonomi global.

Daya tarik global terhadap wisata bahari kita sangatlah beralasan, mengingat keindahan bentang alam dan keanekaragaman hayati laut Indonesia sangatlah potensial menjadi destinasi bagi wisatawan mancanegara (wisman). Panjang garis pantai 42,9 kilometer sudah menggambarkan besarnya potensi tersebut.

##### 1) Pantai Mantak Tari

Pantai mantak tari, terletak di Gampong Mantak Raya, Kecamatan Simpang Tiga, Pidie. pantai pinggiran selat malaka ini berjarak sekitar 10 km dari Kota Sigli, atau 10 menit perjalanan menggunakan kendaraan bermotor.



Gambar 4.26  
Pantai Mantak Tari

Pantai mantak Tari kini merupakan pantai yang paling favorit pilihan keluarga untuk berakhir pekan, disamping sangat dekat dengan wilayah Kota. Selain itu, pasir hitam sebagai ciri khas pantai di Pidie, dipercaya juga dapat menyembuhkan sejumlah penyakit kulit, sehingga pantai itu menjadi pilihan utama warga berekreasi dan berobat alami. Selain itu, pantai mantak tari juga memiliki nilai sejarah sebagai

garis pertahanan portugis dan belanda pada masa peperangan Aceh, ditandai dengan banyaknya benteng pertahanan laut yang dibangun sepanjang garis pantai.

Pantai ini, saban pekan dikunjungi oleh banyak pengunjung dari berbagai daerah di Pidie dan luar Pidie. Fasilitas seperti tempat ibadah, gazebo peristirahatan dan fasilitas Swafoto yang dibangun Pemkab Pidie, menambah elegannya pantai tersebut, sehingga ramai dikunjungi.





## 2) Pantai Pelangi

Pantai pelangi merupakan nama baru, era milenial. Pada masa Belanda menguasai Aceh, namanya adalah *Heaven van Sigli*, kemudian di masa konflik Aceh menjadi *Lhok boom* atau Kuala Bom. Pasca damai, nama tersebut di Qanunkan menjadi Pantai Wisata Pelangi.

Lokasinya tepat berada di pusat Kota Sigli, tepatnya di depan Meuligoe Bupati Pidie. Kini pantai tersebut telah tertata lebih menarik dari sebelumnya, dengan Tulisan khas Pantai Pelangi di pinggiran pantai. Lokasi tersebut, kini menjadi tempat paling favorit masyarakat Sigli, untuk menghabiskan waktu sore dan ramai dikunjungi saban pagi pada akhir pekan.



Gambar 4.27  
Pantai Pelangi

Menariknya lagi, tak jauh dari lokasi destinasi wisata pantai pelangi, terdapat Monumen Tsunami Aceh, yang dibangun diantara Meuligoe Bupati dan Wakil Bupati Pidie. Monumen tersebut mencatat nama-nama korban musibah tsunami di Kabupaten Pidie pada 2004 silam.

Tentunya tak hanya itu, sepanjang pantai wisata terdapat jajanan khas dan lokasi bersantai keluarga dengan beragam konsep café dan warung kuliner. Disamping itu, juga terdapat taman bunga milik Pemkab Pidie yang berdekatan dengan lokasi para nelayan tradisional memarkirkan perahu atau boat mereka, sehingga kita dapat melihat langsung aktifitas kearifan lokal para nelayan Pidie dari jarak dekat. Intinya, wisatawan yang ingin menghabiskan waktu sorenya, Pantai Wisata Pelangi adalah lokasi yang harus dikunjungi.



### 3) Pantai Benteng

Pantai Benteng hingga ke pantai Lancang juga merupakan kawasan pantai yang favorit bagi keluarga dan pemuda di Pidie, selain memiliki banyak nilai sejarah, pantai ini sama halnya dengan pantai Mantak Tari, bukan pasir putih melainkan pasir hitam yang diklaim mengandung bijih besi. Namun, laut tersebut tergolong laut yang masih aman jika melakukan pamandian bersama keluarga dan kerabat.



Gambar 4.28  
Pantai Benteng

Pantai yang berada di pinggiran Kota Sigli ini, memiliki ciri khas sederetan Benteng Portugis yang masih tersisa, bagian dari sejarah Aceh yang perlu diketahui. Selain itu, hutan cemara dan hutan Pandan Berduri, membuat Pantai Benteng lebih adem dan asri. Apalagi, setiap pagi banyak nelayan yang menjaring Pukat tradisional. Tak hanya melihat, pengunjung juga diperbolehkan ikut menjadi nelayan bersama mereka, dimana hasil tangkapan juga akan dibagi bagi mereka yang ikut serta didalamnya, sebagai kearifan lokal para pelaut dan nelayan.

Tak jauh dari kawasan pantai, terdapat juga pemandian air tawar dan wahana permainan buatan untuk keluarga. Para pengunjung juga tak perlu takut akan haus dan lapar setelah mandi laut atau melakukan aktifitas pantainya, karena dilokasi tersebut juga terdapat café milik warga. Dikawasan pantai juga pengunjung dapat melihat langsung proses pembuatan garam secara tradisional oleh masyarakat Gampong Lancang.



Gambar 4.29  
Pembuatan Garam



Gambar 4.29  
Pembuatan Garam

#### 4) Pantai Lhok Man-Buni

Dari sekian banyak pantai di Kabupaten Pidie, mungkin Pantai Lhok Man-Buni, yang berada di Gampong Kulee, Kecamatan Bate, dapat diklaim sebagai salah satu pantai terindah di Pidie. pasalnya pantai yang berbentuk teluk tersebut memiliki karang dan sangat cocok buat Snorkling, layaknya pantai di Sabang. Meskipun pasirnya bukan pasir putih, tapi karang dilokasi tersebut layak untuk dinikmati.



Gambar 4.30  
Pantai Lhok Mon-Buni

Selain itu, pantai ini juga memiliki tebing-tebing karang yang sangat indah. Namun, pantai ini masih sangat jarang dikunjungi oleh wisatawan, karena tempatnya yang menjorok kepedalaman, meski telah memiliki jalur darat, namun jalurnya masih dipadati semak belukar, sehingga sedikit ekstrim jika dilewati menggunakan roda empat, tapi masih nyaman jika menggunakan roda dua.

Adapun, pintu masuk lhok Man-Buni tidak jauh dari pintu masuk Goa Tujoeh, menempuh waktu sampai ke lokasi pantai berkisar 15 menit. Tapi, tak perlu khawatir, pengunjung juga dapat menempuh jalur laut, menggunakan speed boat milik nelayan, tentunya dengan bayaran yang lebih tinggi. Jalur laut akan langsung mengantarkan kita menuju teluk pantai, hanya memakan waktu sekira lima menit dari pelabuhan nelayan Kule. Pengunjung juga bisa menggunakan *Guide* masyarakat setempat guna menjamin keamanan dan kenyamanan berwisata.

Untuk kesiapan air tawar, kalian juga tak perlu khawatir, karena hanya berjarak 10 meter dari bibir pantai, kita langsung mendapatkan sumber air tawar dan dapat dimasak untuk diminum.

Karena masih sangat jarang dikunjungi, kecuali para pemancing ikan, pantai tersebut belum memiliki fasilitas apapun dari pemerintah, sehingga pengunjung disarankan untuk menyiapkan perlengkapan wisatanya dari mulai keberangkatan.

Untuk kesiapan air tawar, kalian juga tak perlu khawatir, karena hanya berjarak 10 meter dari bibir pantai, kita langsung mendapatkan sumber air tawar dan dapat dimasak untuk diminum.

Karena masih sangat jarang dikunjungi, kecuali para pemancing ikan, pantai tersebut belum memiliki fasilitas apapun dari pemerintah, sehingga pengunjung disarankan untuk menyiapkan perlengkapan wisatanya dari mulai keberangkatan.

Untuk keindahan, tak diragukan lagi, jika malam hari pengunjung dapat langsung melihat gugusan bintang yang bertaburan dilangit. Pagi hari, matahari terbit siap memanjakan mata dan kamera para wisatawan. Selain itu, gugusan tebing yang terbentuk dari bebatuan juga menambah eksotisme pantai Lhok Man-Buni.





## 5. Wisata Olahraga dan Rekreasi

### 1) Geudeu-Geudeu

Geudeu-Geudeu, berasal kata dari *Due-Due* atau menunduk, pertarungan dibalut tradisi dan budaya ini, berasal dari dari Kabupaten Pidie. Geudeu-Geudeu adalah sebuah pertarungan sejenis gulat, diselenggarakan di hamparan sawah, setiap pasca panen.

Uniknya, gulat khas Aceh ini dimainkan oleh orang khusus dan berasal dari para petani sawah, tujuannya juga untuk menghibur masyarakat, khususnya para petani yang baru selesai memanen. Di masa lampau, seni bela diri ini, dimainkan pada malam hari, kemudian berubah menjadi siang atau sore hari. Pada masa konflik Aceh, tradisi ini gulat dua versus satu orang tersebut, mulai punah dan kembali ada paska damai Aceh. Tradisi ini tidak menggunakan bantuan magic, hanya beralaskan jerami sebagai alas pelindung tubuh ketika terjatuh.



Gambar 4.31  
Geudeu-geudeu

Geudeu-geudeu, bukan hanya bicara seni bela diri, tapi setiap gerakan yang dimainkan memiliki makna dan arti dalam sejarah serta watak dan kebiasaan masyarakat Pidie, sehingga Gulat ini, jika ditonton tentu otomatis akan menggerakkan penonton juga ikut mencobanya. Namun, jangan mengaitkan bela diri ini yang satu ini

dengan mistis, karena semuanya dilakukan dengan nyata, sehingga tak heran dalam setiap pertandingan pasti ada yang terluka dan cidera.

Di Pidie, tradisi ini masih sering dilaksanakan di Kecamatan Indra jaya, Peukan Baro dan Simpang Tiga. Sejak dibangun kembali oleh Komunitas Cerita Pidie pada 2017 lalu, kini Pemkab Pidie telah menjadikan tradisi ini kedalam Event Budaya tahunan. Pada 2019, Festival Geudeu-Geudue di selenggarakan di Kecamatan Simpang Tiga dan telah didaftarkan kedalam 100 event wisata dan budaya Aceh setiap tahun.





## 2) Teut Budee Trieng (Meriam Bambu)

Tradisi ini yang satu ini juga tak kalah unik dan asiknya jika kita mengunjungi Kabupaten Pidie. Festival Budee Trieng Pidie, acara tahunan yang dilaksanakan saban lebaran Idul Fitri ini, sangat berpengaruh pada masyarakat Pidie. Mengapa tidak, perang meriam Bambu (Budee Trieng) antar Gampong (Desa) tersebut, dapat mendatangkan pengunjung hingga 10 ribuan, hingga pada pelaksanaan kegiatan, tak heran semua daerah yang melaksanakan tradisi tersebut akan tertimpa kondisi macet. Tradisi ini awalnya dilakukan untuk menyambut hari raya Idul Fitri oleh masyarakat Pidie, sebelumnya tradisi ini dilaksanakan hampir seluruh Desa di Pidie. namun, karena panasnya konflik Aceh, tradisi ini sempat menghilang sampai damai Aceh datang 2005 silam.



Gambar 4.32  
Teut Budei Trieng

Uniknya, tradisi Teut Budei Trieng, dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat tanpa ikut campur Pemerintah dan berlangsung sangat meriah, sehingga dalam pelaksanaan ini, terciptanya masyarakat yang saling membantu dan menyumbang hartanya agar tradisi tersebut sukses.

Jika kita ingin melihat langsung antraksi tersebut, kita dapat melewati kawasan Gampong Pukat, Kecamatan Pidie, Garot Kecamatan Indra Jaya dan Reubeu kecamatan Delima, pada malam kedua hari raya, jaraknya hanya 5 – 20 menit berkendara saat keadaan normal.

### 3) Meugrop

Lebaran di Kabupaten Pidie, seharusnya masuk dalam daftar tempat paling asik menghabiskan liburan hari raya. Selain festival Budei trieng yang menjadi tradisi pada malam kedua lebaran, tentunya pada malam pertama menyambut hari raya Idul Fitri, kita dapat melihat tradisi paling langka se-Aceh, Yakni Tarian Meugroeb.

Meugroeb atau loncat, merupakan seni tari tradisional yang sudah ada sejak masa kerajaan Aceh, tarian tersebut dasarnya merupakan tarian perang, dimana setiap akan melaksanakan peperangan dengan kafir (portugis), bangsa Aceh melakukan tarian Meugroeb sebagai pemberi semangat perang kepada mereka yang akan terjun ke medan.

Kini tarian tersebut masih tetap dilestarikan di Gampong Pulo Lueng Teugha, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie yang berjarak 30 km dari Kota Sigli yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pidie Jaya. Tapi, seni tari ini bukan lagi sebagai tarian perang, melainkan sebagai tradisi menyambut datangnya Idul Fitri.



Gambar 4.33  
Meugrop

Syair yang digunakan juga masih hikayat lama yang digunakan untuk memulai perang, berisikan shalawat dan makna hidup bangsa Aceh yang berpegang teguh dengan Agama Islam.



#### 4) Arung Jeuram

Selain sebagai daerah yang memiliki seribu budaya, Kabupaten Pidie juga memiliki banyak atraksi wisata, terutama wisata Alam. Selain, wisata Tubing, Goa dan *Tracking*, sungai Geumpang menjadi lokasi wisata adrenalin paling favorit di Aceh, yakni *Rafting* atau arung Jeram.

Bertempat di Mane, masih dalam DAS Geumpang, Rafting Pidie merupakan wisata yang wajib dirasakan oleh wisatawan yang berkunjung ke Pidie. Berjarak 2 jam perjalanan dari Sigli, arus liar dan alam yang sangat memukau akan memanjakan mata dan memberikan inspirasi positif kepada setiap wisatawan. Dengan *great* sungai mencapai 3 hingga 4, Mane juga menjadi lokasi utama pada PORA 2022 dan PON 2024 di Aceh untuk olahraga Rafting.



Gambar 4.34  
Arung Jeuram

Tak perlu khawatir, di Mane, terdapat sejumlah operator yang siap mengantarkan pengunjung menikmati deras dan indahnya alam Pidie. selain itu, ditempat tersebut juga tersedia lokasi penginapan dan *camping ground* untuk para wisatawan dengan tingkat keamanan dan kenyamanan yang terjamin.

## 5) Tubing

Tubing merupakan salah satu wahana wisata permainan air yang sedang dikembangkan di Kabupaten Pidie. wisata air yang satu ini awalnya di launching pada Festival Sungai Tangse pada awal 2019, oleh Komunitas Cerita Pidie bekerja sama dengan Kompesta di DAS Meuriam Tangse. Kemudian, permianan wisata arus deras menggunakan ban khusus tersebut, berhasil dikembangkan di DAS Baro, yakni di Sungai Beungga hingga ke Keumala Dalam. Adapun operator tubbing berpusat di Geunie, Gampong Lhok Keutapang, Tangse, jaraknya hanya 40 menit dari Kota Sigli menggunakan kendaraan bermotor, lokasi wisata tersebut ramai dikunjungi setiap akhir pekan, sehingga wisata tubbing hanya dibuka pada akhir pekan saja.



Gambar 4.35  
Tubing

Satu-satunya Operator Tubing di Pidie yakni, Komunitas Cerita Pidie, mulai mengajak warga setempat untuk bersama mengembangkan wisata arus deras tersebut. Hal itu, bertujuan juga untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pariwisata, selain itu melibatkan warga juga dapat memberikan kenyamanan dan keamanan kepada para pengunjung.

Wisata Tubing, dapat dirasakan oleh segala jenis usia, karena sungai Beungga, bukan tergolong sungai yang dalam, hanya saja memiliki arus yang deras, sehingga sangai cocok untuk wisata tubing dan masyarakat secara umum.



Untuk para pengunjung juga tak perlu khawatir, karena wisata yang satu ini sudah dilengkapi dengan keamanan personal pengunjung dan disertai pemandu yang berpengalaman dalam menguasai sungai serta *rescue* yang telah disiapkan oleh operator, ditambah lagi transportasi yang siap antar jemput kepada para pengunjung.

Menariknya, Tubing di Sungai Beungga dan Geunie, menawarkan pemandangan alam yang sangat luar biasa, sehingga siap memanjakan mata serta adrenalin derasnya sungai.



## 6) Festival Sungai Tangse

Festival Sungai Tangse, adalah sebuah event yang pertama kali dilaksanakan oleh Komunitas Peduli Sungai Tangse, Mapala jabal Everst Unigha Sigli dan Komunitas Cerita Pidie pada tahun 2019. Event besar ini terdiri dari Sekolah sungai, bakti sosial dan wisata alam dan diikuti oleh seratusan stake holder dari seluruh Aceh, terutama anak komunitas sungai dibawah balai Sungai Sumatera I dan komunitas penggiat alam dan lingkungan.

Dalam event ini, pendidikan lingkungan dan penanaman adalah hal yang wajib dilaksanakan, dengan tujuan utama untuk menyadarkan masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia yang peduli akan pentingnya menjaga lingkungan. Selain itu, event yang hanya dilaksanakan di Tangse tersebut, juga bertujuan untuk mempromosikan alam Tangse, dimana katanya merupakan alam paling eksotis untuk perkembangan wisata Kabupaten Pidie.



Gambar 4.36  
Festival Sungai Tangse



## 6. Wisata Buatan

### 1) Bendungan Pinto Sa Tiro

Bendungan Tiro, merupakan bendungan tertua di Kabupaten Pidie. bendungan yang diresmikan oleh Letjen. Bustanul Arifin, mantan Menteri Koperasi dan Bulog, masa Presiden Soeharto itu juga berasal dari Pidie.

Bendungan tersebut, telah menjadi salah satu lokasi destinasi wisata sejak lama, namun ‘tertidur’ sebentar saat konflik Aceh mulai memanas. Kembali lagi, paska Aceh Damai, bendungan yang mengalir hampir seluruh sektor pertanian Kecamatan Mutira dan Glumpang Baro itu sangat ramai dikunjungi wisatawan lokal setiap akhir pekan.

Sungai yang jernih dan pemandangan masih sangat indah, membuat lokasi itu menjadi favorit melepas akhir pekan. Selain digunakan untuk melakukan gathering family, bendungan Tiro juga tempat untuk bersantai bersama para sahabat dan kerabat.

Pondok-pondok indah yang disediakan warga lokal, dapat menjadi tempat beristirahat sambil menikmati derasnya air dan pemandangan kawasan hutan tropis Tiro. Jaraknya juga tak begitu jauh dari Kota Sigli, berkisar 20-30 menit menggunakan kendaraan bermotor, mengenai akses ke lokasi, juga sudah sangat nyaman dilewati.



Gambar 4.37  
Bendungan Pinto Sa Tiro

## 2) Bendungan Rajui

Bendungan atau Waduk Rajui, terletak di Kemukiman Jok Tanjong, Kecamatan Padang Tiji. Bendungan yang menampung 2, 6 juta kubik air tersebut sejak dibangun pada 2011 lalu belum difungsikan, karena masih dalam Tahap an uji coba. Karena lokasinya diantara pengunungan dan kaki gunung Seulawah Dara, waduk tersebut memiliki panorama alam yang luar biasa, sehingga kini lebih populer sebagai tempat destinasi wisata lokal.



Gambar 4.38  
Bendungan Rajui

Selain itu, masyarakat dan pendatang juga sering memfungsikan waduk yang memiliki kedalaman hingga 30 meter tersebut, sebagai sarana menyalurkan hobi



mancing. Lokasinya juga melewati kawasan perkebunan warga, jaraknya jika dilalui kendaraan dari Banda Aceh, dapat ditempuh dengan waktu sekitar 2 jam dan 15 menit jika dari Kota Sigli. Meski melewati kawasan perkebunan warga, jalan menuju lokasi waduk sangatlah nyaman dilewati.



### 3) Water Park Keumala

Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, Aceh Darussalam, memiliki potensi alam berupa beras, dan air bersih. Kawasan ini juga menyimpan segudang keindahan alam.

Memanfaatkan potensi alam dan didukung masyarakat desa Ugadeng, Zulfikar yang terkenal dengan nama Gam Bang Harun, telah membangun taman rekreasi 'Wahana Park Keumala' di lokasi strategis di kawasan Gle Meulinteung yang



Gambar 4.39  
Water Park Keumala

berdekatan irigasi Keumala. Investasi Zulfikar mulai dilirik pelancong dari kabupaten di luar Pidie.

Di sini, terdapat lima kolam, dua kolam untuk orang dewasa seukuran 9 x 18 meter dengan kedalaman 1, 50 hingga 1, 70 meter, sementara tiga kolam lainnya untuk anak-anak berukuran 3 x 16 meter, 3 x 8 meter dan 8 x 16 meter dengan kedalaman 70 sentimeter.

Menariknya air kolam yang dipakai di sini tidak memakai bahan pewarna air, karena berdekatan dengan sumber, pergantian air dilakukan setelah satu hari dipakai. Selain kolam, fasilitas lainnya yang disediakan di sini ialah 34 unit pondok. Pondok tersebut disekat-sekat seukuran 2 x 3 meter yang letaknya tidak jauh dengan kolam. Wisatawan dapat menikmati pemandangan yang hijau yang terhampar sejauh mata memandang. Mushalla dan sejumlah kamar ganti pakaian juga ada di sana.

#### 4) Water Park Kelapa Satu

Menghabiskan akhir pekan di Kabupaten Pidie tidak hanya harus berkunjung ke daerah pedalaman atau di luar wilayah kota jika ingin sekedar menikmati pemandangan dan permainan air. Ada satu tempat yang seputaran kota Sigli bernama Water Park Kelapa Satu.



Bukan hanya akhir pekan ataupun masa liburan hari raya, saban hari objek wisata buatan Water Park Kelapa Satu ini ramai dikunjungi. Lokasinya di Pantai Sukon yang bisa ditempuh dalam waktu 2 menit dari Kota Sigli, membuat destinasi ini menjadi satu-satunya pilihan

bagi wisatawan yang memang menyukai wahana air.



Water Park Kelapa Satu telah dikelola dengan manajemen yang bagus dan pengaturan tempat yang menarik. Terdapat dua kolam untuk anak-anak dan remaja, dan dua kolam lainnya diperuntukkan bagi orang dewasa. Kesan alami didapat wisatawan dari lesehan-lesehan yang disediakan yang menghadap langsung ke laut pantai sukon.

Gambar 4.40  
Water Park Kelapa Satu



## 4.2 Penduduk Sebagai Potensi SDM Pariwisata

Keterlibatan masyarakat yang dijelaskan meliputi jenis keterlibatan dan tingkat keterlibatannya.

### A. Keterlibatan Masyarakat dalam Pariwisata

Pada dasarnya masyarakat lokal memiliki pengetahuan tentang fenomena alam dan budaya yang ada di sekitarnya, Conyers (1991) dalam Indrayani (2011). Namun, mereka tidak memiliki kemampuan secara finansial yang berkualitas untuk mengelolanya atau terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata yang berbasis alam dan budaya. Sejak beberapa tahun terakhir ini, potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal tersebut dimanfaatkan oleh para pengelola wilayah yang dilindungi dan pengusaha pariwisata untuk diikutsertakan dalam menjaga kelestarian dan biodiversitas yang ada di daerahnya (Al Tabri, 2010).

Masyarakat lokal diharuskan terlibat secara aktif dalam pengembangan pariwisata. Lebih jauh, pariwisata juga diharapkan memberikan peluang dan akses kepada masyarakat lokal untuk mengembangkan usaha pendukung pariwisata seperti toko cinderamata, warung makan, dan lain-lain agar masyarakat lokal memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dan secara langsung dari wisatawan, yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya.

Adapun bentuk partisipasi (keterlibatan) masyarakat dalam pembangunan pariwisata adalah sebagai berikut (Cohen dan Uphof, 1997 dalam file.upi.edu, 2011) :

#### 1) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan

Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pengembangan kepariwisataan bertujuan untuk menggali permasalahan dan potensi pariwisata yang ada di masyarakat, tantangan, serta peluang yang dihadapi dengan menggunakan sumber daya lokal atas prinsip pemberdayaan masyarakat. Adapun acuannya adalah sebagai berikut.

- a) Mengumpulkan informasi yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Bahan informasi dapat digunakan oleh orang lain atau suatu lembaga yang akan mengembangkan objek pariwisata.

- b) Mempelajari kondisi dan kehidupan di lokasi yang memiliki potensi pengembangan pariwisata, dari dan oleh masyarakat setempat untuk saling berbagi, berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta tindak lanjutnya.
- c) Informasi yang diperoleh dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi pariwisata.

Bentuk partisipasi tersebut dilaksanakan oleh pengambil kebijakan bersama masyarakat lokal, kelompok pendamping lapangan, dan dari unsur pemerintah desa. Dalam metode ini kelompok pendamping lapangan hanya sebatas fasilitator.

## 2) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan

Keterlibatan dalam pengelolaan ini maksudnya adalah agar masyarakat tidak hanya menjadi obyek tapi juga berperan selaku subjek sehingga dapat menikmati keuntungan yang optimal dari pengelolaan pariwisata dan dapat menambah sumber pendapatan masyarakat, dari biasanya. Dengan berkembangnya usaha pariwisata berbasis masyarakat, penduduk akan memperoleh pendapatan tambahan sehingga ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam akan berkurang. Untuk mendukung upaya ini hendaknya jadwal operasional usaha pariwisata disesuaikan berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat, agar tidak mengganggu aktivitas rutin masyarakat misalnya tidak mengganggu saat musim panen. Harapan ke depan, keterlibatan/peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata dengan pola pengembangan pariwisata berbasis masyarakat ini adalah agar keuntungan dari usaha pariwisata dapat lebih banyak diterima langsung dan dinikmati oleh masyarakat.

Untuk mencapai harapan ini dapat diterapkan sistem rotasi dalam penyediaan jasa pariwisata. Sistem rotasi dalam hal ini diartikan sebelum pengunjung datang, masyarakat telah mendapatkan informasi tentang kunjungan tersebut sehingga dapat dilakukan pengaturan pembagian penyediaan jasa kepada pengunjung (wisatawan) seperti penginapan, penyediaan makanan, pemandu, dan sebagainya sehingga seluruh masyarakat memperoleh tambahan (Al Tabri, 2010). Tentu pengaturan tersebut harus dikelola dengan baik dengan melibatkan unsur



masyarakat yang berkepentingan. Hasil akhir yang diharapkan nantinya adalah sebagian pendapatan dari kunjungan wisatawan yang datang bisa masuk ke kas desa, dan dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai pembangunan di desa serta kegiatan sosial, pendidikan, dan pemeliharaan lingkungan.

#### B. Tingkat Keterlibatan Masyarakat dalam Pariwisata

Subadra (2009) dalam Al Tabri (2010) menjelaskan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat dalam pariwisata sangat berbeda dan hal ini tergantung dari jenis potensi, pengalaman, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh individu atau masyarakat lokal tersebut. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Menyewakan tanahnya kepada operator pariwisata untuk dikembangkan sebagai objek dan daya tarik pariwisata serta turut memantau dampak-dampak yang ditimbulkan sehubungan dengan pengembangan pariwisata tersebut.
- 2) Bekerja sebagai karyawan ataupun paruh waktu diperusahaan operator pariwisata tersebut.
- 3) Menyediakan pelayanan jasa kepada operator pariwisata seperti: pelayanan makanan, transportasi, akomodasi, dan panduan berwisata (*guiding*).
- 4) Membentuk usahapadungan (*joint venture*) dengan pihak swasta, dimana masyarakat lokal menyediakan lokasi dan pelayanan jasanya sedangkan pihak swasta menangani masalah pemasaran produk dan manajemen perusahaan.
- 5) Mengembangkan pariwisata secara mandiri dengan mengutamakan pengembangan pariwisata berbasis kemasyarakatan (*community-based tourism*).

# 5 INDUSTRI PARIWISATA

## 5.1 Pencermatan Industri Kepariwisataan

Usaha kepariwisataan merupakan hal yang menjadi aspek yang sangat diperhatikan dalam pengembangan kepariwisataan nasional yang diharapkan mampu meningkatkan ekonomi daerah dan masyarakat. Industri kepariwisataan akan menjadi sarana dalam pemberian pelayanan kepada wisatawan dan yang paling utama adalah penyediaan lapangan pekerjaan kepada masyarakat di suatu destinasi pariwisata.

Produk industri yang dianggap tidak pernah habis dipakai adalah pariwisata. Selain tidak merusak lingkungan pariwisata juga dinilai turut mengembangkan budaya kearifan lokal suatu daerah. Industri kepariwisataan akan menjadi sarana dalam pemberian pelayanan kepada wisatawan dan yang paling utama adalah penyediaan lapangan pekerjaan kepada masyarakat di suatu destinasi pariwisata.

Secara nasional industri pariwisata sudah dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan nasional. Hasil perhitungan Kemenpar sampai dengan tahun 2019 ada 13 juta orang yang bekerja dalam sektor pariwisata, jumlah ini meningkat 3, 17 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam hal ini pariwisata adalah penggerak utama penciptaan lapangan kerja atau terhitung 8% dari ketenagakerjaan global. Setiap pekerjaan di sektor pariwisata diperkirakan membuat dua pekerjaan baru di sektor lain. Pariwisata juga mempekerjakan enam kali lebih banyak orang daripada sektor manufaktur otomotif global, empat kali lebih banyak dari sektor pertambangan, dan lebih sepertiga dari sektor keuangan.

Undang-undang Kepariwisataan mendefinisikan industri pariwisata sebagai kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Pada pasal 14 juga disebutkan beberapa usaha, yang termasuk dalam usaha pariwisata :

- ❖ Daya tarik wisata
- ❖ Kawasan pariwisata
- ❖ Jasa transportasi wisata



- ❖ Jasa perjalanan wisata
- ❖ Jasa makanan dan minuman
- ❖ Penyediaan akomodasi
- ❖ Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
- ❖ Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran
- ❖ Jasa informasi pariwisata
- ❖ Jasa konsultan pariwisata
- ❖ Jasa pramu wisata
- ❖ Wisata tirta
- ❖ Spa

Berdasarkan PP. No. 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional bahwa ada beberapa hal yang harus menjadi acuan dalam pengembangan Industri Pariwisata, yang dapat diterapkan di Kabupaten Pidie, acuan pengembangan industri pariwisata adalah sebagai berikut:

- ❖ Penguatan struktur industri pariwisata
- ❖ Peningkatan daya saing produk pariwisata
- ❖ Pengembangan kemitraan usaha pariwisata
- ❖ Penciptaan kredibilitas bisnis dan
- ❖ Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan

Sesuai arahan atau acuan di dalam RIPPARNAS, maka strategi yang harus ditempuh untuk membangun industri pariwisata Kabupaten Pidie antara lain adalah:

**Tabel 5.1**  
**Arahan Pembangunan Industri Pariwisata**

| No. | Arahan                                 | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Penguatan Struktur Industri Pariwisata | <ul style="list-style-type: none"> <li>⬇ Meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;</li> <li>⬇ Memperkuat fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan</li> <li>⬇ Memperkuat mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.</li> </ul> |

|   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata        | <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Mengembangkan manajemen atraksi;</li> <li>✦ Memperbaiki kualitas interpretasi;</li> <li>✦ Memperkuat kualitas produk wisata; dan</li> <li>✦ Meningkatkan pengemasan produk wisata.</li> <li>✦ Mendorong dan meningkatkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;</li> <li>✦ Mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan</li> <li>✦ Mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.</li> <li>✦ Mengembangkan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke Destinasi Pariwisata.</li> </ul> |
| 3 | Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata         | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Memperkuat kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;</li> <li>○ Memperkuat implementasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan</li> <li>○ Memperkuat monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4 | Penciptaan Kredibilitas Bisnis                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Menerapkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;</li> <li>○ Menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik dan</li> <li>○ Mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5 | pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata; dan</li> <li>○ Mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



Strategi-strategi yang telah disebutkan di atas harus dapat dijabarkan ke dalam program-program Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten Pidie yang implementatif dan partisipatif.

## 5.2 Analisis TOWS

Dalam menyusun Arah dalam Kebijakan, Strategi dan Program pembangunan pariwisata di Kabupaten Pidie sebagai bagian dari RIPPARDA dipergunakan analisis TOWS (*Threat, Oportunities, Strenght, Weaknesses*). Konsep TOWS adalah menempatkan posisi masadepan (visi) dengan melihat *Threats* ataupun *Opportunities* hanya sebagai ‘peluang semata’ lalu melihat *Weaknesses* dan *Strengths* kondisi saat ini untuk kemudian menarik garis usaha dengan menghubungkan antara visi dan kondisi saat ini. Analisis ini membagi dua faktor yaitu faktor eksternal dan internal, sehingga bisa merumuskan strategi dari dua faktor tersebut dengan memaksimalkan aspek kekuatan (*Strenght*) dan kesempatan (*Oportunities*) guna meminimalkan aspek kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threat*).

**Tabel 5.2**  
**Matriks Analisis Lingkungan Internal Kepariwisataaan**  
**Kabupaten pidie**

| ASPEK                       | KEKUATAN (STRENGTH)                                                                                                                                                            | KELEMAHAN (WEAKNESS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESTINASI PARIWISATA</b> |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aset dan daya tarik wisata  | Sangat kaya dengan potensi daya tarik wisata alam, bahari, budaya yang berlimpah, khususnya berbasis pada sungai, air terjun, danau dan budaya serta peninggalan sejarah. (S1) | Lingkungan alam dan bahari yang rentan terhadap dampak berbagai kegiatan pariwisata. (W1)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tema pengembangan           | Kental dengan tema alam dan budaya. (S2)                                                                                                                                       | Potensi dan tema wisata yang dikembangkan di berbagai destinasi wisata hampir seragam. (W2)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Struktur pemanfaatan ruang  | Terdapat beberapa potensi untuk kawasan strategis pariwisata dalam tingkat kabupaten. (S3)                                                                                     | Prasarana dan sarana pendukung kepariwisataan yang ada belum memenuhi standar, terutama pusat pelayanan pariwisata skala lokal. (W3)                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aksesibilitas               | Transportasi untuk menuju Kecamatan cukup mudah dicapai, salah satunya dengan memakai angkutan umum (S4)                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>o Aksesibilitas menuju beberapa objek wisata masih kurang baik. (W4)</li> <li>o Prasarana pendukung jalan regional belum tersedia secara sempurna, sehingga banyak wilayah yang perlu dijangkau dengan kendaraan biasa dalam waktu yang relatif lama (minimnya sarana penerangan, dan penunjuk informasi arah jalan). (W5)</li> </ul> |
| Jaringan utilitas           | Sudah terlayani oleh jaringan utilitas(jaringan air bersih, listrik, drainase, sampah)khususnya di Ibu Kota Kabupaten. (S5)                                                    | Jaringan utilitas di destinasi kecamatan belum merata, baik secara kualitas maupun kuantitas. (W6)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sarana penunjang            | Keberadaan sarana/fasilitas penunjang pariwisata yang relative sudah memadai. (S6)                                                                                             | Terbatasnya pengembangan fasilitas pendukung pariwisata, misalnya akomodasi, rumah makan/restoran, souvenir shop. (W7)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mitigasi bencana            | -                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>o Belum adanya penerapan pengelolaan mitigasi bencana, pada sebagian besar daya tarik wisata dan sarana pendukungnya (wisma atau penginapan), misalnya dengan disediakannya jalur dan ruang evakuasi, bangunan</li> </ul>                                                                                                             |



|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>tahan gempa, dll. (W8)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Tidak terdapatnya <i>early warning system</i> pada daerah yang rawan bencana. (W9)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pengelolaan pengunjung            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Relatif belum dikenalnya pengelolaan pengunjung (berupa pembagian zonasi dan pembatasan kunjungan) bagi daya tarik wisata lain yang mempunyai tingkat kerentanan tinggi. (W10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDUSTRI PARIWISATA</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Usaha pariwisata                  | Usaha pariwisata (akomodasi dan rumah makan) cukup memadai di kecamatan Kab. Pidie. (S7)                                                                                                                                                                                              | Belum diterapkannya standarisasi pengelolaan usaha pariwisata secara umum. (W11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dokumen/Rencana kebijakan         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pengendalian dan pengawasan       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>o Belum adanya kebijakan berupa pemberian insentif bagi masyarakat dan swasta yang mau mengembangkan usaha pariwisata secara berkelanjutan. (W12)</li> <li>o Belum adanya penindakan hukum/pemberian sanksi bagi pengelolaan usaha pariwisata yang berdampak negatif terhadap lingkungan. (W13)</li> <li>o Belum disusunnya rencana AMDAL bagi berbagai industri dan usaha pariwisata untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pengembangan dan pengoperasiannya. (W14)</li> </ul> |
| <b>PASAR DAN PEMASARAN WISATA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pasar pariwisata                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Belum adanya studi pasar pariwisata yang lebih mendalam untuk mengetahui karakteristik wisatawan, pola perjalanan, serta preferensi wisatawan. (W15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pemasaran dan promosi             | <ul style="list-style-type: none"> <li>o Upaya pemerintah daerah dalam melakukan promosi pariwisata melalui penyelenggaraan <i>event-event</i> dalam skala lokal dan provinsi. (S8)</li> <li>o Upaya promosi <i>word of mouth</i> dan mengandalkan peran wisatawan sebagai</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>o Masih minimnya upaya pemasaran dan promosi daya tarik wisata yang tepat sasaran. (W16)</li> <li>o Belum ada database terperinci mengenai daya tarik wisata dan fasilitas pendukungnya. (W17)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <i>prosumer. (S9)</i>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Price/harga                | -                                                                                                                                                                                                                                                  | Faktor biaya perjalanan yang tidak jelas nominalnya menjadi kendala bagi calon wisatawan. (W18)                                                                                                                                                                                                                                          |
| Citra destinasi            | Citra Kabupaten Pidie sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki bentangan alam yang luas, dialiri oleh 3 sungai besar di Provinsi Aceh menjadi citra utama destinasi, selain juga peninggalan sejarah dan budaya sangat banyak dan beragam. (S10) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>SDM DAN KELEMBAGAAN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SDM                        | -                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>o Terbatasnya kemampuan SDM yang bergerak di bidang usaha pariwisata. (W19)</li> <li>o Terbatasnya kemampuan dan keahlian penentu kebijakan dalam pengembangan pariwisata. (W20)</li> </ul>                                                                                                       |
| Kelembagaan                | -                                                                                                                                                                                                                                                  | Terbatasnya jumlah kelembagaan yang bergerak di bidang pariwisata. (W21)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kebijakan/dokumen          | -                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>o Dukungan kebijakan pemerintah daerah terhadap sektor pariwisata masih relatif rendah. (W22)</li> <li>o Terbatasnya data dan informasi mengenai aspek pengembangan kepariwisataan (destinasi, industri, pasar dan pemasaran, kelembagaan), dikarenakan ketidaksiapan SDM dinas. (W23)</li> </ul> |
| Rencana                    | -                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Karakter masyarakat        | Karakteristik dan perilaku masyarakat Pidie yang terkenal ramah, menganggap tamu sebagai pembawa rezeki sehingga memantapkan citra Pidie di mata wisatawan. (S11)                                                                                  | Masyarakat setempat yang relatif belum mengenal dan memahami tuntutan industri pariwisata (pemahaman mengenai Sapta Pesona kurang). (W24)                                                                                                                                                                                                |
| Kemitraan                  | Pada daya tarik wisata tertentu sedang diupayakan diterapkannya sistem bagi hasil dari retribusi daya tarik wisata antara pemda dan masyarakat atau pengelola dengan masyarakat. (S12)                                                             | Belum berkembangnya kemitraan dan skema kerjasama antar stakeholder, diantaranya pelibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata yang masih relatif sedikit. (W25)                                                                                                                                                                    |



**Tabel 5.3**  
**Matriks Analisis Lingkungan Eksternal Kepariwisata**  
**Kabupaten PIDIE**

| ASPEK                             | KESEMPATAN (OPPORTUNITY)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANCAMAN (THREAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESTINASI PARIWISATA</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aset dan daya tarik wisata        | <ul style="list-style-type: none"> <li>o Penetapan daya tarik wisata yang mempunyai signifikansi tertentu untuk dijadikan daya tarik wisata unggulan atau bahkan menetapkan Kawasan strategis pariwisata. (O1)</li> <li>o Daya tarik wisata alam dan bahari selalu merupakan daya tarik tertinggi yang dikunjungi wisatawan. (O2)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>o Konflik pemanfaatan ruang kerap terjadi, diantaranya konflik mengenai persepsi pembangunan dan penataan pariwisata bersama dengan masyarakat. (T1)</li> <li>o Ancaman kegiatan lain yang berdampak negatif terhadap daya tarik wisata (misal kegiatan penambangan, penebangan hutan, dll). (T2)</li> <li>o Rentan terhadap ancaman bencana alam (gempa bumi, banjir, sedimentasi, longsor, dll). (T3)</li> </ul> |
| Aksesibilitas                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ketidaksiapan aksesibilitas dalam penyebaran wisatawan dikarenakan kondisi informasi yang kurang baik (belum tertata baik). (T4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pendanaan                         | Faktor pendanaan yang relatif besar (dari pusat, daerah, atau donator swasta) dapat dimanfaatkan bagi pengembangan pariwisata menurut prioritas pengembangannya. (O3)                                                                                                                                                                        | Jika destinasi yang telah di danai tidak di tata serta di dikelola dengan baik, sewaktu-waktu pendanaan bisa dihentikan oleh pusat atau donator swasta. (T5)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sektor penunjang lainnya          | Berbagai komoditas pertanian, perkebunan, perikanan, kuliner dan industri olahan dapat dimanfaatkan dan dikemas sebagai industri pendukung pariwisata. (O4)                                                                                                                                                                                  | Belum digarap secara serius/belum dilihat sebagai komoditas penunjang pariwisata (misal untuk bahan baku souvenir, daya tarik agrowisata, daya tarik wisata kuliner, dll). (T6)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INDUSTRI PARIWISATA</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Usaha pariwisata                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>o Terbukanya kesempatan berinvestasi dalam pengembangan usaha pariwisata. (O5)</li> <li>o Kesempatan memperkenalkan konsep <i>responsible tourism</i>. (O6)</li> </ul>                                                                                                                                | Tidak mampu mempersepsikan di mata publik tentang daya tarik wisata. (T7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PASAR DAN PEMASARAN WISATA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasar pariwisata           | Adanya tren wisatawan yang menginginkan perjalanan wisata alam yang masih alami (O7)                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pemasaran dan promosi      | Tren pemanfaatan teknologi informasi dan <i>geosocial networking</i> bagi pengembangan pariwisata. (O8)                                                                                                            | Belum terlalu siap pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi informasi. (T8)                                                                                                                                                                                                                 |
| Citra destinasi            | Dukungan pemerintah provinsi dalam mengembangkan citra Kabupaten Pidie. (O9)                                                                                                                                       | Citra destinasi dipengaruhi oleh berbagai situasi dalam negeri (bencana alam dll). (T9)                                                                                                                                                                                                           |
| <b>SDM DAN KELEMBAGAAN</b> |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SDM                        | Persaingan yang semakin terbuka menghasilkan kesempatan bagi SDM daerah lain (ataupun SDM internasional) yang lebih kompeten untuk bekerja di sektor kepariwisataan. (O10)                                         | Dikhawatirkan akan mengurangi kesempatan kerja SDM lokal. (T10)                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kebijakan                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>o Keberadaan UU Pemerintah Aceh dapat mendukung pengembangan pariwisata. (O11)</li> <li>o Adanya CSR yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan pariwisata. (O12)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>o Ketidaksinkronan kebijakan berikut implementasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. (T11)</li> <li>o Belum dikembangkannya perizinan satu atap yang mempermudah pengembangan usaha pariwisata. (T12)</li> </ul> |



**Tabel 5.4**  
**Analisis Maxi Mini TOWS**

| Penyusunan<br>RIPPARDA<br>Kabupaten PIDIE<br>Tahun | STRENGTH (KEKUATAN) |                                                                                                     | WEAKNESS (KELEMAHAN) |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | S1                  | Sangat kaya dengan potensi daya tarik wisata alam dan budaya yang berlimpah                         | W1                   | Lingkungan alam dan bahari yang rentan terhadap dampak berbagai kegiatan pariwisata                                                                                                                                                |
|                                                    | S2                  | Kental dengan tema alam dan budaya                                                                  | W2                   | Potensi dan tema wisata yang dikembangkan di berbagai destinasi wisata hampir seragam                                                                                                                                              |
|                                                    | S3                  | Sudah terdapat penetapan Kawasan Strategis Pariwisata                                               | W3                   | Prasarana dan sarana pendukung kepariwisataan yang ada belum memenuhi standar, terutama pusat pelayanan pariwisata skala lokal                                                                                                     |
|                                                    | S4                  | Transportasi untuk menuju Kecamatan cukup mudah dicapai, salah satunya dengan memakai angkutan umum | W4                   | Aksesibilitas menuju beberapa objek wisata masih kurang baik                                                                                                                                                                       |
|                                                    |                     |                                                                                                     | W5                   | Prasarana pendukung jalan regional belum tersedia secara sempurna, sehingga banyak wilayah yang perlu dijangkau dengan kendaraan biasa dalam waktu yang relatif lama (minimnyasarana penerangan, dan penunjuk informasiarah jalan) |
|                                                    | S5                  | Sudah terlayani oleh jaringan utilitas(jaringan air bersih, listrik, drainase, sampah)              | W6                   | Jaringan utilitas di destinasi kecamatan belum merata, baik secara kualitas maupun kuantitas                                                                                                                                       |
|                                                    | S6                  | Keberadaan sarana/fasilitas penunjang pariwisata yang relative sudah memadai                        | W7                   | Terbatasnya pengembangan fasilitas pendukung pariwisata, misalnya akomodasi, rumah makan/restoran, souvenir shop                                                                                                                   |
|                                                    | S7                  | Usaha pariwisata (akomodasi dan rumah makan) cukup memadai di kecamatan Kab. Pidie                  | W8                   | Belum adanya penerapan pengelolaan mitigasi bencana, pada sebagian besar daya tarik wisata dan sarana pendukungnya (wisma atau penginapan), misalnya dengan disediakan jalur dan ruang evakuasi, bangunan tahan gempa, dll         |
|                                                    |                     |                                                                                                     | W9                   | Tidak terdapatnya <i>early warning system</i> pada daerah yang rawan bencana                                                                                                                                                       |

|  |     |                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                         |
|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |     |                                                                                                                                         | W10 | Relatif belum dikenalnya pengelolaan pengunjung (berupa pembagian zonasi dan pembatasan kunjungan) bagi daya tarik wisata lain yang mempunyai tingkat kerentanan tinggi |
|  |     |                                                                                                                                         | W11 | Belum diterapkannya standarisasi pengelolaan usaha pariwisata secara umum                                                                                               |
|  |     |                                                                                                                                         | W12 | Belum adanya kebijakan berupa pemberian insentif bagi masyarakat dan swasta yang mau mengembangkan usaha pariwisata secara berkelanjutan                                |
|  |     |                                                                                                                                         | W13 | Belum adanya penindakan hukum/pemberian sanksi bagi pengelolaan usaha pariwisata yang berdampak negatif terhadap lingkungan                                             |
|  |     |                                                                                                                                         | W14 | Belum disusunnya rencana AMDAL bagi berbagai industri dan usaha pariwisata untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pengembangan dan pengoperasiannya              |
|  | S8  | Upaya pemerintah daerah dalam melakukan promosi pariwisata melalui penyelenggaraan <i>event-event</i> dalam skala lokal dan provinsi    | W15 | Belum adanya studi pasar pariwisata yang lebih mendalam untuk mengetahui karakteristik wisatawan, pola perjalanan, serta preferensi wisatawan                           |
|  | S9  | Upaya promosi <i>word of mouth</i> dan mengandalkan peran wisatawan sebagai prosumer                                                    | W16 | Masih minimnya upaya pemasaran dan promosi daya tarik wisata yang tepat sasaran                                                                                         |
|  |     |                                                                                                                                         | W17 | Belum ada database terperinci mengenai daya tarik wisata dan fasilitas pendukungnya                                                                                     |
|  |     |                                                                                                                                         | W18 | Faktor biaya perjalanan yang tidak jelas nominalnya menjadi kendala bagi calon wisatawan                                                                                |
|  | S11 | Karakteristik dan perilaku masyarakat Pidie yang terkenal ramah, sehingga memantapkan citra Pidie yang ramah dan aman di mata wisatawan | W19 | Terbatasnya kemampuan SDM yang bergerak di bidang usaha pariwisata, sehingga memerlukan pelatihan dalam mengasah skill                                                  |
|  | S12 | Pada daya tarik wisata tertentu sedang diupayakan diterapkannya sistem bagi hasil dari                                                  | W20 | Terbatasnya kemampuan dan keahlian penentu kebijakan dalam pengembangan pariwisata                                                                                      |



|  |  |                                                                                          |     |                                                                                                                                                                        |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | retribusi daya tarik wisata antara pemda dan masyarakat atau pengelola dengan masyarakat | W21 | Terbatasnya jumlah kelembagaan yang bergerak di bidang pariwisata                                                                                                      |
|  |  |                                                                                          | W22 | Dukungan kebijakan pemerintah daerah terhadap sektor pariwisata masih relatif rendah                                                                                   |
|  |  |                                                                                          | W23 | Terbatasnya data dan informasi mengenai aspek pengembangan kepariwisataan (destinasi, industri, pasar dan pemasaran, kelembagaan), dikarenakan ketidaksiapan SDM dinas |
|  |  |                                                                                          | W24 | Masyarakat setempat yang relatif belum mengenal dan memahami tuntutan industri pariwisata (pemahaman mengenai Sapta Pesona kurang)                                     |
|  |  |                                                                                          | W25 | Belum berkembangnya kemitraan dan skema kerjasama antar stakeholder, diantaranya pelibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata yang masih relatif sedikit         |

**Tabel 5.5**  
**Pembobotan Aspek Kekuatan (Strength)**

| QID             | Pernyataan                                                                                                                                                                                                                                  | Strength Rating |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>S-I</b>      | <b>Aspek Destinasi Pariwisata</b>                                                                                                                                                                                                           |                 |
| S-I-1           | Sangat kaya dengan potensi alam di darat, danau dan sungai, serta potensi budaya                                                                                                                                                            |                 |
| S-I-2           | Kental dengan tema alam dan budaya                                                                                                                                                                                                          |                 |
| S-I-3           | Sudah terdapat penetapan Kawasan Strategis Pariwisata                                                                                                                                                                                       |                 |
| S-I-4           | Transportasi untuk menuju Kecamatan cukup mudah dicapai, salah satunya dengan memakai angkutan umum                                                                                                                                         |                 |
| S-I-5           | Sudah terlayani oleh jaringan utilitas(jaringan air bersih, listrik, drainase, sampah)                                                                                                                                                      |                 |
| S-I-6           | Keberadaan sarana/fasilitas penunjang pariwisata yang relative sudah memadai                                                                                                                                                                |                 |
| <b>S-II</b>     | <b>Aspek Industri Pariwisata</b>                                                                                                                                                                                                            |                 |
| S-II-1          | Usaha pariwisata (akomodasi dan rumah makan) cukup memadai di kecamatan Kab. Pidie                                                                                                                                                          |                 |
| <b>S-III</b>    | <b>Aspek Pasar dan Pemasaran</b>                                                                                                                                                                                                            |                 |
| S-III-1         | Upaya pemerintah daerah dalam melakukan promosi pariwisata melalui penyelenggaraan <i>event-event</i> dalam skala lokal dan provinsi                                                                                                        |                 |
| S-III-2         | Upaya promosi <i>word of mouth</i> dan mengandalkan peran wisatawan sebagai prosumer                                                                                                                                                        |                 |
| S-III-3         | Citra Kabupaten Pidie sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki bentangan alam yang luas, dialiri oleh 3 sungai besar di Provinsi Aceh menjadi citra utama destinasi, selain juga peninggalan sejarah dan budaya sangat banyak dan beragam |                 |
| <b>S-IV</b>     | <b>Aspek SDM dan Kelembagaan</b>                                                                                                                                                                                                            |                 |
| S-IV-2          | Karakteristik dan perilaku masyarakat Pidie yang terkenal ramah, sehinggamemantapkan citra Pidie yang ramah dan aman di mata wisatawan                                                                                                      |                 |
| S-IV-3          | diupayakan diterapkannya sistem bagi hasil dari retribusi daya tarik wisata antara pemda dan masyarakat atau pengelola dengan masyarakat                                                                                                    |                 |
| <b>S-I</b>      | <b>Aspek Destinasi Pariwisata</b>                                                                                                                                                                                                           |                 |
| <b>S-II</b>     | <b>Aspek Industri Pariwisata</b>                                                                                                                                                                                                            |                 |
| <b>S-III</b>    | <b>Aspek Pasar dan Pemasaran</b>                                                                                                                                                                                                            |                 |
| <b>S-IV</b>     | <b>Aspek SDM dan Kelembagaan</b>                                                                                                                                                                                                            |                 |
| <b>Strength</b> | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                |                 |



**Tabel 5.6**  
**Pembobotan Aspek Kelemahan (Weakness)**

| QID          | Pernyataan                                                                                                                                                                                                                                  | Weakness Rating |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>W-I</b>   | <b>Aspek Destinasi Pariwisata</b>                                                                                                                                                                                                           |                 |
| W-I-1        | Lingkungan alam dan bahari yang rentan terhadap dampak berbagai kegiatan pariwisata                                                                                                                                                         |                 |
| W-I-2        | Potensi dan tema wisata yang dikembangkan di berbagai destinasi wisata hampir seragam.                                                                                                                                                      |                 |
| W-I-3        | Prasarana dan sarana pendukung kepariwisataan yang ada belum memenuhi standar, terutama pusat pelayanan pariwisata skala lokal                                                                                                              |                 |
| W-I-4        | Aksesibilitas menuju beberapa objek wisata masih kurang baik                                                                                                                                                                                |                 |
| W-I-5        | Karena prasarana pendukung jalan regional belum tersedia secara sempurna, sehingga banyak wilayah yang perlu dijangkau dengan kendaraan biasa dalam waktu yang relatif lama (minimnya sarana penerangan, dan penunjuk informasi arah jalan) |                 |
| W-I-6        | Jaringan utilitas di destinasi kecamatan belum merata, baik secara kualitas maupun kuantitas                                                                                                                                                |                 |
| W-I-7        | Terbatasnya pengembangan fasilitas pendukung pariwisata, misalnya akomodasi, rumah makan/restoran, souvenir shop                                                                                                                            |                 |
| W-I-8        | Belum adanya penerapan pengelolaan mitigasi bencana, pada sebagian besar daya tarik wisata dan sarana pendukungnya (wisma atau penginapan), misalnya dengan disediakannya jalur dan ruang evakuasi, bangunan tahan gempa, dll               |                 |
| W-I-9        | Tidak terdapatnya <i>early warning system</i> pada daerah yang rawan bencana                                                                                                                                                                |                 |
| W-I-10       | Relatif belum dikenalnya pengelolaan pengunjung (berupa pembagian zonasi dan pembatasan kunjungan) bagi daya tarik wisata lain yang mempunyai tingkat kerentanan tinggi                                                                     |                 |
| <b>W-II</b>  | <b>Aspek Industri Pariwisata</b>                                                                                                                                                                                                            |                 |
| W-II-1       | Belum diterapkannya standarisasi pengelolaan usaha pariwisata secara umum                                                                                                                                                                   |                 |
| W-II-2       | Belum adanya kebijakan berupa pemberian insentif bagi masyarakat dan swasta yang mau mengembangkan usaha pariwisata secara berkelanjutan                                                                                                    |                 |
| W-II-3       | Belum adanya penindakan hukum/pemberian sanksi bagi pengelolaan usaha pariwisata yang berdampak negatif terhadap lingkungan                                                                                                                 |                 |
| W-II-4       | Belum disusunnya rencana AMDAL bagi berbagai industri dan usaha pariwisata untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pengembangannya dan pengoperasiannya                                                                               |                 |
| <b>W-III</b> | <b>Aspek Pasar dan Pemasaran</b>                                                                                                                                                                                                            |                 |

|                 |                                                                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W-III-1         | Belum adanya studi pasar pariwisata yang lebih mendalam untuk mengetahui karakteristik wisatawan, pola perjalanan, serta preferensi wisatawan                          |
| W-III-2         | Masih minimnya upaya pemasaran dan promosi daya tarik wisata yang tepat sasaran                                                                                        |
| W-III-3         | Belum ada database terperinci mengenai daya tarik wisata dan fasilitas pendukungnya                                                                                    |
| W-III-4         | Faktor biaya perjalanan yang tidak jelas nominalnya menjadi kendala bagi calon wisatawan                                                                               |
| <b>W-IV</b>     | <b>Aspek SDM dan Kelembagaan</b>                                                                                                                                       |
| W-IV-1          | Terbatasnya kemampuan SDM yang bergerak di bidang usaha pariwisata                                                                                                     |
| W-IV-2          | Terbatasnya kemampuan dan keahlian penentu kebijakan dalam pengembangan pariwisata                                                                                     |
| W-IV-3          | Terbatasnya jumlah kelembagaan yang bergerak di bidang pariwisata                                                                                                      |
| W-IV-4          | Dukungan kebijakan pemerintah daerah terhadap sektor pariwisata masih relatif rendah                                                                                   |
| W-IV-5          | Terbatasnya data dan informasi mengenai aspek pengembangan kepariwisataan (destinasi, industri, pasar dan pemasaran, kelembagaan), dikarenakan ketidaksiapan SDM dinas |
| W-IV-6          | Masyarakat setempat yang relatif belum mengenal dan memahami tuntutan industri pariwisata (pemahaman mengenai Sapta Pesona kurang)                                     |
| W-IV-7          | Belum berkembangnya kemitraan dan skema kerjasama antar stakeholder, diantaranya pelibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata yang masih relatif sedikit         |
| <b>W-I</b>      | <b>Aspek Destinasi Pariwisata</b>                                                                                                                                      |
| <b>W-II</b>     | <b>Aspek Industri Pariwisata</b>                                                                                                                                       |
| <b>W-III</b>    | <b>Aspek Pasar dan Pemasaran</b>                                                                                                                                       |
| <b>W-IV</b>     | <b>Aspek SDM dan Kelembagaan</b>                                                                                                                                       |
| <b>Weakness</b> | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                           |



**Tabel 5.7**  
**Pembobotan Aspek Peluang (Opportunity)**

| QID                | Pernyataan                                                                                                                                                          | Opportunity Rating |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>O-I</b>         | <b>Aspek Destinasi Pariwisata</b>                                                                                                                                   |                    |
| O-I-1              | Penetapan daya tarik wisata yang mempunyai signifikansi tertentu untuk dijadikan daya tarik wisata unggulan atau bahkan menetapkan Kawasan strategis pariwisata     |                    |
| O-I-2              | Daya tarik wisata alam dan bahari selalu merupakan daya tarik tertinggi yang dikunjungi wisatawan                                                                   |                    |
| O-I-3              | Faktor pendanaan yang relatif besar (dari pusat, daerah, atau donator swasta) dapat dimanfaatkan bagi pengembangan pariwisata menurut prioritas pengembangannya     |                    |
| O-I-4              | Berbagai komoditas pertanian, perkebunan, perikanan, kuliner dan industri olahan dapat dimanfaatkan dan dikemas sebagai industri pendukung pariwisata               |                    |
| <b>O-II</b>        | <b>Aspek Industri Pariwisata</b>                                                                                                                                    |                    |
| O-II-1             | Terbukanya kesempatan berinvestasi dalam pengembangan usaha pariwisata                                                                                              |                    |
| O-II-2             | Kesempatan memperkenalkan konsep <i>responsible tourism</i>                                                                                                         |                    |
| <b>O-III</b>       | <b>Aspek Pasar dan Pemasaran</b>                                                                                                                                    |                    |
| O-III-1            | Adanya tren wisatawan yang menginginkan perjalanan wisata alam yang masih alami                                                                                     |                    |
| O-III-2            | Tren pemanfaatan teknologi informasi dan <i>geosocial networking</i> bagi pengembangan pariwisata                                                                   |                    |
| O-III-3            | Dukungan pemerintah provinsi dalam mengembangkan citra Kabupaten Pidie                                                                                              |                    |
| <b>O-IV</b>        | <b>Aspek SDM dan Kelembagaan</b>                                                                                                                                    |                    |
| O-IV-1             | Persaingan yang semakin terbuka menghasilkan kesempatan bagi SDM daerah lain (ataupun SDM internasional) yang lebih kompeten untuk bekerja di sektor kepariwisataan |                    |
| O-IV-2             | Keberadaan UU Pemerintah Aceh dapat mendukung pengembangan pariwisata                                                                                               |                    |
| O-IV-3             | Adanya CSR yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan pariwisata                                                                                                     |                    |
| <b>O-I</b>         | <b>Aspek Destinasi Pariwisata</b>                                                                                                                                   |                    |
| <b>O-II</b>        | <b>Aspek Industri Pariwisata</b>                                                                                                                                    |                    |
| <b>O-III</b>       | <b>Aspek Pasar dan Pemasaran</b>                                                                                                                                    |                    |
| <b>O-IV</b>        | <b>Aspek SDM dan Kelembagaan</b>                                                                                                                                    |                    |
| <b>Opportunity</b> | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                        |                    |

**Tabel 5.8**  
**Pembobotan Aspek Ancaman (Threat)**

| QID           | Pernyataan                                                                                                                                                                | Threat Rating |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>T-I</b>    | <b>Aspek Destinasi Pariwisata</b>                                                                                                                                         |               |
| T-I-1         | Konflik pemanfaatan ruang kerap terjadi, diantaranya konflik mengenai persepsi pembangunan dan penataan pariwisata bersama dengan masyarakat                              |               |
| T-I-2         | Ancaman kegiatan lain yang berdampak negatif terhadap daya tarik wisata (misal kegiatan penambangan, penebangan hutan, dll)                                               |               |
| T-I-3         | Rentan terhadap ancaman bencana alam (gempa bumi, banjir, sedimentasi, longsor, dll)                                                                                      |               |
| T-I-4         | Ketidaksiapan aksesibilitas dalam penyebaran wisatawan dikarenakan kondisi informasi yang kurang baik (belum tertata baik)                                                |               |
| T-I-5         | Jika destinasi yang telah di danai tidak di tata serta di dikelola dengan baik, sewaktu-waktu pendanaan bisa dihentikan oleh pusat atau donatur swasta                    |               |
| T-I-6         | Belum digarap secara serius/belum dilihat sebagai komoditas penunjang pariwisata (misal untuk bahan baku souvenir, daya tarik agrowisata, daya tarik wisata kuliner, dll) |               |
| <b>T-II</b>   | <b>Aspek Industri Pariwisata</b>                                                                                                                                          |               |
| T-II-1        | Tidak mampu mempersepsikan di mata publik tentang daya tarik wisata                                                                                                       |               |
| <b>T-III</b>  | <b>Aspek Pasar dan Pemasaran</b>                                                                                                                                          |               |
| T-III-1       | Belum terlalu siap pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi informasi                                                                                               |               |
| T-III-2       | Citra destinasi dipengaruhi oleh berbagai situasi dalam negeri (bencana alam dll)                                                                                         |               |
| <b>T-IV</b>   | <b>Aspek SDM dan Kelembagaan</b>                                                                                                                                          |               |
| T-IV-1        | Dikhawatirkan akan mengurangi kesempatan kerja SDM lokal                                                                                                                  |               |
| T-IV-2        | Ketidaksinkronan kebijakan berikut implementasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah                                               |               |
| T-IV-3        | Belum dikembangkannya perizinan satu atap yang mempermudah pengembangan usaha pariwisata                                                                                  |               |
| <b>T-I</b>    | <b>Aspek Destinasi Pariwisata</b>                                                                                                                                         |               |
| <b>T-II</b>   | <b>Aspek Industri Pariwisata</b>                                                                                                                                          |               |
| <b>T-III</b>  | <b>Aspek Pasar dan Pemasaran</b>                                                                                                                                          |               |
| <b>T-IV</b>   | <b>Aspek SDM dan Kelembagaan</b>                                                                                                                                          |               |
| <b>Threat</b> | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                              |               |



# 6 PASAR PARIWISATA DAN UPAYA PEMASARAN

## 6.1 Pasar Pariwisata

### 6.1.1 Konsep Pasar Pariwisata

Dalam melihat celah pasar pariwisata lebih mendalam digunakan konsep *STP (Segmentation, Targeting, Positioning)*, merupakan suatu konsep yang dalam prosesnya berTahap dari mulai mengidentifikasi pasar, melakukan pemilihan pasar, hingga merealisasikan terhadap pasar sasaran. Berikut bauran dari konsep STP:

#### A. Segmentasi Pasar(*segmentation*)

Pasar memiliki karakter yang berbeda-beda (heterogen) dimana terdapat berbagai variasi kebutuhan, permintaan, penawaran, serta daya beli. Oleh karena itu dibutuhkan pengelompokan terhadap pasar yang semula bersifat heterogen menjadi homogen. Langkah pertama adalah melakukan identifikasi terhadap segmen pasar yang ada.

Berikut beberapa variable untuk segmentasi pasar (Boone & Kurtz, 2005. Jorge A. Restrepo):

##### a) *Geographic Segmentation*

Segmentasi geografis membagi pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda, seperti negara, provinsi, dan kota.

##### b) *Demographic Segmentation*

Dalam segmentasi ini, pasar dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan variabel demografis, yaitu usia, jenis kelamin, pekerjaan, penghasilan, pendidikan, agama dan ras.

##### c) *Psychographic Segmentation*

Merupakan segmentasi berdasarkan psikografis yang dibagi berdasarkan gaya hidup atau kepribadian.

##### d) *Product-Related Segmentation*

Segmentasi ini dilihat dari manfaat yang menonjol yang didapat oleh konsumen sehingga mendapatkan suatu citra, kualitas dan harga. Banyak cara yang dapat digunakan untuk membuat segmentasi pasar, namun beberapa kriteria penentuan haruslah diperhatikan agar mendapatkan efektifitas. Berikut karakteristik dalam penentuan segmentasi pasar:

- Dapat diukur, yaitu sejauh mana ukuran dan daya beli segmen dapat diukur,
- Dapat diakses, yaitu sejauh mana segmen itu dapat dilayani,
- Cukup besar, yaitu sejauh mana segmen itu cukup besar atau cukup menguntungkan untuk dilayani,
- Dapat dilaksanakan, yaitu sejauh mana program yang efektif yang dapat didisain untuk menarik dan melayani segmen.

Setelah mengidentifikasi segmen pasar apa saja yang ada di destinasi, maka langkah selanjutnya adalah mengevaluasi segmen pasar. Ada 2 faktor yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi segmen pasar, yaitu:

- Ukuran dan pertumbuhan segmen  
Memilih suatu segmen yang memiliki karakteristik dan ukuran pertumbuhan yang tepat. Namun ukuran dan pertumbuhan yang tepat bersifat relatif, seperti sasaran segmen yang memiliki tingkat daya beli yang tinggi.
- Tujuan dan sumber daya  
Sebuah segmen dapat dipilih berdasarkan tujuan yang berbentuk jangka panjang dan penyesuaian dengan sumber daya yang dimiliki sebuah destinasi.

Selain segmentasi, kebutuhan dan keinginan pasar sangat perlu untuk diketahui yaitu melalui preferensi yang dapat diukur dengan persepsi (Cravens, 1996). Preferensi didefinisikan sebagai proses dimana individual memilih apa yang mereka inginkan.



## B. Target Pasar (*Targeting*)

Setelah mengevaluasi berbagai segmen, langkah selanjutnya adalah memilih segmen mana yang akan ditargetkan sesuai dengan kebutuhan pemasaran destinasi.

Proses *targeting* biasanya dilakukan setelah mendapatkan segmentasi pasar yang akan tepat dan menguntungkan. Hasil dari proses *targeting* adalah berupa target market. Berikut beberapa cara untuk mencapai target pasar yang diinginkan (Kotler, 1997):

### a) *Undifferentiated Marketing*

Yaitu strategi pasar yang memperlakukan keseluruhan pasar sebagai pasar potensial yang biasa disebut *mass marketing*, yaitu melayani seluruh segmen pasar sebagai satu kesatuan dengan produk yang sama.

### b) *Differentiated Marketing*

Dalam proses ini, pasar yang berbeda akan mendapatkan perlakuan yang berbeda pula.

### c) *Concentrated Marketing*

Merupakan *mass marketing* namun memiliki skala yang lebih fokus pada satu segmen saja.

### d) *Micro Marketing*

Dalam Tahap ini, pasar dibagi-bagi kembali menjadi lebih detail, bahkan menuju ke tingkat individual.

## C. Penempatan Pasar (*Positoning*)

Setelah melakukan proses *targeting*, maka Tahap an selanjutnya adalah melakukan proses *positioning*, yaitu menempatkan produk sesuai dengan kebutuhan pasar sasaran (Craven, 1994). Dalam penempatan produk dapat dilakukan dengan beberapa strategi, diantaranya:

### a) Penempatan berdasarkan produk

Yaitu dengan menunjukan penampilan produk dengan memperlihatkan perbedaannya dengan produk lain. Dalam sebuah destinasi wisata sangat penting untuk memperlihatkan daya saing melalui keunikan dari destinasinya.

b) Penempatan berdasarkan manfaat produk

Bergantung pada sejauh mana produk itu dapat memberikan manfaat bagi pasar. Dalam sebuah destinasi dapat dilihat dari sejauh mana pasar dapat merasakan kepuasan yang didapat dengan berkunjung terhadap destinasi tersebut.

c) Penempatan berdasarkan penggunaan

Dilihat dari seberapa banyak pasar yang menggunakan produk itu. Dalam hal destinasi wisata adalah seberapa sering pengunjung datang untuk berekreasi dan tetap akan memilih destinasi tersebut dibandingkan dengan destinasi lain.

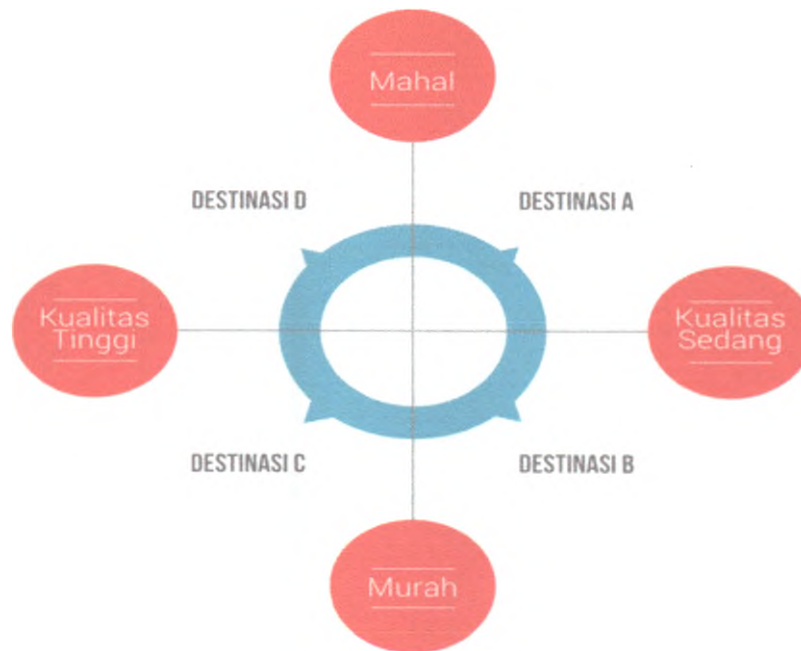
d) Penempatan terhadap pesaing

Cara ini dilakukan dengan cara memperlihatkan atau mengenalkan produk yang ada terhadap pesaing untuk membandingkan keunggulan yang dimiliki.

Setelah mengetahui strategi mana yang akan digunakan, langkah selanjutnya adalah pemetaan posisi. Penempatan posisi berisi 3 langkah: mengidentifikasi sekelompok keunggulan bersaing, memilih keunggulan bersaing, dan secara efektif mengkomunikasikan dan memberikan posisi yang terpilih. Pemetaan posisi dapat terbentuk dari persepsi wisatawan melalui instrumen penelitian berupa daftar periksa dan pedoman wawancara. Berikut contoh dari pemetaan penempatan sebuah destinasi:



Gambar 6.1  
Penetapan Posisi Untuk Sebuah Destinasi



Sumber :Craven, 1996

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa :

- Posisi dari destinasi A berada pada tingkatan kualitas produk dan pelayanan sedang dengan besaran harga yang tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa destinasi A tidak relevan dalam penetapan harga dengan kualitas produk dan pelayanan yang dimilikinya.
- Posisi dari destinasi B berada pada tingkatan kualitas produk dan pelayanan yang sedang dengan besaran harga yang minim. Sehingga dapat disimpulkan bahwa destinasi A mempunyai harga, produk dan pelayanan yang dapat mencakup seluruh segmen pasar.
- Posisi dari destinasi C berada pada tingkatan kualitas dan pelayanan produk yang tinggi dengan besaran harga yang minim. Sehingga destinasi ini memiliki daya jual yang rendah namun tetap mementingkan dan menjaga kualitas dari produk.

- d) Posisi dari destinasi D berada pada tingkatan kulaitas dan pelayanan yang tinggi dengan besaran harga yang tinggi pula. Sehingga dapat disimpulkan bahwa destinasi tersebut berupa destinasi yang eksklusif.

#### 6.1.2 Klasifikasi dan Jumlah Wisatawan

Meskipun tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Pidie masih belum menempati urutan yang tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Aceh. Secara umum tingkat kunjungan di Kabupaten Pidie dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dan jumlah kunjungan wisatawan nya masih berpotensi meningkat setiap tahunnya.

Meskipun masih belum optimal namun jumlah wisatawan di Kabupaten Pidie dapat menjadi potensi pada masa yang akan datang. Beberapa faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Pidie dimasa datang antara lain:

- a) Peningkatan aktivitas perjalanan nasional maupun regional.
- b) Peningkatkan aktivitas ekonomi dan transportasi yang juga akan diikuti oleh peningkatan arus penumpang dan barang.
- c) Peningkatan kualitas dan kuantitas aksesibilitas ke seluruh wilayah Aceh sampai Sumatera Utara.

Identifikasi pasar wisata dapat dilakukan dengan mempertimbangkan fakta pasar dan kecenderungannya untuk dapat merasionalisasikan ke dalam penetapan pasar sasaran. Berdasarkan pada data yang ada, Kabupaten Pidie saat ini telah mampu menarik kunjungan baik wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisatawan mancanegara meskipun masih dalam jumlah yang terbatas.

Berdasarkan hasil pencermatan, pasar wisata yang terdapat di Kabupaten Pidie dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a) Wisatawan Nusantara

Wisatawan nusantara (wisnus) merupakan salah satu jenis wisatawan yang dominan melakukan aktivitas wisata di Kabupaten Pidie. Berdasarkan referensi yang disampaikan oleh Dirjen Pemasaran Pariwisata



Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, aktivitas wisata yang dilakukan oleh Wisnus tidak ada musimnya dimana perkembangannya jauh lebih besar dan pesat daripada wisman. Perjalanan wisnus tidak mengenal musim, mereka bisa jalan-jalan di tahun baru, atau kenaikan kelas dan sebagainya. Yang membuat okupansi hotel penuh, *booking* tiket dan kendaraan penuh itu tidak murni wisatawan, tapi juga orang-orang yang melakukan seminar, musyawarah tingkat nasional maupun tingkat Provinsi, dan sebagainya. Kunjungan wisatawan nusantara ke Kabupaten Pidie berdasarkan data Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pidie pada tahun 2019 berjumlah 500 orang.

b) Wisatawan Mancanegara

Wisatawan mancanegara (wisman) merupakan target utama bagi pembangunan kepariwisataan baik pada tingkat nasional maupun daerah. Kunjungan wisman ke suatu negara atau wilayah diharapkan akan mampu mendatangkan devisa. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Pidie berdasarkan data Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pidie pada tahun 2019 berjumlah 90 orang. Angka ini dapat dikatakan angka awal yang baik untuk pengembangan wisata Pidie ke depan.

*World Tourism Organization* (WTO) (dalam Yasin *et al.*, 2003) memperkirakan pada tahun 2020 industri pariwisata global tumbuh dengan rata-rata 6% lebih pertahun. Harapan tersebut berdasarkan pada data, dimana sejak tahun 2010 kunjungan pariwisata internasional tumbuh di atas 7%. Asia Pasifik menjadi pendorong wisata internasional dengan menarik 185 juta wisatawan. Sementara untuk pada tingkat nasional aktivitas pariwisata Indonesia tumbuh sebesar 8.6% pada kuartal I-2018. Kondisi ini tentunya memberikan peluang bagi Kabupaten Pidie dalam meraih pasar wisatawan mancanegara tentunya dengan dukungan keunggulan produk wisata.

## A. Potensi Pasar Wisata

### a) Wisatawan Nusantara

Dengan jumlah wisatawan nusantara di Indonesia yang demikian besarnya di Indonesia maka peluang Kabupaten Pidie dalam meningkatkan jumlah wisnus namun perlu segmen pasar yang tepat. Pada Tahap awal maka potensi pasar adalah:

#### ➤ Penduduk Kabupaten Pidie

Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5.2% (2019) yang berarti diatas pertumbuhan ekonomi provinsi Aceh yang hanya sebesar 4.15%. Semakin meningkat kesejahteraan dapat diasumsikan akan terjadi peningkatan perjalanan wisata. Masyarakat Kabupaten Pidie sangat membutuhkan aktivitas wisata. Artinya bahwa sebelum masyarakat Pidie melakukan aktivitas wisatanya ke luar Kabupaten bahkan ke luar negeri sudah seharusnya kegiatan wisatanya diarahkan terlebih dahulu ke dalam Kabupaten Pidie.

#### ➤ Kabupaten sekitar Kabupaten Pidie

Pariwisata merupakan sektor yang tidak mengenal batas wilayah sehingga asal wisatawan dapat berasal dari berbagai daerah di luar Kabupaten Pidie. Keunikan sumber daya pariwisata yang dimiliki Kabupaten Pidie belum tentu dapat ditemukan di Kabupaten lain di Indonesia khususnya di Provinsi Aceh. Kabupaten sekitar Kabupaten Pidie merupakan pasar yang sangat potensial untuk menjadi target wisatawan.

### b) Potensi Wisatawan Mancanegara

Sebagai salah satu primadona tujuan pengembangan pariwisata, wisman menjadi target pasar bagi setiap daerah di Indonesia.

Dalam menetapkan pangsa pasar, sasaran hal yang perlu menjadi perhatian adalah preferensi. Preferensi berarti harapan wisatawan dalam



melakukan kegiatan wisata di suatu destinasi menjadi perhatian utama dari pengelola kepariwisataan. Beberapa hal yang terkait dengan preferensi pasar terhadap pengembangan produk yang perlu dicermati antara lain:

- Peningkatan variasi aktivitas serta objek wisata untuk memberikan pilihan yang lebih banyak dalam melakukan aktivitas wisata
- Peningkatan aksesibilitas, dalam hal ini, perbaikan dan peningkatan sistem transportasi menjadi sebuah prioritas pembangunan di Kabupaten Pidie
- Peningkatan kualitas dari prasarana dan sarana wisata yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan
- Pengembangan sistem informasi kepariwisataan, untuk kepentingan wisatawan, investasi, dan perencanaan terkait yang terpadu: lintas sektor dan antar wilayah
- Kebijakan dan program kegiatan pengembangan produk yang mendukung kegiatan pariwisata yang sesuai dengan preferensi pasar
- Pengembangan wisata budaya dalam kemasan produk yang menarik (event, festival)
- Penetapan strategi pemasaran yang superior dalam meningkatkan *awarness* terhadap Kabupaten Pidie

## 6.2 Pemasaran Wisata

Pemasaran pada destinasi pariwisata merupakan salah satu faktor kunci dalam kesuksesan pembangunan suatu destinasi pariwisata. Pemasaran pariwisata merupakan ujung tombak dalam penciptaan *awareness* dan *image* pada pariwisata di Kabupaten Pidie, sehingga pada akhirnya peningkatan arus kunjungan wisatawan. Pemasaran pariwisata pada dasarnya terdiri dari dua aspek pokok yaitu produk yang berperan sebagai *supply side* dan pasar yang berperan sebagai *demand side*. Pemahaman terhadap kedua hal diatas sangat penting dalam menjalankan fungsi pemasaran pariwisata.

Pemasaran pariwisata di Kabupaten Pidie sebagai destinasi wisata berperan melalui penetapan pasar sasaran, serta penanganan dan pengembangan pasar melalui penciptaan, pendistribusian, dan pengkomunikasian nilai destinasi wisata.

Pentingnya membangun nilai destinasi mengharuskan pemasaran pariwisata Kabupaten Pidie untuk selalu *outward looking* dan bersikap proaktif terhadap setiap perubahan lingkungan atau yang disebut sebagai *Pro-Active Marketing*.

Pentingnya orientasi pasar diterapkan secara konsisten adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan pemahaman terhadap kemampuan sumber daya untuk diselaraskan dengan preferensi konsumen. Untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar maka pariwisata Sumatera Selatan harus mampu menerjemahkan perilaku maupun kebutuhan wisatawan secara menyeluruh untuk dapat mengetahui dan memahami harapan dan preferensi wisatawan, untuk dapat disesuaikan dengan kesediaan produk yang ditawarkan (*product- market matching*).

a) Pemasaran Pariwisata

Pengelolaan pemasaran pariwisata saat ini Kabupaten Pidie umumnya dilakukan oleh pemerintah (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga) dan pengelola per-kawasan/objek (pihak swasta) belum terintegrasi dengan baik. Dalam upaya meningkatkan daya saing sebuah destinasi wisata kedua institusi itu dalam keterkaitan pemasaran di Kabupaten Pidie dengan kabupaten-kabupaten lain sekitarnya saling bekerjasama dalam menetapkan strategi pemasaran di Kabupaten Pidie sebagai daerah tujuan wisata. Pemasaran destinasi pariwisata berdasarkan UNWTO, 2010 ditujukan untuk meningkatkan *image*, *brand*, *positioning* dan *vision*, oleh karena itu pemasaran destinasi ditujukan guna peningkatan *awarness* dan informasi terhadap eksistensi suatu destinasi pariwisata.

Aktivitas pemasaran yang telah dilakukan oleh Kabupaten Pidie, antara lain:

- Pengembangan situs-situs pariwisata yang sudah terintegrasi dengan informasi-informasi kepariwisataan di Kabupaten Pidie baik dari sisi daya tarik wisata, jalur wisata yang berada di Kabupaten Pidie, akomodasi yang tersedia, sehingga dapat mudah di akses oleh wisatawan yang akan berkunjung ke Kabupaten Pidie.



- Pengembangan event-event budaya dan pariwisata yang sudah berskala nasional.
- Pembuatan material-material promosi berupa brosur, liflet, dll
- Pengiriman duta-duta budaya ke berbagai event budaya

Dalam konteks pemasaran, kegagalan yang terjadi umumnya, termasuk didalamnya pada pemasaran destinasi pariwisata antara lain:

- Dangkalnya Rencana Pemasaran
- Kurangnya Analisa Situasi Lingkungan
- Tujuan dan Sasaran Yang Tidak Realistis
- Perubahan Persaingan tidak diantisipasi

Salah satu upaya peningkatan informasi dan *awarness* yang saat ini sedang menjadi trend adalah dengan melalui teknologi informasi berbasis digital/internet. Aktivitas pemasaran ini dapat dikembangkan dengan pertimbangan:

Wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia dalam melakukan pengaturan perjalanannya dengan memanfaatkan sumber informasi adalah sebagai berikut :

- Sebagai sumber informasi, internet (68.71%) masih sebagai informasi kepariwisataan yang sangat dominan digunakan oleh wisatawan mancanegara dalam merencanakan perjalanan wisatanya ke Indonesia, sementara itu meskipun liflet/brosur dianggap sebagai alat promosi yang kuno namun wisatawan mancanegara masih dominan menggunakannya dalam merencanakan aktivitas wisatanya ke Indonesia.

- Bagi wisatawan nusantara, pengguna internet juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berdasarkan hasil penelitian MarkPlus Insight 2011, jumlah pengguna Internet di Indonesia sudah mencapai 55 juta orang, meningkat dari tahun sebelumnya di angka 42 juta dengan dominasi kelompok umur 15-30 tahun. Selain daripada itu dalam konteks media sosial (facebook), Indonesia menempati posisi ke 4 (empat) dunia.

Dalam pemasaran, internet merupakan salah satu alat informasi maupun promosi yang saat ini menjadi andalan banyak usaha termasuk pariwisata. Keuntungan dari penggunaan internet sebagai media pemasaran.

- i. Efisiensi Biaya, internet disebut sebagai *paperless media* karena tidak perlu biaya cetak sehingga mampu menghemat anggaran biaya. Dimana calon wisatawan hanya mencetak (apabila diperlukan) informasi yang dibutuhkan sehingga tidak perlu dilakukan pencetakan secara keseluruhan.
- ii. Tinggi jangkauan pasar, informasi yang ditampilkan mampu menjangkau pasar secara internasional dalam waktu bersamaan mengingat bahwa internet saat menjadi kebutuhan setiap manusia modern.
- iii. Meningkatnya penggunaan gadget, alat yang menampilkan informasi yang berbasis internet menjadi semakin murah sehingga menjadi peralatan yang menjadi pelengkap utama kehidupan manusia dunia.
- iv. Kemudahan pembaharuan data, dengan bentuknya yang digital maka memudahkan melakukan pembaharuan data (*up dating*) tanpa mengubah bentuk alatnya.

#### b) Sasaran Pengembangan Pasar dan Pemasaran

Sebagai salah satu aspek yang menentukan keberhasilan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan suatu destinasi pariwisata, sasaran pengembangan pasar dan pemasaran meliputi:

- Terbentuknya citra kepariwisataan Kabupaten Pidie yang kuat dengan keunikan dan muatan lokalnya.



- Meningkatnya jumlah, penyebaran, dan kualitas wisatawan di seluruh wilayah di Kabupaten Pidie melalui pemasaran yang terpadu dan tepat sasaran.
- Tersedianya informasi kepariwisataan yang berkualitas untuk mendukung pengambilan keputusan pembangunan dan pelayanan kepada wisatawan.
- Terjalinnya kualitas kerjasama pemasaran pariwisata pada skala regional dan nasional.

# 7 KELEMBAGAAN PARIWISATA

## 7.1 Pencermatan Kelembagaan

Kepariwisataan nasional dari tahun ke tahun menunjukkan perannya yang semakin penting dalam pembangunan nasional, ini dapat terlihat dari diperbaharainya undang-undang kepariwisataan (UU No 10 tahun 2009) dan dibuatnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional.

Dalam Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah, strategi pembangunan pariwisata diletakkan sebagai salah satu upaya untuk memperoleh devisa dari sektor non migas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjelaskan bahwa salah satu sasaran untuk meningkatkan sektor non migas adalah dengan meningkatkan kontribusi pariwisata dalam perolehan devisa, sehingga sektor pariwisata diharapkan mampu menjadi salah satu penghasil devisa besar.

Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pemasaran melalui kegiatan promosi dan pengembangan produk-produk wisata serta meningkatkan sinergi dalam jasa pelayanan pariwisata. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan hasil signifikan bagi perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, yang dapat membawa dampak sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kelembagaan mencakup hal-hal yang tidak tertulis seperti aturan adat, norma dan sistem nilai yang dianut masyarakat, dan mencakup sesuatu yang ditulis secara formal dan ditegakkan oleh aparat pemerintah. Jadi definisi kelembagaan adalah kegiatan kolektif dalam suatu kontrol atau yurisdiksi, pembebasan atau liberalisasi, dan perluasan atau ekspansi kegiatan individu seperti tersebut di atas.

Pemerintah Kabupaten Pidie memiliki hak otonomi daerah dalam melaksanakan pembangunannya termasuk bidang kepariwisataan. Sebagai sebuah Kabupaten yang berada di Provinsi Aceh yang pada lingkup kewenangannya bertambah lewat keberadaan UU Pemerintah Aeh dan tentunya dengan SKPD yang memiliki keragaman tugas dan fungsi dan sumber daya pariwisata tentunya membutuhkan suatu sinergitas dalam mengimplementasikan pembangunan kepariwisataan. Kajian lingkungan kelembagaan pemerintah sebagai salah satu aspek



penting dalam pencermatan lingkungan internal yang akan mempengaruhi pengembangan pariwisata Kabupaten Pidie.

Perlunya penyelarasan Visi dan Misi antar lembaga di Kabupaten Pidie untuk pengembangan kepariwisataan Kabupaten Pidie juga perlu diperhatikan implikasinya, yaitu perlunya integrasi antar bidang di kelembagaan di Kabupaten Pidie dengan bidang pariwisata.

Untuk membantu mewujudkan dan menjaga sinergitas antar bidang kelembagaan kepariwisataan maka dibutuhkan adanya suatu badan/organisasi yang dapat memfasilitasi dan menjaga keberlanjutan proses sinergitas tersebut. Koordinasi dalam kenyataannya bukan merupakan suatu hal yang mudah untuk diimplementasikan, namun dapat dilakukan dengan koordinasi antar seluruh *stakeholders* sehingga tercipta kesamaan visi dan misi aktivitas kepariwisataan di Kabupaten Pidie.

Badan/organisasi ini merupakan badan independen yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan *stakeholders* yang akan menjadi mitra bagi pemerintah Kabupaten Pidie dalam menetapkan kebijakan-kebijakan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dan didanai secara kolektif dari seluruh *stakeholders* kepariwisataan di Kabupaten Pidie.

b. Sasaran Pengembangan Kelembagaan

- 1) Terbangunnya kesamaan visi, pola tindak dan peran aktif yang berkesinambungan diantara seluruh *stakeholders* dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Pidie.
- 2) Terciptanya organisasi pengelola kepariwisataan yang akuntabel yang berorientasi pada pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Pidie yang bertanggung jawab dan berwawasan global.
- 3) Terciptanya SDM Pariwisata yang memiliki kompeten, profesional, kreatif dan inovatif pada bidang kepariwisataan.
- 4) Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kegiatan kepariwisataan.

c. Rencana Strategis Pengembangan Kelembagaan

- 1) Memperjelas dan mempertegas peran (tugas fungsi dan wewenang) khususnya lembaga pemerintah, beserta pelaksanaan/konsekuensi peran tersebut.
- 2) Melakukan reorganisasi, khususnya lembaga/instansi pemerintah yang menangani bidang pariwisata dan bidang terkait (seperti perindustrian, perdagangan, jasa, keamanan, lingkungan, kesenian dan budaya, pajak dan pendapatan daerah, transportasi dan telekomunikasi serta pendidikan kepariwisataan).
- 3) Menciptakan iklim yang kondusif untuk mengembangkan kinerja masing-masing lembaga yang terkait dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata termasuk sektor pemerintah, swasta dan masyarakat.
- 4) Menciptakan "*link and macth*" antara pendidikan kepariwisataan dengan lapangan kerja kepariwisataan secara lebih merata. Tidak terfokus pada sektor tertentu yang diidentifikasi dapat mendatangkan keuntungan lebih besar.
- 5) Memberi peran yang luas dan memotivasi secara terus-menerus kepada lembaga swasta yang bergerak di bidang kepariwisataan untuk menciptakan dan mengembangkan peluang dalam pengembangan pariwisata seluas-luasnya.
- 6) Menciptakan peluang dan mendorong masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yang tertarik untuk bergerak di bidang pariwisata, baik yang telah bergerak di bidang pariwisata maupun yang belum, untuk mengembangkan diri berdasar atas tatanan yang telah dirumuskan.

d. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia

- 1) Penyebarluasan secara sistematis pengertian pariwisata berikut komponen terkait, dan konsep pengembangan pariwisata Provinsi Sumatera Selatan kepada masyarakat Provinsi Sumatera Selatan secara umum dan masyarakat pariwisata Provinsi Sumatera Selatan secara khusus (bukan hanya pada kalangan birokrasi dan institusi tertentu saja).
- 2) Menciptakan kesempatan dan menyelenggarakan pendidikan formal dengan gelas dan pendidikan non formal mengenai segala aspek dan komponen pariwisata dari tingkat teknis sampai dengan pemikir/peneliti secara piramida.
- 3) Menciptakan kesempatan pendidikan diberikan tidak saja kepada masyarakat



yang telah melakukan kegiatan bidang pariwisata, tetapi juga masyarakat umum yang tertarik/ditarik dalam kegiatan pariwisata dengan prioritas terhadap mereka yang telah/sedang melakukan kegiatan di bidang pariwisata.

- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang melakukan kegiatan di bidang pariwisata sesuai kompetensi bidang kerja lebih diutamakan daripada kuantitas, sedangkan jumlah orang yang bekerja secara formal dalam bidang pariwisata diupayakan mengikuti hirarki piramida menurut kemampuan/kualitas/jejaring pengetahuan dan keterampilan.
- 5) Menciptakan motivasi yang kuat terhadap sumberdaya manusia yang bekerja pada instansi pemerintah yang menangani pariwisata agar “pro-aktif” dalam membina, memimpin, mengkoordinasi, memberi contoh dan memberi kesempatan kepada kalangan industry pariwisata dan masyarakat umum dalam mengembangkan pariwisata.

# 8 PRINSIP DAN KONSEP PEMBANGUNAN PARIWISATA

## 8.1 Isu Strategis Pembangunan Pariwisata

Ada beberapa faktor yang dianggap penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan pariwisata. Faktor-faktor inilah yang dianggap sebagai Isu strategis dalam pengembangan pariwisata. Faktor-faktor itu antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan otonomi daerah di sektor pariwisata telah menimbulkan persaingan antar daerah yang "*counter productive*", persaingan pariwisata yang bukan mengarah pada peningkatan komplementaritas dan pengkayaan alternatif berwisata. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti:
  - Lemahnya pemahaman tentang pariwisata
  - Lemahnya kebijakan pariwisata daerah
  - Tidak adanya pedoman dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Akibatnya pengembangan pariwisata daerah sejak masa otonomi lebih dilihat secara parsial. Artinya banyak daerah mengembangkan pariwisatanya tanpa melihat, menghubungkan dan bahkan menggabungkan dengan pengembangan daerah tetangganya maupun provinsi/kabupaten/kota terdekat. Bahkan cenderung meningkatkan persaingan antar wilayah, yang pada akhirnya akan berdampak buruk terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Padahal pengembangan pariwisata seharusnya lintas Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota, bahkan bahkan lintas negara.

2. Perkembangan teknologi informasi mengajarkan kita bahwa batas-batas wilayah kini menjadi tidak ada lagi. Sedangkan kemajuan industri transportasi telah memperpendek jarak antar wilayah sehingga bagi wisatawan, semakin banyak wilayah yang dicapai dalam suatu perjalanan wisata menjadi semakin baik buat mereka.

Oleh karenanya, persaingan antar daerah dalam membangun sektor pariwisatanya dalam konteks persaingan yang mengacu pada persaingan merebut pasar yang sama, dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan kemajuan industri transportasi semakin menjadi tidak relevan lagi.



3. Pengembangan pariwisata Indonesia yang masih bertumpu pada daerah tujuan wisata utama tertentu saja, walaupun daerah-daerah lain diyakini memiliki keragaman potensi kepariwisataan. Hal yang mengemuka dari pemusatan kegiatan pariwisata ini adalah dengan telah terlampauinya daya dukung pengembangan pariwisata di berbagai lokasi, sementara lokasi lainnya tidak berkembang sebagaimana mestinya.
4. Selain itu kekhasan dan keunikan atraksi dan aktivitas wisata yang ditawarkan masih belum menjadi suatu daya tarik bagi kedatangan wisatawan mancanegara, karena produk yang ditawarkan tidak dikemas dengan baik dan menarik seperti yang dilakukan oleh negara-negara pesaing.

Salah satu kelemahan produk wisata Indonesia, yang menyebabkan Indonesia kalah dalam bersaing dengan negara-negara tetangga adalah kurangnya diversifikasi produk serta kualitas pelayanan wisata Indonesia. Para pelaku kepariwisataan Indonesia kurang memberikan perhatian yang cukup untuk mengembangkan produk-produk baru yang lebih kompetitif dan sesuai dengan selera pasar.

5. Situasi dan kondisi daerah yang berbeda baik dari potensi wisata alam, ekonomi, adat budaya, mata pencaharian, kependudukan dan lain sebagainya yang menuntut pola pengembangan yang berbeda pula, baik dari segi cara atau metode, prioritas, maupun penyiapannya. Proses penentuan pola pengembangan ini membutuhkan peran aktif dari semua pihak, agar sifatnya integratif, komprehensif dan sinergis.
6. Banyak daerah tujuan wisata yang sangat potensial di Indonesia, terutama daya tarik alam dan budaya yang dimilikinya. Namun sayangnya belum bisa dijual atau belum mampu bersaing dengan daerah-daerah tujuan wisata baik di kawasan regional maupun internasional. Hal tersebut semata-mata karena daya tarik yang tersedia belum dikemas secara profesional, rendahnya mutu pelayanan yang diberikan, interpretasi budaya atau alam yang belum memadai, atau karena belum dibangunnya citra (image) yang membuat wisatawan tertarik untuk datang mengunjungi dan lain sebagainya.

Memperbanyak variasi produk baru berbasis sumber daya alam, dengan prinsip pelestarian lingkungan dan partisipasi masyarakat, merupakan strategi yang ditempuh untuk meningkatkan pemanfaatan keunikan daerah dan persaingan di tingkat regional.

Selain kualitas kemasan dan pelayanan, produk pariwisata berbasis alam harus memberikan pengalaman lebih kepada wisatawan. Selanjutnya, pengemasan produk wisata dan pemasarannya, haruslah memanfaatkan teknologi terkini. Produk-produk wisata yang ditawarkan harus sudah berbasis teknologi informasi, sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan sekaligus meningkatkan kemampuan menembus pasar internasional.

7. Banyak daerah tujuan wisata di Indonesia yang memiliki potensi untuk berkembang, namun minimnya infrastruktur pendukung seperti jalan, pelabuhan udara, transportasi dan akomodasi menjadi penghambat utama pengembangan pariwisata di banyak daerah potensi wisata di Indonesia.

Salah satu pertanyaan utama yang dihadapi pemasar dalam konteks pariwisata saat ini adalah sejauh mana pariwisata massal (*mass tourism*) akan terus berkembang. Poon (1993), dalam bukunya *Tourism, Technology and Competitive Strategies*, memberikan sinyal tentang kemunculan apa yang ia istilahkan sebagai “*new tourism*”. Indikasi atau tanda-tanda tentang kemunculan “pariwisata baru” adalah:

- Meningkatnya permintaan untuk ‘*independent non package holiday*’.
- Meningkatnya permintaan untuk pilihan dan fleksibilitas.
- Informasi teknologi, seperti Sistem Reservasi Komputer (CRS) dan Internet dengan cepat menyebar dan memungkinkan pelanggan untuk berhubungan langsung dengan perusahaan dan organisasi sebagai sarana fleksibel untuk membuat pengaturan perjalanan berbagai alternatif paket liburan.
- Melambatnya laju pertumbuhan bisnis paket tradisional.
- Adanya peningkatan perencanaan dan pengendalian lingkungan pariwisata di negara tuan rumah seperti Bermuda.
- Adanya peningkatan “segmentasi” pasar wisata untuk melayani karakteristik gaya hidup yang berbeda.
- Perilaku perjalanan dan motivasi wisatawan berubah dengan memilih paket perjalanan lebih pendek dan berorientasi aktifitas.



Dengan adanya perubahan fenomena ini, pemasar sudah harus mempersiapkan dirinya untuk beradaptasi terhadap perubahan eksternal yang terjadi itu, sehingga destinasi wisata beserta paket wisata yang ditawarkan kepada calon wisatawan, bisa sesuai dengan perubahan yang adatersebut.

Bagi Kabupaten Pidie yang saat ini sedang melakukan perencanaan pembangunan jangka panjang sektor pariwisatanya, apa yang dikemukakan Poon tersebut justru dapat dijadikan masukan yang penting agar pembangunan pariwisata Provinsi Aceh dapat mengadaptasi dan mengantisipasi berbagai perubahan tren pasar ke depan.

## 8.2 Prinsip Pembangunan Pariwisata

Pariwisata sebagai salah satu industri yang tumbuh, berkembang dan memiliki prospek cukup menjanjikan, baik secara regional maupun internasional, dapat dianggap sebagai peluang baru bagi tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor usaha terkait.

Pariwisata sendiri sebenarnya merupakan industri yang memiliki keterkaitan erat dengan sektorlainnya, seperti pendidikan, kebudayaan, teknologi, perdagangan dan perindustrian, perbankan, dan keamanan. Keterkaitan tersebut dapat berbentuk penyediaan produk-produk dan jasa layanan yang dibutuhkan dalam kegiatan pariwisata (*tourist products*) atau bisa disebut keterkaitan langsung, maupun dalam bentuk keterkaitan tak langsung seperti, pembinaan pengrajin yang dilakukan oleh instansi diluar pariwisata, atau perluasan dan perbaikan jalan seperti yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan bentuk lainnya.

Sementara untuk melihat peluang diciptakannya suatu program kemitraan usaha pariwisata, dapat digali dengan melihat pada mata rantai kegiatan pariwisata yang terjadi di suatu daerah. Dalam hal ini pembatasan pengamatan berdasarkan geografis (daerah) menjadi penting mengingat, mata rantai yang terjadi dipengaruhi oleh tingkat intensitas kegiatan wisata, tingkat pertumbuhan kepariwisataan, dan potensi-potensi local yang dimiliki berlainan antara satu daerah dengan daerah lain.



Gambar 8.1

Diagram Keterkaitan Industri Pariwisata dengan Bidang dan Sektor Lain

*Sumber: Modifikasi model, Inskeep 1991*

Rantai kegiatan pariwisata dapat pula dicermati dengan melihat pada siklus kegiatan pariwisata secara umum. Mata rantai dibawah sebenarnya memuat berbagai kegiatan yang terkait secara langsung dan memberikan peluang tumbuhnya kerjasama usaha.

Sebagai langkah awal, perlu adanya penekanan kegiatan pada usaha menemu kenali pola yang akan diterapkan dalam kemitraan tersebut, serta usaha mempertemukan antara para pengelola usaha pariwisata dengan usaha kecil potensial di sekitar daerah wisata yang menjadi sasaran kegiatan.

### 8.2.1 Prinsip Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang akan diterapkan sebagai pendekatan fundamental dalam penyusunan RIPPARDA Kabupaten Pidie merupakan konsep dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam perumusan rencana dan program pembangunannya.



Dengan demikian seluruh rencana pengembangan kepariwisataan Kabupaten Pidie dirumuskan dengan berpedoman pada konsepsi ini. Untuk lebih optimalnya operasionalisasi konsep ini dan juga disesuaikan dengan karakteristik dan lingkup perencanaan, maka didukung pula oleh, konsep pariwisata berkelanjutan, konsep *community live hoods*, konsep manajemen strategis, konsep perwilayahan dan klaster pengembangan, serta konsep sinergi *stakeholders*. Sebagaimana dipahami bahwa pariwisata adalah sebuah aktivitas dimana dalam operasionalisasi maupun pengembangannya perlu adanya keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karenanya, pelaksanaan pembangunan harus berdasar pada daya dukung lingkungan; dapat meningkatkan keselarasan dan keseimbangan dan meningkatkan ketahanan sistem serta tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup.

Pariwisata berkelanjutan merupakan sebuah isu dan telah menjadi visi pengembangan pariwisata di dunia saat ini dan masa datang. Hal ini secara tegas telah disampaikan oleh United Nations World Tourism Organization (UNWTO) dengan merekomendasikan pedoman dan manual penerapan pembangunan pariwisata secara berkelanjutan. Setiap negara dan daerah perlu secara bertahap untuk menerapkan pendekatan ini dalam pembangunan kepariwisataannya. Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pedoman dasar bagi pengelola pariwisata yang berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan binaan, dan lingkungan sosial budaya agar dapat dimanfaatkan dalam pembangunan.

Konsep ini merupakan sebuah konsep ideal bagi pengembangan pariwisata dimana dalam pengembangannya, pariwisata harus mampu melakukan pengembangan secara seimbang antara aspek ekonomi-lingkungan-sosial budaya, sehingga pemanfaatan sumber daya pariwisata dapat dilakukan secara lestari dan bertanggungjawab tanpa merusak atau mengurangi nilai sumber daya yang dimiliki. Hal ini dimaksudkan agar upaya komersialisasi (ekonomi) selaras dengan upaya konservasi sumber daya agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.

Disamping itu, perlunya pelaksanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan juga terkait dengan semakin meningkatnya apresiasi konsumen yang semakin tinggi dan menuntut suatu destinasi wisata untuk memperhatikan

keseimbangan kualitas lingkungan dan sosial budaya dengan pengembangan ekonomi.

Prinsip-prinsip dan sasaran-sasaran dari Piagam Pariwisata Berkelanjutan yang direkomendasikan UNWTO tahun 2004 adalah bahwa:

- a. Pembangunan pariwisata harus berdasarkan kriteria keberlanjutan dapat didukung secara ekologis dalam waktu yang lama, layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial bagi masyarakat setempat.
- b. Pariwisata harus berkontribusi kepada pembangunan berkelanjutan dan diintegrasikan dengan lingkungan alam, budaya dan manusia.
- c. Pemerintah dan otoritas yang kompeten, dengan partisipasi lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat setempat harus mengambil tindakan untuk mengintegrasikan perencanaan pariwisata sebagai kontribusi kepada pembangunan berkelanjutan.
- d. Pemerintah dan organisasi multilateral harus memprioritaskan dan memperkuat bantuan, langsung atau tidak langsung, kepada proyek-proyek pariwisata yang berkontribusi kepada perbaikan kualitas lingkungan.
- e. Ruang-ruang dengan lingkungan dan budaya yang rentan saat ini maupun di masa depan harus diberi prioritas khusus dalam hal kerja sama teknis dan bantuan keuangan untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan.
- f. Promosi/dukungan terhadap berbagai bentuk alternatif pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
- g. Pemerintah harus mendukung dan berpartisipasi dalam penciptaan jaringan untuk penelitian, diseminasi informasi dan transfer pengetahuan tentang pariwisata dan teknologi pariwisata berkelanjutan.
- h. Penetapan kebijakan pariwisata berkelanjutan memerlukan dukungan dan sistem pengelolaan pariwisata yang ramah lingkungan, studi kelayakan untuk transformasi sektor, dan pelaksanaan berbagai proyek percontohan dan pengembangan program kerjasama internasional.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, dikembangkan indikator-indikator yang dapat dipakai untuk mengukur tingkat keberlanjutan suatu destinasi pariwisata, sebagai arah kemana program pembangunan pariwisata harus



dilakukan atau ukuran keberhasilan yang harus dicapai, jadi bukan semata jumlah kunjungan wisatawan. Indikator-indikator, yang saat ini berjumlah lebih dari 500 indikator, dikelompokkan dalam aspek sebagai berikut:

- a. Kesejahteraan (*wellbeing*) masyarakat tuan rumah;
- b. Terlindunginya aset-aset budaya;
- c. Partisipasi masyarakat;
- d. Kepuasan wisatawan;
- e. Jaminan kesehatan dan keselamatan;
- f. Manfaat ekonomi;
- g. Perlindungan terhadap asset alami;
- h. Pengelolaan sumber daya alam yang langka;
- i. Pembatasan dampak; dan
- j. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.

Dalam penerapan pembangunan pariwisata berkelanjutan Kabupaten Pidie, disamping mempertimbangkan kemampuan daya saing Kabupaten Pidie sebagai destinasi pariwisata, pengembangan pariwisata perlu senantiasa memperhatikan:

- a. Sistem nilai dan identitas ODTW dan destinasi;
- b. Standarisasi pelayanan dan fasilitas pariwisata;
- c. Tingkat pemanfaatan (intensitas) dan perilaku pemanfaatan;
- d. Pengaturan kewilayahan, waktu, dan tingkat pengembangan;
- e. Daya dukung lingkungan dan sosial;
- f. Tingkat keterlibatan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, Rachel Dodds and Marion Joppe (2001) di Toronto mengembangkan “*Green Tourism*” dengan 4 (empat) elemen pokok, yaitu:

- a. *Enviromental Resposibility*  
Elemen ini menyatakan bahwa perlu adanya perlindungan lingkungan dalam upaya untuk menjamin kelangsungan ekosistem wilayah.
- b. *LocalEconomic*  
Pengembangan pariwisata harus mendukung kelangsungan ekonomi komunitas.
- c. *CulturalDiversity*

Dalam pengembangan pariwisata harus mengangkat kekayaan budaya dari masyarakat.

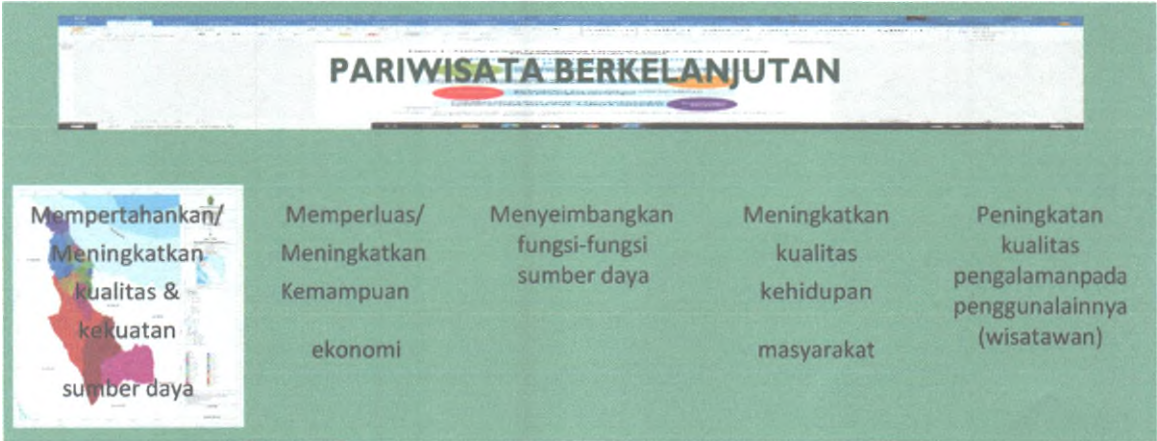
d. *ExperientalRichness*

Perlu dikembangkan aktivitas-aktivitas yang bersifat partisipatif terhadap lingkungan, masyarakat, serta budaya wilayah tersebut.

Untuk menumbuhkan daya saing pada penerapan konsep pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Pidie, secara operasional dilakukan dengan menggunakan kombinasi Pendekatan Berbasis Sumber Daya dan Pendekatan Berbasis Pasar, dengan pemahaman bahwa secara umum Pendekatan Berbasis Sumber Daya dikembangkan dengan mengadopsi pemahaman akan kecenderungan pasar dan lingkungan strategis.

Implementasi konsep Pariwisata Berkelanjutan di Kabupaten Pidie dikembangkan dengan kesadaran bahwa pariwisata merupakan salah satu sector pembangunan yang memiliki ciri pengembangan melalui ketersediaan dan kemampuan sumberdaya pariwisata, kemampuan wilayah, pengorganisasian, dan masyarakat.

Secara operasional, penerapan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Pidie dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 8.2  
Usulan Paradigma Konsep Pariwisata Berkelanjutan diKabupaten Pidie Sebagai Destinasi  
Pariwisata

Sumber: Modifikasi model Manente, 2005



Pembangunan pariwisata melalui pendekatan ini diyakini akan lebih dapat diterima oleh masyarakat dan memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab, dengan tetap memiliki manfaat ekonomi serta menciptakan Efek Berganda yang tinggi. Oleh sebab itu, pengembangan pariwisata di Kabupaten Pidie perlu mempertimbangkan secara cermat faktor-faktor yang saling berkait dan yang diperkirakan akan menjadi faktor pengganggu. Dalam mengembangkan Kabupaten Pidie sebagai destinasi pariwisata, tidak hanya aspek daya tarik sebuah hal yang paling esensial namun aspek-aspek lain perlu diperhatikan.

Dengan demikian, maka diharapkan bahwa pembangunan pariwisata di Kabupaten Pidie dapat tumbuh berkembang secara dinamis dan produktif dalam rangka mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar halaman selanjutnya:



Gambar 8.3  
Implementasi Konsep Pariwisata Berkelanjutan Di Kabupaten Pidie

### 8.2.2 Pendekatan *Honey Pot* (Klaster Pengembangan)

Kawasan Wisata adalah sebuah lokasi dari sekumpulan daya tarik wisata dan fasilitas serta pelayanan wisata dimana wisatawan memilih untuk mengunjungi lokasi tersebut. Konsep dari kawasan wisata sebagai destinasi (masyarakat, dayatarik, dan akses menuju objek) digunakan untuk beberapa alasan. Hal ini memperlihatkan peranan yang signifikan dalam arus wisatawan, penyediaan pelayanan bagi wisatawan. Konsep pengembangan kawasan ini harus memperhatikan prinsip-prinsip penyebaran agar tidak terjadi penumpukan di suatu area tertentu.

Perencanaan pariwisata di Kabupaten Pidie disamping mengadopsi konsep perwilayahan, juga menerapkan pendekatan yang didasarkan kepada pengelompokan-pengelompokan sumber daya yang dimiliki oleh wilayah-wilayah di Kabupaten Pidie. *Honey Pot* adalah sebuah konsep yang dikembangkan dalam suatu wilayah yang memiliki karakteristik pengelompokan fasilitas dan aktivitas, dimana pengelompokan tersebut didasarkan kepada kemampuan daya dukung sumber daya.

Pengembangan konsep *honey pot* merupakan tingkat perencanaan yang meliputi suatu kawasan (*development area*), umumnya tidak memperhatikan batas-batas administratif, dan memiliki sejumlah *site*/atraksi wisata yang potensial. Perencanaan pengembangan klaster (*local area*) merupakan aplikasi *regional tourism plan* atau rencana pariwisata regional secara lebih terinci untuk suatu daerah perencanaan pengembangan destinasi wisata.

Penerapan konsep *Honey Pot* pada pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Pidie adalah sebagai berikut:

a. Jenis dan Karakter Daya Tarik Wisata (DTW)

Kesamaan jenis dan karakter DTW pada suatu lokasi akan efektif dalam pengembangan dan pemasarannya apabila dirangkai dalam suatu jaringan keterkaitan membentuk area pengembangan pariwisata (kawasan wisata) dengan karakter spesifik.

b. Kesamaan Arah dan Cara Pencapaian/ Persiapan Perjalanan

Kesamaan arah dan cara pencapaian ke lokasi pada beberapa DTW akan menguntungkan untuk dikembangkan apabila dirangkai dalam suatu jaringan keterkaitan membentuk satu kawasan pengembangan pariwisata.



c. Efisiensi Waktu Pencapaian

Sebaran sejumlah DTW yang secara waktu tempuh pencapaian dimungkinkan dijangkau dalam waktu yang efisien akan efektif apabila dirangkai dalam suatu jaringan keterkaitan membentuk satu kawasan pengembangan pariwisata.

d. Kedudukan Sebaran Daya Tarik Wisata Secara Geografis

Sebaran DTW pada suatu lokasi yang secara fisik berdekatan akan efektif apabila dirangkai dalam suatu jaringan keterkaitan yang membentuk satu zona pengembangan pariwisata.

Penerapan konsep *honey pot* pada pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Pidie memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Memperkuat identitas kawasan/klaster.
- b. Menumbuh kembangkan kapasitas kawasan dan hubungan intra kawasan.
- c. Menumbuh kembangkan nilai beda antar kawasan dan hubungan antar kawasan.
- d. Menghindari konflik pemanfaatan yang tidak sesuai (fasilitas, aktivitas).
- e. Meningkatkan daya dukung wilayah (pertimbangan lingkungan).

### 8.3 Konsep Pembangunan Pariwisata

Dalam konsep kepariwisataan terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui sebagai dasar pemahaman mengenai kepariwisataan. Beberapa terminologi tersebut diantaranya adalah wisata, pariwisata, dan kepariwisataan.

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pengertian wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Selain itu, sebagai padanan kata pariwisata diartikan sebagai perjalanan sementara yang dilakukan seseorang di luar tempat di mana ia biasa tinggal dan bekerja, untuk maksud diluar mencari nafkah tetap. Termasuk dalam pengertian ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan tersebut dan berbagai fasilitas yang digunakan untuk mengakomodasikan kebutuhannya. Sedangkan menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan, pariwisata diartikan sebagai berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Di samping itu, kepariwisataan digunakan sebagai padanan kata *tourism* dalam konteks kesisteman yang luas, mencakup keterkaitan antara pasar wisatawan, daerah tujuan wisata, dan upaya-upaya untuk menghubungkan antara wisatawan dengan destinasi, misalnya transportasi dan peran pemasaran dan promosi. Mc. Intosh, Goeldner dan Richie (1995) menyatakan bahwa kepariwisataan adalah “Akumulasi dari fenomena dan hubungan yang tumbuh dari interaksi wisatawan, pelaku bisnis, penyedia barang dan jasa, pemerintah dan masyarakat setempat dalam proses menarik dan menjadi tuan rumah bagi sejumlah wisatawan dan pengunjung lainnya”.

Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang tertera pada UUNo.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, di mana kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

Pariwisata dapat dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari empat komponen (Mill and Morrison, 1992) di mana masing-masing komponen tersebut saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh yang lain. Komponen- komponen tersebut adalah:

a. *Market* (pasar)

Keputusan untuk berwisata dan menjadi wisatawan dapat dipahami melalui analisis terhadap segmen pasar. Keputusan berwisata dilakukan jika seseorang telah memahami bahwa berwisata akan memuaskan kebutuhannya. Model perilaku konsumen merupakan salah satu cara untuk memahami proses tersebut.

b. *Destination* (daerah tujuan wisata)

Terdiri dari atraksi dan jasa yang dikonsumsi oleh wisatawan; masing-masing memiliki ketergantungan yang tinggi untuk mencapai kesuksesan suatu destinasi.

c. *Travel* (perjalanan)



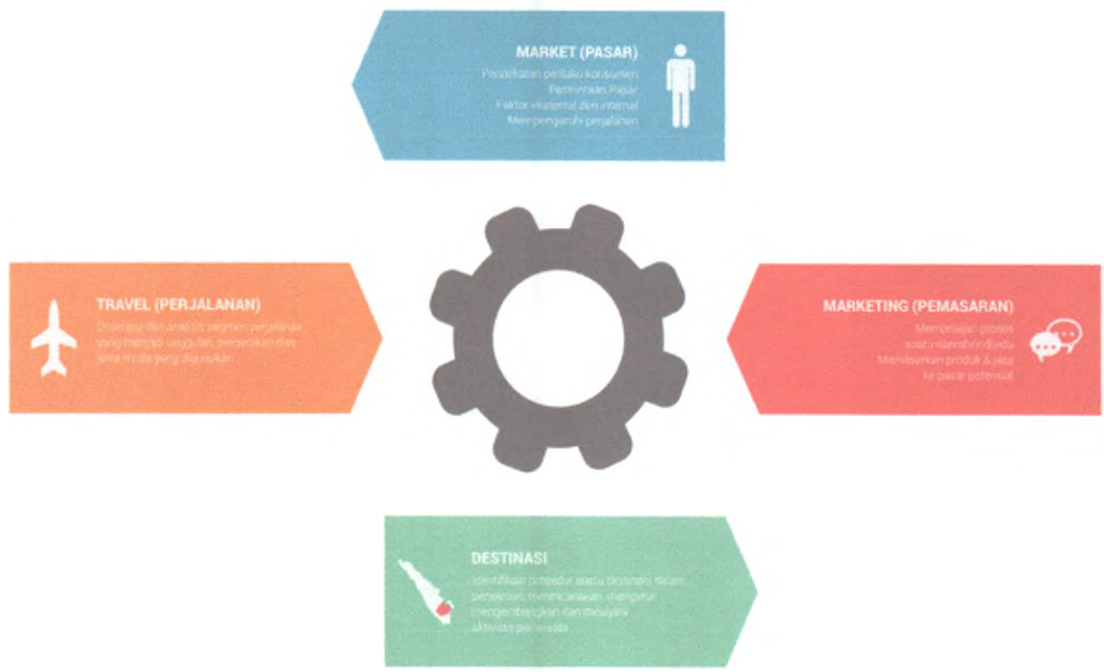
Pemilihan ke mana, kapan, dan bagaimana perjalanan tersebut akan dilakukan diperlukan untuk mengetahui pola perjalanan wisatawan *eksisting*, regional, nasional, internasional, dan memperkirakan pola perjalanan di masa yang akan datang.

d. *Marketing* (pemasaran)

Pengembangan rencana pemasaran, pemilihan *marketing mix* yang sesuai, serta pemilihan jalur distribusi akan menentukan sukses tidaknya usaha destinasi mendorong wisatawan untuk datang.

Di dalam system kepariwisataan yang paling mendasar, ada tiga elemen dasar yang di dalamnya dapat menjadi isu strategis sebagai fokus pertimbangan dalam kajian kepariwisataan itu sendiri yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan wisatawan, yang mencakup sektor industri pariwisata serta elemen geografi dalam seluruh perjalanannya. Cooper et. al (1993) menyebutkan tiga elemen dasar tersebut, yaitu:

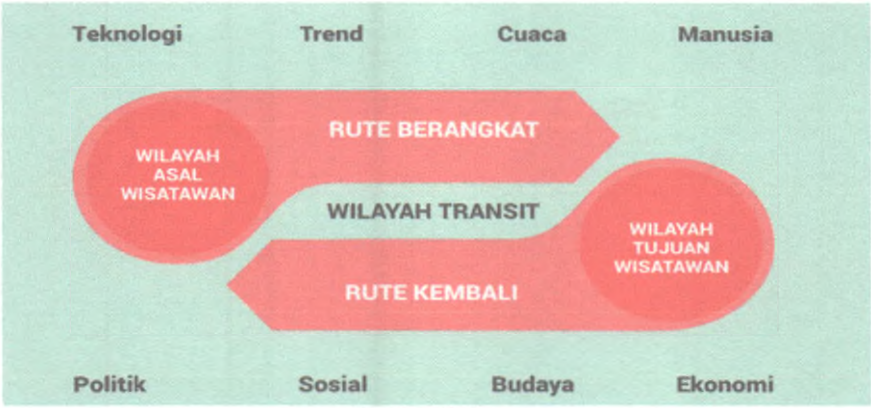
- a. Wisatawan : yang memegang peranan utama dalam sistem. Bagaimana pun pariwisata adalah pengalaman manusia yang dinikmati, diantisipasi dan dikenang sebagai sesuatu yang menyenangkan.
- b. Elemen Geografik, yang terdiri dari :
  - 1) Daerah asal pengunjung (pasar) di mana terdapat faktor-faktor pendorong yang memotivasi perjalanan,
  - 2) Daerah tujuan wisata, yang merupakan tujuan akhir, tempat tumbuhnya faktor-faktor penarik, dan
  - 3) Daerah transit, yang dilintasi dalam perjalanan, dapat juga menjadi daerah tujuan antara.
- c. Industri pariwisata, berbagai bisnis dan organisasi yang terlibat dalam pengadaan produk wisata. Industri pariwisata sangat tergantung pada berbagai sector lain dalam mencapai keberhasilan.



Gambar 8.4  
Sistem Kepariwisata

Sumber: Mill and Morisson, 1992

Elemen-elemen tersebut di atas yang telah dijelaskan sebelumnya berasal dari sebuah model yang disebut sebagai *Leiper's model*, dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 8.5  
*Leiper's Model* –Sistem Dasar Kepariwisata  
Sumber: Leiper(1990) dalam Cooperetal.(1993)



Dari gambar tersebut, dapat disimpulkan juga, bahwa pariwisata sebagai suatu system sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, teknologi, tren global, cuaca dan iklim, manusia, dan lain sebagainya. Faktor-faktor eksternal tersebut sering kali menjadi faktor di luar kendali pariwisata.

#### **8.4 Visi Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pidie**

Dalam RIPPARDA Kabupaten Pidie yang diangkat menjadi Visi pembangunan Kepariwisataan adalah :

##### **“Pembangunan Kepariwisataan Yang Berkualitas, Bertanggung Jawab dan Berdaya Saing”**

Visi tersebut dikembangkan berdasarkan pemahaman bahwa:

1. Pariwisata Berkualitas, menjabarkan bahwa pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pidie saat ini telah memberikan perubahan ke tingkat kemajuan berdasarkan perkembangan indikator pembangunan destinasi pariwisata dan peningkatan jumlah kunjungan, diperlukan penguatan agar tidak hanya sekedar kemajuan melainkan kemajuan yang berkualitas. Oleh karenanya pembangunan pariwisata Pidie kedepan harus dirancang sedemikian rupa sehingga secara efektif harus berdampak terhadap pertumbuhan dan pembangunan daerah yang tinggi, percepatan penanggulangan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dan berusaha dengan tetap menjaga dan memelihara kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup guna pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pembangunan Kepariwisataan juga tidak hanya sekedar kuantitas tetapi kedepan lebih ditekankan kepada kualitas.
2. Pariwisata yang Bertanggung Jawab menjabarkan bahwa pengembangan pariwisata Kabupaten Pidie harus berpijak pada prinsip-prinsip *pro job, pro growth, pro poor* dan *pro environment*, serta tidak terlepas dari adanya nilai-nilai budaya masyarakat Kabupaten Pidie.
3. Berdaya Saing Nasional menggambarkan kapasitas dan kapabilitas Kabupaten Pidie yang mampu bersaing dan berperan aktif dalam kerjasama dan hubungan antar daerah serta nasional khususnya di sektor pariwisata. Penetrasi yang

dilakukan dalam berbagai kesempatan kegiatan skala besar akan mejadikan Kabupaten Pidie menjadi daerah tujuan wisata berskala nasional. Terkandung didalamnya kekayaan sumber daya manusia dan sumberdaya pariwisata daerah Kabupaten Pidieyang berlimpah, yang masih harus dimanfaatkan secara profesional, inovatif, dan berkelanjutan serta mampu mendorong pembangunan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

### **8.5 Misi Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pidie**

Berdasarkan visi tersebut, maka misi yang diusulkan dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pidie adalahsebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan dan Pengelolaan terhadap sumber daya kepariwisataan sehingga dapat berdaya saing dalam upaya meningkatkan kinerja ekonomi daerah serta peningkatan taraf hidup masyarakat;
- 2) Optimalisasi potensi sumberdaya alam, budaya, dan SDM sebagai pendukung terciptanya pariwisata Pidie yang berwawasan lingkungan, bertanggungjawab dan Berkelanjutan.
- 3) Pengembangan Daerah tujuan Wisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 4) Pengembangan pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan Wisatawan baik regional maupun nasional;
- 5) Pengembangan industry Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawabatas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya;
- 6) Pengembangan sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Kepariwisataan yang berkelanjutan; dan
- 7) Penciptaan masyarakat yang mandiri, bertanggung jawab, dan berdayasaing untuk mendukung tercapainya pariwisata Pidie sebagai destinasi pariwisata unggulan di Provinsi Aceh.



### **8.6 Tujuan Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pidie**

- a. Menciptakan kepariwisataan di Kabupaten Pidie sebagai destinasi unggulan tingkat regional dan nasional dengan mengembangkan Daya Tarik Wisata Alam, Budaya, Kuliner, Buatan, Rekreasi dan serta Buatan secara terpadu dan berkelanjutan sebagai pariwisata unggulan di Provinsi Aceh.
- b. Mengembangkan Daya Tarik Wisata Berbasis Potensi dan Karakteristik Kawasan dan Masyarakat lokal.
- c. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dan pemeliharaan aset-aset dan potensi pariwisata di Kabupaten Pidie.
- d. Mewujudkan media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra Kawasan Pariwisata Daerah dan apresiasi terhadapnya sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan local dan wisatawan nusantara;
- e. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antar usaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- f. Mengembangkan lembaga pariwisata dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri pariwisata, kawasan pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.
- g. Meningkatkan peran dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pidie, khususnya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata dalam menghadapi persaingan yang lebih tinggi di dunia kepariwisataan regional dan nasional.
- h. Mengoptimalkan manfaat yang diterima masyarakat Pidie dari pengembangan pariwisata daerahnya dengan membuka seluas-luasnya kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung maupun tidak langsung pada setiap Tahap pengembangan pariwisata.

Dalam makalahnya pada acara Diskusi Pengembangan Pariwisata Bahari di Pulau- Pulau Kecil, Bogor. DR. Sapta Nirwandar, Dirjen Pemasaran Pariwisata Dalam

Negeri Kementrian Kebudayaan Republik Indonesia, menyampaikan bahwa pembangunan kepariwisataan pada dasarnya ditujukan untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut :

a. Peningkatan Perekonomian dan Industri Pariwisata

Pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan kepada industri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa. Syarat utama dari hal tersebut di atas adalah kemampuan usaha pariwisata setempat dalam memberikan pelayanan berkelas dunia dengan menggunakan bahan dan produk lokal yang berkualitas.

b. Penghapusan Kemiskinan (*Poverty Alleviation*)

Pembangunan pariwisata seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah seharusnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pariwisata akan mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi lain selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata.

c. Pembangunan Berkesinambungan (*Sustainable Development*)

Dengan sifat kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramahan pelayanan, sedikit sekali sumberdaya yang habis digunakan untuk menyokong kegiatan ini. Bahkan berdasarkan berbagai contoh pengelolaan kepariwisataan yang baik, kondisi lingkungan alam dan masyarakat di suatu destinasi wisata mengalami peningkatan yang berarti sebagai akibat dari pengembangan kepariwisataan di daerahnya.

d. Pelestarian Budaya (*Culture Preservation*)

Pembangunan kepariwisataan seharusnya mampu memberi kontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya suatu negara atau daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya negara atau daerah. UNESCO dan UN-WTO dalam resolusi bersama mereka di tahun 2002 telah



menyatakan bahwa kegiatan pariwisata merupakan alat utama pelestarian kebudayaan. Dalam konteks tersebut, sudah selayaknya bagi Indonesia untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian kebudayaan di berbagaidaerah.

e. Pemenuhan Kebutuhan Hak Hidup dan Hak Azasi Manusia

Pariwisata pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat modern. Pada beberapa kelompok masyarakat tertentu kegiatan melakukan perjalanan wisata bahkan telah dikaitkan dengan hak azasi manusia khususnya melalui pemberian waktu libur yang lebih panjang dan skema *paid holidays*.

f. Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Pariwisata mampu memberikan perasaan bangga dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan oleh penduduknya ke seluruh penjuru negeri. Sehingga dengan banyaknya warga negara yang melakukan kunjungan wisata di wilayah-wilayah selain tempat tinggalnya akan timbul rasapersaudaraandan pengertian terhadap sistem dan filosofi kehidupan masyarakat yang dikunjungi sehingga akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional.

g. Pengembangan Teknologi

Dengan semakin kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan ke suatu destinasi, kebutuhan akan teknologi tinggi khususnya teknologi industri akan mendorong destinasi pariwisata mengembangkan kemampuan penerapan teknologi terkini mereka. Pada daerah-daerah tersebut akan terjadi pengembangan teknologi maju dan tepat guna, yang akan mampu memberikan dukungan bagi kegiatan ekonomi lainnya. Sebaliknya, arus pengunjung yang datang ke suatu daerah juga secara terus menerus akan membawa perubahan cara dan metode orang berkomunikasi dan berinteraksi, yang pada akhirnya dapat membawa masyarakat lokal untuk mengadopsi alih teknologi dalam melakukan kegiatan usaha dan kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian maka pembangunan kepariwisataan harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang terlibat di dalamnya (para *stakeholders*), yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, pengusaha,

dan juga kepentingan wisatawan itu sendiri.

Secara garis besar, berbagai kepentingan para *stakeholders* dalam pembangunan kepariwisataan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Perlindungan terhadap wisatawan dan pemberian kemudahan dalam penyediaan informasi.
- 2) Keikutsertaan penduduk setempat dalam kegiatan kepariwisataan dan secara adil menikmati keuntungan ekonomi, sosial, dan budaya.
- 3) Kebijakan pariwisata harus diarahkan sedemikian rupa agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.
- 4) Kebijakan dan kegiatan pariwisata harus diarahkan dalam rangkaian:
  - Penghormatan, perlindungan, pemeliharaan terhadap warisan kekayaan seni, arkeologi, budaya, monumen, tempat suci, museum, tempat bersejarah;
  - Kelangsungan hidup dan berkembangnya hasil-hasil budaya, seni tradisional dan seni rakyat;
  - Menjaga kelestarian lingkungan alam, dalam perspektif pertumbuhan ekonomi yang sehat, berkelanjutan dan berkesinambungan;
  - Tersedianya informasi yang objektif tentang tempat-tempat tujuan dan kondisi perjalanan kepada wisatawan;
  - Menjamin keamanan, keselamatan dan asuransi bagi wisatawan.



# 9 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA

## 9.1 Kebijakan Pembangunan Pariwisata

Kebijakan pembangunan kepariwisataan adalah arahan pembangunan yang dirumuskan dan ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan kepariwisataan daerah, mencakup aspek pengembangan destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan. Kebijakan pengembangan kepariwisataan merupakan pendekatan dari konsep yang dirumuskan yang akan dijadikan acuan dalam pengembangan kepariwisataan daerah.

Kebijakan pembangunan kepariwisataan Pidie memiliki fungsi sebagai dasar dalam perumusan strategi pengembangan kepariwisataan daerah, memberikan arah bagi perumusan rencana pengembangan kepariwisataan daerah, memberikan arah bagi perumusan strategi dan program pengembangan industri, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan, serta sebagai dasar dalam perumusan perangkat pemantauan dan pengendalian kepariwisataan daerah.

Keberhasilan pembangunan suatu destinasi pariwisata (Swarbrooke, 2002) sangat dipengaruhi dipengaruhi oleh:

1. *The organization and its resources*. Yaitu keberhasilan yang dilihat dari pengalaman pengelola dalam mengelola dan mengembangkan atraksi wisata. Selain itu terlihat pula aspek financial yang berfungsi untuk menjaga standar dari fasilitas maupun pelayanan.
2. *The Product*, merupakan keberhasilan yang bisa ditunjang dengan pendekatan dan ide-ide baru, lokasi, keberagaman di atraksi wisata tersebut, lingkungan yang berkualitas, fasilitas penunjang serta *value of money*.
3. *The market*, keberhasilan suatu atraksi wisata didasarkan atas growth market dan consumer behaviour trends pada wisatawan yang mengunjungi objek atau kawasan wisata tertentu.
4. *The management of the attraction*, keberhasilan yang ditunjang karena keberadaan manajemen yang baik dan professional.

Berdasarkan kepada Rencana Strategis yang ada maka pembangunan pariwisata dilakukan dengan menyusun perencanaannya. Perencanaan yang komprehensif dan terpadu, yang di dalamnya terdapat program, penTahap an, pendanaan, pelaksanaan dan lembaga terkait.

#### A. Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata berperan dalam langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Strategi Nasional Pembangunan Industri Pariwisata.
- 2) Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional dan Jaringannya.
- 3) Pemantapan Strategi dan Kebijakan Pembangunan Pariwisata yang berkelanjutan, *integrated*, berwawasan lingkungan, berbasis masyarakat, berbasis seni budaya, alam dan kualitas produk pariwisata serta peningkatan diversifikasi.
- 4) Pengembangan dan pemantapan strategi pemasaran dan promosi Pariwisata Nasional berdasarkan analisa pasar dan pengembangan lembaga riset serta menciptakan iklim usaha yang kondusif.
- 5) Pengembangan profesionalisme SDM Pariwisata,
- 6) Penyusunan perundangan, peraturan, pedoman, standarisasi, Norma dan etika.
- 7) Sosialisasi (Perundangan, peraturan, pedoman, standarisasi, Norma dan etika) pembuatan slogan, dan himbuan pelaksanaan Sapta Pesona.
- 8) Pengembangan jaringan antar lembaga, antar wilayah, antar Negara, antar pelaku pariwisata.

#### B. Pemerintah Kabupaten Pidie

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas terkait lainnya berperan dalam langkah- langkah sebagaiberikut:

- 1) Menyiapkan strategi dan kebijakan pembangunan industri pariwisata Provinsi yang berkelanjutan, *integrated*, berwawasan lingkungan, berbasis masyarakat, menciptakan lapangan kerja, pro jender, berbasis seni, budaya, alam dengan peningkatan diversifikasi yang kreatif serta kualitas produk pariwisata.
- 2) Pengembangan dan pemantapan strategi pemasaran serta promosi destinasi berdasarkan analisa pasar serta menciptakan iklim usaha yang kondusif. Kualitas dan efektifitas pemasaran tergantung pada:
  - a) Kualitas analisa pasar;



- b) Kualitas media promosi;
  - c) Kualitas bahan promosi;
  - d) Kualitas strategi promosi; dan
  - e) Kemampuan, etika dan profesionalisme SDM Pemasaran dan promosi.
- 3) Peningkatan kualitas dan kekuatan daya saing destinasi dengan mengingat kapasitas, daya dukung dan kemampuan maksimalnya.
  - 4) Peningkatan kualitas dan strategi jejaring, kerjasama dan kemitraan yang berasaskan saling menguntungkan antar Kabupaten/Kota, antar wilayah pengembangan pariwisata dan antar pelaku/masyarakat serta antar sektor pendidikan, perusahaan, kebudayaan, dan perdagangan.
  - 5) Pemantapan instrument regulasi dan kebijakan provinsi di bidang Pariwisata serta tindak implementasinya.
  - 6) Pengembangan jaringan sistim informasi pariwisata Provinsi berdasarkan pemanfaatan teknologi dan berbasis sistim pendataan yang akurat dan selalu diperbaharui.
  - 7) Peningkatan dan Pengembangan infrastruktur, sarana, prasarana dan jaringan utilitas antar Kabupaten/Kota yang berkualitas.
  - 8) Mendorong peningkatan kualitas aksesibilitas luar objek antar Kabupaten/Kota (Terjangkau, lancar, memadai, murah, onformatif dan variatif jenisnya).
  - 9) Peningkatan kualitas SDM (Profesional, etika, trust, kemampuan produsen).
  - 10) Peningkatan kualitas manajemen/kelembagaan/pengelolaan (pemberdayaan) dan fasilitasi. Pemberdayaan Masyarakat merupakan sebuah upaya untuk mengikutsertakan peran masyarakat dalam industri pariwisata. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan salah satu atau seluruh komponen yang terdapat dalam kawasan objek atau produk wisata akan diharapkan meningkatkan ekonomi masyarakat. Ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap keberadaan wisata akan menumbuhkan kepedulian masyarakat pada kelestarian dan kualitas objek tersebut dan akhirnya masyarakatlah yang akan menjaga keamanan, kesehatan, kenyamanan dan kualitas lingkungannya.

- 11) Pengembangan inovasi (penelitian, riset, kajian dan terobosan) dan kemasan (unik kreatif, variatif, pemanfaatan teknologi) untuk meningkatkan daya tarik produk dan destinasi.
- 12) Mendorong peningkatan kualitas kesehatan dalam destinasi (lingkungan, masyarakat, makanan) dan tindak keselamatan.
- 13) Memfasilitasi penyelenggaraan event-event kepariwisataan atau menunjang program kepariwisataan (pertunjukan, olahraga, pameran kerjasama) yang bertaraf internasional, nasional, dan tingkat Provinsi.
- 14) Melaksanakan, mensosialisasikan program-program pusat.

Kebijakan pembangunan destinasi Kabupaten Pidie adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan Destinasi Pariwisata Daerah, Kawasan Pariwisata Daerah dan mensinergikan pengembangan daya tarik wisata dengan rencana pengembangan aksesibilitas.
- 2) Membangun dan meningkatkan kondisi sarana dan prasarana wisata.
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kunjungan wisata, dan upaya-upaya pemasaran pariwisata daerah.
- 4) Mengembangkan lingkungan destinasi pariwisata yang berkualitas (*healthy, safety, environment & security*).
- 5) Meningkatkan upaya-upaya konservasi dan pelestarian sumberdaya alam, budaya, dan binaan.
- 6) Meningkatkan pengawasan terhadap spontanitas pertumbuhan pariwisata.

## 9.2 Strategi Pembangunan Kepariwisata

Strategi pembangunan kepariwisataan daerah adalah rumusan pilihan cara atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan pembangunan kepariwisataan daerah. Strategi pembangunan kepariwisataan daerah merupakan skenario pembangunan kepariwisataan yang bersifat multidimensi dan lintas sektor.

Strategi pembangunan kepariwisataan Pidie memiliki fungsi sebagai dasar dalam perumusan rencana dan program pembangunan destinasi pariwisata daerah, memberikan



arah dalam perumusan strategi dan program pembangunan aspek industri pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan sebagai satu kesatuan yang saling terkait, serta sebagai acuan dalam pembangunan perangkat pemantauan implementasi RIPPARDA untuk aspek destinasi pariwisata. Strategi utama pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Pidie yang disesuaikan dengan visi pengembangan kepariwisataan adalah:

Strategi umum dalam Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Pidie diantaranya:

- 1) Penentuan Destinasi Pariwisata Kabupaten yang di dalamnya terdapat Kawasan Pembangunan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten, berserta Daya Tarik Wisata Daerah.
- 2) Perencanaan pembangunan Kawasan Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten.
- 3) Menyusun rencana induk dan rencana detail Pembangunan Kawasan Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten.
- 4) Menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan Kawasan Pariwisata Kabupaten Pidie dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten.
- 5) Penegakan Regulasi Pembangunan Kawasan Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten.
- 6) Strategi pembangunan kepariwisataan daerah merupakan skenario pembangunan kepariwisataan yang bersifat multidimensi, multidisiplin dan multisektoral.
- 7) Strategi pembangunan kepariwisataan daerah memiliki fungsi sebagai dasar dalam perumusan rencana dan program pembangunan destinasi pariwisata daerah, memberikan arah dalam perumusan strategi dan program pembangunan aspek destinasi pariwisata, industri pariwisata, pasar dan pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan sebagai satu kesatuan yang saling terkait, serta sebagai acuan dalam pembangunan perangkat pemantauan.

#### **9.2.1 Strategi Pembangunan Daya Tarik Wisata**

- 1) Peningkatan kualitas objek/daya tarik wisata yang telah ada dan diperkirakan laku dijual ke pasar wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Pengembangan DTW diutamakan instansi terkait (Dinas Pariwisata, dll). Pengembangan DTW dapat dimulai dari potensi yang

selama ini menonjol di Kabupaten Pidie yaitu wisata alam, budaya dan bahari.

- 2) Identifikasi objek/daya tarik wisata dari potensi-potensi yang telah dimiliki oleh Kabupaten Pidie yang diperkirakan dapat dijual ke pasar wisatawan nusantara maupun mancanegara.
- 3) Penciptaan objek dan daya tarik wisata baru yang mampu memfasilitasi Kabupaten Pidie sebagai wisata MICE yang dapat menjadi penggerak kegiatan pariwisata, kegiatan wisata pada waktu malam dan meningkatkan lama tinggal (LOS).
- 4) Identifikasi dan pengembangan ODTW yang menjadi konservasi hutan.

#### **9.2.2 Strategi Pengembangan Hotel dan Akomodasi**

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan hotel secara profesional kepariwisataan, termasuk peningkatan hotel kelas *non-classified* dan pondok wisata/*home stay*.
- 2) Penambahan jumlah kamar hotel maksimal sebanyak 500 kamar hotel sampai dengan tahun 2022.
- 3) Penataan ruang kawasan pengembangan Hotel, khususnya kawasan Hotel dan Pondok Wisata/*home stay*.

#### **9.2.3 Strategi Pengembangan Restoran/Rumah Makan**

- 1) Pengembangan Rumah Makan/Restoran ditekankan pada pengembangan kualitas dari pada kuantitas.
- 2) Lokasi Restoran perlu disebarkan/didistribusikan untuk mengurangi tingkat kepadatan kegiatan yang berakibat pada menurunnya kualitas kenyamanan wisata.
- 3) Standarisasi pelayanan rumah makan dan penentuan standar pelayanan minimum untuk wisatawan.

#### **9.2.4 Strategi Pengembangan Biro Perjalanan Wisata (BPW)**

- 1) Meningkatkan target jumlah wisatawan yang diharapkan dapat dilayani oleh BPW.



- 2) Meningkatkan jumlah BPW.
- 3) Meningkatkan kinerja BPW kearah lebih professional, memperluas jaringan bisnis ke berbagai pasar wisata di luar negeri, serta meningkatkan kerjasama professional dengan pelaku industri pariwisata yang lain.
- 4) Menekan serendah-rendahnya prosentase komisi.

#### **9.2.5 Rencana Strategis Pengembangan Pasar Wisata**

- 1) Pasar wisata budaya (Mancanegara) potensial yang menjadi target pariwisata di Kabupaten Pidie adalah pasar wisata dari Negara-negara Asia seperti Singapura, Malaysia, Brunei, dll. Namun peluang pasar Eropa dapat dilakukan seperti Belanda, Inggris, dll.
- 2) Pasar wisata budaya (nusantara/nasional) potensial yang menjadi sasaran Kabupaten Pidie adalah wisatawan yang berasal dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Palembang, Jakarta, dll.
- 3) Pasar wisata nasional yang dapat diraih sebagai prioritas selanjutnya adalah wisatawan pelajar dan mahasiswa.
- 4) Pengembangan limpahan wisatawan asing yang sedang dan sudah mengunjungi Negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

#### **9.2.6 Rencana Strategis Pengembangan Pemasaran dan Promosi Wisata**

- 1) Penyusunan rencana pengembangan promosi dan pemasaran secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan semua ahli, berdasar atas pasar/segmen pasar potensial dan ODTW dan komponen produk lain yang dimiliki akan dikembangkan untuk dimiliki, memanfaatkan media promosi yang tersedia dan dapat disediakan, dengan tujuan untuk menciptakan penyebaran promosi yang lebih terencana, serta proses pemasaran dan promosi yang dimulai sejak penyusunan rencana pengembangan pariwisata.
- 2) Pemasaran dan promosi pariwisata dilaksanakan berdasarkan atas perencanaan yang matang, dan mengacu pada rencana pengembangan yang telah ditetapkan, dan bukan mengacu pada keinginan golongan tertentu ataupun pejabat tertentu.
- 3) Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pemasaran dan promosi dilakukan oleh Badan Promosi.

### **9.2.7 Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia**

- 1) Penyebarluasan secara sistematis pengertian pariwisata berikut komponen terkait, dan konsep pengembangan pariwisata Kabupaten Pidie kepada masyarakat Kabupaten Pidie secara umum dan masyarakat pariwisata Kabupaten Pidie secara khusus (bukan hanya pada kalangan birokrasi dan institusi tertentu saja).
- 2) Menciptakan kesempatan dan menyelenggarakan pendidikan formal dan pendidikan non formal mengenai segala aspek dan komponen pariwisata dari tingkat teknis sampai dengan pemikir/peneliti secara piramida.
- 3) Menciptakan kesempatan pendidikan diberikan tidak saja kepada masyarakat yang telah melakukan kegiatan bidang pariwisata, tetapi juga masyarakat umum yang tertarik/ditarik dalam kegiatan pariwisata dengan prioritas terhadap mereka yang telah/sedang melakukan kegiatan di bidang pariwisata.
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang melakukan kegiatan di bidang pariwisata sesuai kompetensi bidang kerja lebih diutamakan daripada kuantitas, sedangkan jumlah orang yang bekerja secara formal dalam bidang pariwisata diupayakan mengikuti hirarki piramida menurut kemampuan, kualitas, jejaring pengetahuan dan keterampilan.
- 5) Menciptakan motivasi yang kuat terhadap sumberdaya manusia yang bekerja pada instansi pemerintah yang menangani pariwisata agar “pro-aktif” dalam membina, memimpin, mengkoordinasi, memberi contoh dan memberi kesempatan kepada kalangan industri pariwisata dan masyarakat umum dalam mengembangkan pariwisata.

### **9.2.8 Strategi Pengembangan Kelembagaan**

- 1) Memperjelas dan mempertegas peran (tugas fungsi dan wewenang) khususnya lembaga pemerintah, beserta pelaksanaan/konsekuensi peran tersebut.
- 2) Melakukan reorganisasi, khususnya lembaga/instansi pemerintah yang menangani bidang pariwisata dan bidang terkait (seperti perindustrian, perdagangan, jasa, keamanan, lingkungan, kesenian dan budaya, pajak dan pendapatan daerah, transportasi dan telekomunikasi serta pendidikan kepariwisataan).



- 3) Menciptakan iklim yang kondusif untuk mengembangkan kinerja masing-masing lembaga yang terkait dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata termasuk sektor pemerintah, swasta, BGO dan masyarakat.
- 4) Menciptakan "*link and match*" antara pendidikan kepariwisataan dengan lapangan kerja kepariwisataan secara lebih merata. Tidak terfokus pada sektor tertentu yang diidentifikasi dapat mendatangkan keuntungan lebih besar.
- 5) Memberi peran yang luas dan memotivasi secara terus-menerus kepada lembaga swasta yang bergerak di bidang kepariwisataan untuk menciptakan dan mengembangkan peluang dalam pengembangan pariwisata seluas-luasnya.
- 6) Menciptakan peluang dan mendorong masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yang tertarik untuk bergerak di bidang pariwisata, baik yang telah bergerak di bidang pariwisata maupun yang belum, untuk mengembangkan diri berdasar atas tatanan yang telah dirumuskan.

#### 9.2.9 Strategi Pengembangan Aksesibilitas

- 1) Angkutan Bus Wisata dan Rute Bus Wisata. Angkutan bus wisata direncanakan untuk dapat didorong memanfaatkan lokasi parkir yang disediakan untuk mereka. Jenis bus wisata perlu didorong untuk melakukan segmentasi dalam ukuran kendaraan, sehingga keberadaan bus wisata, terutama yang berukuran besar tidak memberikan gangguan lalu lintas bagi pengguna jalan lain, terutama periode sibuk.
- 2) Fasilitas Pejalan Kaki. Sebagai komponen wisata yang sangat penting dalam meningkatkan keberlanjutan ODTW, fasilitas pejalan kaki pada ODTW maupun pada lokasi-lokasi lain dengan mendasarkan pada konsep bahwa fasilitas pejalan kaki adalah komponen atraksi, bukan komponen yang membebani pengguna fasilitas. Dengan kata lain, fasilitas pejalan kaki tidak boleh dilihat sebagai prasarana yang semata-mata akan melelahkan pemakai, atau merekayasa pejalan kaki untuk membeli cinderamata (melalui pengaturan rute dan mengharuskan pejalan kaki melewati toko-toko tertentu). Dengan demikian, penataan fasilitas pejalan kaki harus melihat faktor-faktor iklim mikro, penataan muka bangunan dan street furniture.

- 3) Fasilitas Parkir dan Terminal. Lokasi dan fasilitas parkir untuk angkutan wisata harus direncanakan dengan melihat kompromi antara jarak pencapaian, serta aktivitas lokasi dan ODTW apabila lokasi parkir terlalu dekat. Oleh karenanya, fasilitas parkir harus terintegrasi dengan perencanaan fasilitas pejalan kaki.
- 4) Jaringan Jalan. Jaringan jalan perlu didesain untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi objek dan daya tarik wisata utama yang akan dikembangkan agar mampu melayani kebutuhan angkutan wisata yang melalui jalan tersebut. Rekomendasi rute wisata perlu diiringi dengan penyesuaian fasilitas terutama lebar jalan bagi bis-bis wisata ukuran besar. Jaringan jalan diutamakan jalur yang menghubungkan Kota Palembang sebagai Pusat Wisata Sumatera Selatan dengan Kabupaten/Kota yang ada terutama yang terdapat ODTW sudah siap dipasarkan. Jaringan jalan juga dikembangkan bertahap dari Kota sebagai basecamp pusat WPP ke ODTW yang sekitarnya.
- 5) Sistem Informasi Transportasi. Sistem informasi transportasi merupakan rencana yang paling utama dalam penyediaan aksesibilitas bagi wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara. Penyediaan informasi dan sistem perolehan informasi harus direncanakan secara terintegrasi dan terbaharui untuk setiap moda angkutan dan setiap titik transfer utama. Informasi bilingual dalam bentuk *How to Go There* merupakan komponen utama dalam penyediaan informasi. Informasi mengenai rute perlu disosialisasikan pada pengunjung. Perlu pula direncanakan institusi yang bertanggung jawab dan mekanisme penyediaan informasi sehingga ketersediaan informasi ini dapat dipertanggung jawabkan.

Tabel 9.1  
Tujuan Pengembangan Pariwisata

| TUJUAN PENGEMBANGAN<br>PARIWISATA                     |                                             |                                                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| SASARAN                                               | STRATEGI                                    | ARAH KEBIJAKAN                                            |
| 1. Berkembangnya Jasa Pariwisata                      | Pengembangan Destinasi Wisata yang Modern   | Meningkatkan parasarana & sarana pariwisata               |
| 2. Meningkatnya kesempatan kerja di sektor pariwisata | Pengembangan Sumber daya Manusia Pariwisata | Mengembangkan pusat-pusat pendidikan & latihan Pariwisata |



|                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | Peningkatan investasi di Sektor Pariwisata                                                      | Memperluas kerjasama & kemitraan pariwisata                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. Meningkatnya nilai tambah objek wisata                   | Peningkatan mutu layanan wisata                                                                 | 1) Mengembangkan standar mutu layanan pariwisata<br>2) Meningkatkan pengetahuan & keterampilan pariwisata                                                                                                                                                                      |
|                                                             | Pengembangan ekonomi kreatif                                                                    | 3) Mengembangkan industri kecil dan kerajinan rumah tangga                                                                                                                                                                                                                     |
| 4. Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha pariwisata | Pengembangan Wisata daerah berbasis Komunitas                                                   | 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata<br>2) Mengembangkan wisata seni & budaya<br>3) Mengembangkan wisata olah raga<br>4) Mengembangkan wisata kuliner<br>5) Mengembangkan wisata religius<br>6) Memperluas jaringan promosi & pemasaran Pariwisata |
| 5. Meningkatnya pendapatan daerah dari usaha pariwisata     | Pengembangan system pengelolaan pajak dan retribusi dari pariwisata yang transparan & akuntabel | 1) Mengembangkan sistem informasi pencatatan & pengumpulan pajak & retribusi<br>2) Meningkatkan pengendalian & pengawasan pengelolaan pajak & retribusi Pariwisata                                                                                                             |

# 10 RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA

## 10.1 Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata

Perwilayahan destinasi pariwisata di Kabupaten Pidie diantaranya:

### 1) Destinasi Pariwisata Daerah (DPD)

Destinasi Pariwisata Daerah atau DPD merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata, yang diantaranya merupakan KSPD atau Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.

DPD memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara provinsi, nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan.

DPD memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan Daya Saing serta memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan dan memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

### 2) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)

KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek (Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata).

Kawasan strategis pengembangan pariwisata provinsi ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria yang dikembangkan sesuai aspek- aspek yang tercantum dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, dengankriteria:

- a) Memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
- b) Memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- c) Memiliki potensi pasar, baik skala Kabupaten/Kota secara khusus, Provinsi dan Nasional secara umum.



- d) Memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e) Memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f) Memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g) Memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
- h) Memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i) Memiliki kekhususan dari wilayah;
- j) Berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial dalam lingkup Kabupaten/Kota dan Nasional; dan
- k) Memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

### 3) Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah (KPPD)

KPPD Berdasarkan PP No. 50 Tahun 2011 Tentang RIPPARNAS, sebagai berikut:

- a) Merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten/kota dan/atau lintas kabupaten/kota yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata daerah;
- b) Memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional dan/atau nasional dan/atau internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
- c) Memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- d) Memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan Kepariwisata; dan
- e) Memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

Kriteria penetapan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam pengertian tersebut diatas ditetapkan sebagai berikut:

- a) Ketersediaan sumberdaya dan daya tarik wisata;

- b) Fasilitas pariwisata dan fasilitas umum;
- c) Aksesibilitas;
- d) Kesiapan dan Keterlibatan Masyarakat;
- e) Potensi Pasar; dan
- f) Posisi Strategis Pariwisata dalam Pembangunan Daerah.

## 10.2 Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata

Perwilayahan destinasi pariwisata adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Daerah, Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah.

Kebijaksanaan pengembangan pariwisata Pidie ditarik dari pendekatan perwilayahan dipandang dari aspek nasional, regional ataupun lokal. Karena itu pengembangan pariwisata perlu dipandu oleh Pola Umum Wilayah Pengembangan Pariwisata yang dijiwai oleh potensi pariwisata dan laju kunjungan wisatawan.

Disisi lain adalah pada tempatnya bila disebutkan bahwa rencana suatu perkembangan kepariwisataan mempertimbangkan kekuatan yang ada. Berdasarkan analisis, kekuatan utama pengembangan pariwisata di Kabupaten Pidie yang dimiliki adalah:

- a. Potensi objek wisata alam
- b. Potensi objek wisata budaya dan sejarah
- c. Potensi objek wisata bahari
- d. Potensi objek wisata kuliner
- e. Potensi objek wisata olahraga dan rekreasi
- f. Potensi objek wisata buatan

Rencana Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pidie memiliki fungsi sebagai dasar dalam perumusan strategi pengembangan aspek-aspek khusus kepariwisataan Kabupaten, yaitu destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan; serta memberikan arah dalam perumusan program pengembangan aspek-aspek tersebut di atas.



Rencana Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Pidie dirumuskan berdasarkan:

1. Kebijakan dan strategis pengembangan kepariwisataan Kabupaten Pidie.
2. Kebutuhan pengembangan kepariwisataan untuk menjawab isu-isu strategis pengembangan kepariwisataan dan mencapai tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pidie.
3. Daya dukung lingkungan fisik, sosial budaya, dan ekonomi kepariwisataan Kabupaten Pidie.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pidie dan yang terkait.

# 11

## INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA

Dalam RIPPARDA Kabupaten Pidie salah satu keluaran utama dari laporan ini ialah rencana, indikasi dan program-program yang akan menjadi acuan kegiatan kerja pihak-pihak terkait sebagaimana di jabarkan berikut ini:



1. Destinasi Pariwisata  
a. Perwilayahan Destinasi Pariwisata

Tabel 11.1

**Arah Kebijakan 1: Menetapkan Kawasan Strategis Pembangunan Pariwisata dan Mensinergikan Pengembangan Daya Tarik Wisata dengan Rencana Pengembangan Aksesibilitas.**

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

| NO | STRATEGI                                                                                                                    | INDIKASI PROGRAM                                                           | 5 TAHUN PERTAMA<br>(2020-2024) |    |     |    |   | 5 TAHUN<br>KEDUA<br>(2025-2029) |    |     |    |   | PENANGGUNG<br>JAWAB                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|-----|----|---|---------------------------------|----|-----|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                             |                                                                            | I                              | II | III | IV | V | I                               | II | III | IV | V |                                                                                                                              |
| 1  | Menyusun Rencana Destinasi Pariwisata Daerah, Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah | 1. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPADA)        |                                |    |     |    |   |                                 |    |     |    |   | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan atau Perencanaan Pembangunan Daerah |
|    |                                                                                                                             | 2. Penyusunan Masterplan Destinasi Pariwisata Daerah                       |                                |    |     |    |   |                                 |    |     |    |   |                                                                                                                              |
|    |                                                                                                                             | 3. Penyusunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah                          |                                |    |     |    |   |                                 |    |     |    |   |                                                                                                                              |
|    |                                                                                                                             | 4. Penyusunan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah                        |                                |    |     |    |   |                                 |    |     |    |   |                                                                                                                              |
| 2  | Menyusun Regulasi Tata Bangunan dan Tata Lingkungan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD dan KPPD                              | 1. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Tata Lingkungan DPD, KSPD dan KPPD |                                |    |     |    |   |                                 |    |     |    |   | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan atau Perencanaan Pembangunan Daerah |

**Tabel 11.2**  
**Arah Kebijakan 2: Penegakan Regulasi Pembangunan DPD, KSPD dan KPPD**

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

| NO | STRATEGI                                                                                                                           | INDIKASI PROGRAM                                                                                                        | 5 TAHUN PERTAMA<br>(2020-2024) |    |     |    |   | 5 TAHUN KEDUA<br>(2025-2029) |    |     |    |   | PENANGGUNG JAWAB                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|-----|----|---|------------------------------|----|-----|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                    |                                                                                                                         | I                              | II | III | IV | V | I                            | II | III | IV | V |                                                                                                                              |
| 1  | Monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap Penerapan Rencan Induk Pembangunan Pariwisata Daerah, DPD, KSPD dan KPPD | 1. Penyusunan Tata Cara/Petunjuk Teknis Penetapan DPD, KSPD dan KPPD                                                    |                                |    |     |    |   |                              |    |     |    |   | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan atau Perencanaan Pembangunan Daerah |
|    |                                                                                                                                    | 2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Masterplan DPD, KSPD dan KPPD                                                    |                                |    |     |    |   |                              |    |     |    |   |                                                                                                                              |
|    |                                                                                                                                    | 3. Penyiapan rancangan peraturan tentang tata bangunan dan lingkungan pada daya Tarik wisata prioritas di KSPD dan KPPD |                                |    |     |    |   |                              |    |     |    |   |                                                                                                                              |
|    |                                                                                                                                    | 4. Penetapan Perda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan                                       |                                |    |     |    |   |                              |    |     |    |   |                                                                                                                              |
|    |                                                                                                                                    | 5. Penetapan Regulasi tentang Indikasi Program Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Sumatera Selatan                  |                                |    |     |    |   |                              |    |     |    |   |                                                                                                                              |
|    |                                                                                                                                    | 6. Penetapan Regulasi tentang Tata Bangunan dan Tata Lingkungan pada daya Tarik wisata prioritas di KSPD dan KPPD       |                                |    |     |    |   |                              |    |     |    |   |                                                                                                                              |



Tabel 11.3

Arah Kebijakan 3: Pengendalian Implementasi Pembangunan DPD, KSPD dan KPPD

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

| NO | STRATEGI                                                                      | INDIKASI PROGRAM                                                                                           | 5 TAHUN PERTAMA<br>(2020-2024) |    |     |    |   | 5 TAHUN KEDUA<br>(2025-2029) |    |     |    |   | PENANGGUNG JAWAB                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|-----|----|---|------------------------------|----|-----|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                               |                                                                                                            | I                              | II | III | IV | V | I                            | II | III | IV | V |                                                                                                                              |
| 1  | Meningkatkan Koordinasi antara Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Masyarakat | 1. Sosialisasi dan publikasi peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pidie |                                |    |     |    |   |                              |    |     |    |   | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan atau Perencanaan Pembangunan Daerah |
|    |                                                                               | 2. Pembentukan Forum Koordinasi Teknis Kepariwisata                                                        |                                |    |     |    |   |                              |    |     |    |   | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan atau Perencanaan Pembangunan Daerah |

**Tabel 11.4 :**

**Arah Kebijakan 1: Perintisan Pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong Pertumbuhan KSPD dan KPPD**

**Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:**

| NO | STRATEGI                                                     | INDIKASI PROGRAM                                                                                                                                                                                              | 5 TAHUN PERTAMA<br>(2020-2024) |    |     |    |   | 5 TAHUN KEDUA<br>(2025-2029) |    |     |    |   | PENANGGUNG JAWAB                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|-----|----|---|------------------------------|----|-----|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                               | I                              | II | III | IV | V | I                            | II | III | IV | V |                                                                                      |
| 1  | Mengembangkan daya Tarik wisata Baru pada DPD, KSPD dan KPPD | 1. Fasilitasi perintisan pengembangan daya Tarik wisata alam, budaya dan minat khusus/buatan bagi segmen wisata massal ( <i>mass market</i> ) maupun bagi segmen ceruk pasar di kawasan yang belum berkembang |                                |    |     |    |   |                              |    |     |    |   | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan |
|    |                                                              | 2. Fasilitasi perencanaan dan perintisan pengembangan sarana dan prasarana dasar di kawasan yang belum berkembang.                                                                                            |                                |    |     |    |   |                              |    |     |    |   |                                                                                      |
|    |                                                              | 3. Fasilitasi pemberian arahan bagi masyarakat setempat mengenai pengelolaan dan pemeliharaan destinasi untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat di Kawasan yang belum berkembang          |                                |    |     |    |   |                              |    |     |    |   |                                                                                      |
|    |                                                              | 4. Fasilitasi para pelaku usaha di dalam pengembangan kawasan pariwisata                                                                                                                                      |                                |    |     |    |   |                              |    |     |    |   |                                                                                      |



Tabel 11.5

Arah Kebijakan 2: Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

| NO | STRATEGI                                                                                                                          | INDIKASI PROGRAM                                                                                                                                                                                                   | 5 TAHUN PERTAMA<br>(2020-2024) |    |     |    |   | 5 TAHUN KEDUA<br>(2025-2029) |    |     |    |   | PENANGGUNG<br>JAWAB                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|-----|----|---|------------------------------|----|-----|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    | I                              | II | III | IV | V | I                            | II | III | IV | V |                                                                                      |
| 1  | Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya Tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPD, KSPD dan KPPD | 1. Penguatan Interpretasi dan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya, keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing daya Tarik wisata alam, budaya dan khusus/buatan yang sedang berkembang |                                |    |     |    |   |                              |    |     |    |   | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan |
|    |                                                                                                                                   | 2. Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya Tarik wisata terkait di sekitar lokasi dalam konteks regional, maupun nasional dan internasional.                                                 |                                |    |     |    |   |                              |    |     |    |   |                                                                                      |
|    |                                                                                                                                   | 3. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya Tarik wisata.                                                          |                                |    |     |    |   |                              |    |     |    |   |                                                                                      |

**Tabel 11.6**

**Arah Kebijakan 3: Pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas**

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

| NO | STRATEGI                                                     | INDIKASI PROGRAM                                                                                                                                                                                                                  | 5 TAHUN PERTAMA<br>(2020-2024) |    |     |    |   | 5 TAHUN KEDUA<br>(2025-2029) |    |     |    |   | PENANGGUNG JAWAB                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|-----|----|---|------------------------------|----|-----|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   | I                              | II | III | IV | V | I                            | II | III | IV | V |                                                                                      |
| 1  | Mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya Tarik wisata | 1. Pengembangan rentang aktivitas wisata dalam berbagai skala (hard-soft attraction) pada manajemen atraksi daya Tarik wisata alam, budaya dan buatan untuk menarik segmen wisatawan massal (mass market) dan segmen ceruk pasar. |                                |    |     |    |   |                              |    |     |    |   | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan |
|    |                                                              | 2. Pengembangan jenis-jenis atraksi lain dengan berbagai tema di sekitar lokasi daya Tarik wisata utamanya serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan terpadu yang saling melengkapi.                                            |                                |    |     |    |   |                              |    |     |    |   |                                                                                      |